

FORSIPAGAMA

MAJALAH FORUM KEARSIPAN UNIVERSITAS GADJAH MADA



Vol. 9 No. 2, Juli 2026

terbit 6 bulan sekali

REDAKSI

Pembina

Kepala Bidang Arsip
Herman Setyawan
Zaenudin

Penanggung jawab

Heri Santosa

Pimpinan Redaksi

Fitria Agustina

Editor

Anna Riasmiati
Isti Maryatun
Ully Isnaeni Effendi
Kurniatun

Layout

Zuli Erma Santi

DAFTAR ISI

Arsip dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia - 1

Dari Sejarah ke Sumber: Perspektif Arsip - 7

Archivist dan Records Manager: Dua Profesi Kearsipan di Dunia Internasional - 12

Racikan Alami Untuk Merawat Arsip yang Dicintai- 17

Komunikasi Organisasi dalam Pengelolaan Kearsipan Modern - 23

Semarang, Rob, dan Arsip Tata Kota yang Belum Selesai Dibaca - 29

Apakah Literasi Kearsipan itu Kompetensi atau Kesadaran? Catatan Konseptual

di Perguruan Tinggi - 37

Arsip Seni yang Hidup: Belajar dari Praktik Pengarsipan dan Aktivasi Arsip di IVAA - 43

Memasyarakatkan Arsip Melalui *Storytelling* - 50

Alih Media Arsip: Menjaga Akses Informasi untuk Membangun Generasi Literat - 54

Topografische Dienst van Nederlands-Indië: dari Arsip Kolonial ke Basis Data Geospasial- 58

Melestarikan Jejak: Pengelolaan Arsip Inaktif sebagai Investasi Akuntabilitas Institusi - 64

Sains di Balik Sejarah: Seni Memperpanjang Umur Arsip Kertas dan Foto Melalui Preservasi - 69

Arsip Keluarga: Memori yang Terjaga dan Tak Terlupakan - 74

Resensi Buku Romansa Arsiparis dan Pustakawan: Humor, Satire, dan Bahasa Cinta tentang

Melestarikan Memori- 79

FORSIPAGAMA

MAJALAH FORUM KEARSIPAN UNIVERSITAS GADJAH MADA

SALAM REDAKSI

Majalah ini menjadi jawaban atas berbagai masukan dari anggota Forsipagama, yaitu tersedianya sarana untuk mencurahkan gagasan, wawasan, serta pengalaman.

Edisi ke-18 ini diharapkan dapat menjadi penggugah selera menulis bagi semua anggota forum. Selanjutnya edisi ini diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan dan memungkinkan terbitnya edisi-edisi berikutnya.

Redaksi menyadari kekurangan di sana-sini dalam penyusunan edisi ke-18 ini. Namun terlepas dari itu semua, sesederhana apapun sebuah tulisan, tentu layak untuk mendapatkan apresiasi positif dalam rangka tumbuh kembang intelektualitas anggota. Untuk menambah wawasan, kami juga menerima beberapa tulisan dari luar anggota.

Redaksi memberikan kesempatan yang luas bagi segenap anggota forum untuk mencurahkan aspirasinya dengan topik utama seputar dunia kearsipan, baik berupa hasil penelitian, studi literatur, hasil seminar, hingga tulisan-tulisan bebas semacam puisi dan pengalaman kerja. Tulisan memuat judul, nama dan foto penulis, dan diketik dengan font Palatino Linotype (11) spasi 1,5, panjang tulisan 4-6 halaman. Tulisan dikirim ke tautan formulir yang disediakan.

Arsip dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia



Arif Rahman Bramantya
&
Machmoed Effendhie

Sejarah bangsa tidak hanya tersimpan dalam dokumen resmi negara. Ia juga hidup dalam arsip foto keluarga, surat pribadi, catatan organisasi, arsip pesantren, sejarah lisan tokoh lokal, dokumentasi komunitas adat, hingga ingatan kolektif kelompok-kelompok yang selama ini jarang masuk ke dalam arsip resmi. Sayangnya, dalam praktik kearsipan yang masih sangat berpusat pada negara, arsip individu dan komunitas kerap dipandang sebagai bahan tambahan, bukan sebagai bagian penting dari memori kolektif. Marginalisasi arsip individu dan komunitas dalam konteks Indonesia masih tampak dalam berbagai hal, misalnya arsip tentang etnis Tionghoa maupun

keterbatasan arsip sebagai sumber sejarah tentang periode penjajahan Jepang yang seharusnya juga dapat ditempatkan dalam kajian minoritas. Tulisan singkat ini akan memperjelas bagaimana peran negara dalam marginalisasi arsip individu dan komunitas di tanah air. Negara yang direpresentasikan oleh lembaga kearsipan secara tidak langsung ikut berperan dalam apa yang disebut sebagai marginalisasi. Selain berlindung dibalik tembok Undang Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan yang memang belum mengatur perorangan atau institusi non pemerintah mendirikan "lembaga kearsipan" sendiri, juga hambatan-hambatan struktural pun ikut menyertai proses marginalisasi. Dalam UU tersebut dengan tegas mengatur terkait Lembaga kearsipan yang terdiri dari Lembaga kearsipan nasional, Lembaga kearsipan tingkat provinsi, Lembaga kearsipan di Tingkat kabupaten atau kota, dan Lembaga kearsipan perguruan tinggi. Namun, di UGM sendiri terjadi strukturalisasi penggabungan Unsur Penunjang Universitas antara Arsip UGM dan Perpustakaan UGM di tahun 2023. Belum lagi problem terkait birokrasi dalam hal teknis prosedur penyusutan arsip, misalnya, harus melalui tahapan yang berlapis-lapis untuk mendapatkan izin Kepala lembaga kearsipan nasional. Itu pun membutuhkan waktu yang cukup lama. Sementara di negara lain, prosedur penyusutan arsip cukup

disahkan oleh "*Records Manager*" atas persetujuan pimpinan lembaga pencipta arsip (*creating agency*) yang tentu saja mereka sudah siap dengan ekosistem kearsipan yang dibangun. Birokratisasi kearsipan ini yang barangkali menjadi salah satu penyebab keengganan masyarakat dan institusi non negara menyerahkan arsipnya ke lembaga kearsipan, belum lagi jika kita berbicara masalah aksesibilitas dan hak milik. Negara tentu memiliki peran penting dalam menjamin keteraturan, perlindungan, dan keberlanjutan arsip. Namun, persoalan muncul ketika negara menjadi satu-satunya otoritas yang menentukan apa yang layak disebut arsip dan non arsip, siapa yang berhak menyimpannya, dan memori siapa yang dianggap penting. Dalam situasi seperti itu, arsip lebih mudah menjadi instrumen administratif kekuasaan daripada ruang bersama untuk merawat ingatan sosial.

Pada sepertiga terakhir abad kedua puluh, administrasi pemerintah tidak lagi ditandai dengan mono-hirarki struktur Weberian. Administrasi pemerintahan dan fungsi-fungsi negara yang berkembang menjadikan birokrasi semakin kompleks. Satu dokumen atau *file* dari waktu ke waktu dapat memiliki beberapa *provenance*. Dengan munculnya komputer desktop pribadi dan jaringan komunikasi digital, dan bahkan perangkat komputasi mobile (laptop, ponsel pintar, tablet), *Artificial Intelligence*, banyak

organisasi menjadi virtual, arsip seakan-akan menjadi "terputus" dengan *creating agency*-nya.

Scott (2010) menunjukkan bahwa perubahan administrasi menantang pemikiran deskripsi arsip. Model deskripsi tradisional mono-hirarki menjadi cair dan lunak. Pada dunia postmodern, arsip sudah bergerak dari belunggu mental monolitik menuju pluralistik. Arsip juga bergerak dari "sumber daya dan warisan budaya" menuju "landasan sosial bagi identitas dan keadilan". Dengan kemajuan dan kemudahan dalam teknologi informasi, setiap orang bisa menjadi penerbit independen, penulis, fotografer, pembuat film, musik-artis rekaman, dan bahkan dapat menjadi "arsiparis" atau jika boleh mengutip istilah yang dipakai Gus Muh (Muhidin M. Dahlan) adalah "arsiparis partikelir". Fenomena sosial organisasi non-pemerintah, kelompok, aktivis masyarakat, dan "warga biasa" (*ordinary*) bergabung bersama-sama, dalam berbagai forum, untuk berbagi minat tentang kearsipan perlu mendapat perhatian. Disinilah peran Arsiparis dan negara yang direpresentasikan lembaga kearsipan harus mendokumentasikan pengalaman manusia dan sosial sangat dibutuhkan. Purwanto Putra (2021) menyinggung bahwa arsip perlu dipahami sebagai ruang yang lebih terbuka, partisipatif, dan tidak hanya berpusat pada narasi besar negara atau elite, tetapi juga mampu merekam dan menghadirkan tema-tema kecil, pengalaman masyarakat, memori kolektif, dan

sumber-sumber sejarah yang beragam.

Arsiparis dan lembaga kearsipan dapat berbagi ruang tentang kearsipan dengan masyarakat, baik masyarakat di kota dan pedesaan, serta komunitas baik secara virtual disatukan oleh media sosial di dunia maya, dan lain sebagainya. Dalam dunia baru ini, paradigma lama tidak bisa lagi dipertahankan. Arsip personal maupun sosial diakuisisi kemudian di-*repository* untuk diolah, di deskripsi, dilestarikan, dan akhirnya dijadikan sumber rujukan ataupun referensi. Namun dalam beberapa definisi tradisional, arsip personal dan komunitas bahkan tidak diberi status sebagai arsip kecuali arsip yang melewati proses, prosedur, dan tatacara yang ditetapkan oleh otoritas lembaga kearsipan resmi (negara). Perdebatan status bahan yang dapat dikatakan arsip dan non arsip tidak akan berhenti dan akan terus bergulir dalam konteks keilmuan seperti yang dikatakan oleh Katelar (2017).

Arsip komunitas tidak hanya sebagai sumber dalam penelitian, tetapi bagian dari identitas komunitas tersebut. Dalam dunia digital, jagat politik baru, dan pluralistik, arsiparis profesional perlu mengubah diri dari elit negara dibalik dinding kelembagaan untuk menjadi mentor, fasilitator, pelatih, dan bekerja dalam masyarakat. Tujuannya untuk mendorong kerja kearsipan sebagai proses partisipatif bersama dengan banyak komunitas, bukan hanya "instruksi" dari dinding-dinding institusi kearsipan resmi. Arsiparis profesional

perlu mendengarkan dan berbicara dengan masyarakat, karena masyarakat memiliki memori kolektif-nya sendiri, mempunyai cara sendiri dalam mengelola dan menyimpan arsip.

Menjauhkan arsip dari entitas dengan mewajibkan penyerahan arsip ke lembaga kearsipan, sama dengan merenggut identitas mereka. Dalam bahasanya Geoffrey Yeo (2009) disebut *neo-colonializing memory*. Arsiparis profesional, beserta lembaga-lembaga kearsipan negara mendorong partisipasi masyarakat untuk menjaga dan merawat arsip mereka sendiri, untuk melayani mereka sendiri dan pada akhirnya, untuk melayani kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Re-definisi yang lebih plural tentang kepemilikan arsip, penilaian, akuisisi, tradisi lisan dan tulis, arsip pusat-daerah, dan lain sebagainya sangat perlu dilakukan untuk menuju ke arah "*total archives*" terkait perluasan paradigma kearsipan dari sekadar pengelolaan arsip administratif pemerintah menuju pengelolaan arsip yang lebih komprehensif, mencakup arsip publik, privat, komunitas, tradisi lisan, dan lain sebagainya sebagai bagian dari memori kolektif. Dalam proses re-definisi itu ada proses demokratisasi arsip dan tidak monopolis. Ada sifat holistik dan inklusif dan ini syarat bagi masyarakat di era digital. Pernyataan Jimerson (2010) ini patut direnungkan bahwa "Perubahan telah datang, dan jalan menuju perubahan itu telah terbuka. Jika arsiparis dan institusi kearsipan resmi tidak

terlibat dalam wacana dan gerakan ini, kita akan kehilangan kesempatan lain untuk membuat kontribusi positif bagi masyarakat".

Canada, dan beberapa negara bagian di Amerika, Australia, serta New Zealand telah bergerak menuju apa yang disebut Terry Cook (2013) sebagai demokratisasi arsip, yaitu pergeseran cara pandang bahwa arsip tidak hanya milik negara atau lembaga resmi, tetapi juga milik masyarakat. Pengalaman New Zealand melalui penelitian Joanna Newman (2011) dalam *Sustaining Community Archives* menunjukkan bahwa arsiparis dan lembaga kearsipan dapat berperan aktif mendorong partisipasi publik. Berbagai komunitas, organisasi profesi, kelompok sosial-budaya, lembaga keagamaan, hingga masyarakat adat mendirikan lembaga arsip sendiri, seperti New Zealand Society of Genealogists, Family History Society, Ratana Church and Movement Archives, Tinui Archives, dan Maori Archives Center. Praktik ini memperlihatkan bahwa arsip komunitas mampu menjaga memori keluarga, identitas budaya, sejarah lokal, dan pengalaman sosial yang sering tidak tercatat dalam arsip negara.

Bagi Indonesia, gagasan demokratisasi arsip sangat relevan karena masyarakat memiliki kekayaan sosial dan budaya yang luar biasa. Pesantren menyimpan sejarah pendidikan, jaringan keilmuan, dan praktik keagamaan lokal. Komunitas adat menyimpan ingatan tentang tanah, ritual, silsilah, dan relasi sosial. Organisasi keagamaan, perkumpulan

profesi, komunitas seni, organisasi pemuda, kelompok perempuan, hingga gerakan warga menghasilkan arsip yang merekam denyut kehidupan masyarakat. Semua kelompok tersebut menghasilkan arsip, tetapi banyak yang belum dikelola sebagai sumber pengetahuan penting. Foto keluarga, catatan organisasi, dokumen kampung, arsip ritual adat, rekaman lisan tokoh lokal, hingga dokumentasi kegiatan komunitas sering tercecer, rusak, atau hilang karena masih dianggap sebagai dokumen biasa. Padahal, arsip tersebut merupakan bukti kehidupan sosial yang dapat melengkapi sejarah resmi negara. Karena itu, Indonesia perlu mendorong lembaga kearsipan, perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan tentu saja Arsiparis profesional untuk hadir sebagai mitra masyarakat dalam menyelamatkan arsip mereka. Peran arsiparis profesional bukan mengambil alih memori masyarakat, melainkan mendampingi proses identifikasi, perawatan, digitalisasi, deskripsi, dan pengaturan akses arsip secara etis. Demokratisasi arsip juga harus tetap memperhatikan perlindungan data pribadi, hak komunitas, dan konteks budaya. Dengan cara ini, arsip tidak lagi hanya menjadi urusan administratif negara, tetapi menjadi ruang bersama untuk merawat ingatan, identitas, dan sejarah masyarakat Indonesia. Demokratisasi arsip harus menjadi agenda penting dalam pembangunan kearsipan nasional. Agenda ini tidak cukup hanya dilakukan melalui

"instruksi" regulasi, tetapi juga melalui perubahan cara pandang dan implementasi konkrit. Selain itu, arsip tidak hanya ditempatkan sebagai bukti kegiatan, tetapi juga sebagai konstruksi makna, produk budaya, dan sumber tafsir dalam kajian sosial-humaniora (Bramantya, 2023).

Dalam hal ini kerja kearsipan tersebut sangat membantu peneliti sebagaimana diungkapkan di kata pengantar disertasi Jennifer Lunn Douglas (2013), *Archiving author: Rethinking the analysis and representation of personal archives*, bahwa arsip masyarakat, arsip personal, dan arsip komunitas merupakan sumber penting bagi peneliti karena menyimpan jejak kehidupan sosial yang tidak selalu hadir dalam arsip negara. Negara tetap memiliki peran penting, tetapi peran itu harus bergeser dari pengendali tunggal menjadi mitra. Negara yang adil bukan hanya negara yang memiliki arsip resmi yang tertib, melainkan juga negara yang memberi ruang bagi ingatan rakyatnya. Sebab, tanpa arsip individu ataupun komunitas, sejarah bangsa akan selalu timpang, rapi secara administratif, tetapi miskin pengalaman-pengalaman sosial. Inilah yang disebut sebagai arsip dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Referensi

- Bastian, J. A., & Alexander, B. (Eds.). (2009). *Community archives: The shaping of memory*. London, England: Facet Publishing.
- Bramantya, A. R. (2023). Konsep "teks" dalam paradigma hermeneutika dan postmodernisme serta relevansinya terhadap kearsipan. *Khazanah: Jurnal Pengembangan Kearsipan*, 16(2), 157–176. <https://doi.org/10.22146/khazanah.82039>
- Cook, T. (2013). Evidence, memory, identity, and community: Four shifting archival paradigms. *Archival Science*, 13(2–3), 95–120. <https://doi.org/10.1007/s10502-012-9180-7>
- Cunningham, A. (Ed.). (2010). *The arrangement and description of archives amid administrative and technological change: Essays and reflections by and about Peter J. Scott*. Brisbane, Australia: Australian Society of Archivists.
- Douglas, J. L. (2013). *Archiving authors: Rethinking the analysis and representation of personal archives* (Doctoral dissertation). University of Toronto, Toronto, Canada.
- Jimerson, R. C. (2007). Archives for all: Professional responsibility and social justice. *The American Archivist*, 70(2), 252–281. <https://doi.org/10.17723/aarc.70.2.5n20760751v643m7>
- Jimerson, R. C. (2010). Review of the book *Community archives: The shaping of memory*, by J. A. Bastian & B. Alexander. *The American Archivist*, 73(2), 686–691.

- Ketelaar, E. (2017). Archival turns and returns: Studies of the archive. In A. J. Gilliland, S. McKemmish, & A. J. Lau (Eds.), *Research in the archival multiverse* (pp. 228–268). Clayton, Victoria, Australia: Monash University Publishing.
- Newman, J. M. A. (2011). Sustaining community archives. *Comma*, 2011(1), 89–101. <https://doi.org/10.3828/comma.2011.1.08>
- Putra, P. (2021). Prinsip demokratisasi arsip: Suatu konsep untuk menjembatani antara kearsipan, penulisan sejarah, dan pascamodernisme. *Khazanah: Jurnal Pengembangan Kearsipan*, 14(1), 39–56. <https://doi.org/10.22146/khazanah.56741>
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Scott, P. J. (1966). The record group concept: A case for abandonment. *The American Archivist*, 29(4), 493–504.

Dari Sejarah ke Sumber: Perspektif Arsip



Raistiwar Pratama
Arsiparis
Arsip Nasional Republik Indonesia

Memang terkesan meremehkan sekali ketika Sting menyanyikan baris pertama dari *Forget About the Future*, menganggap sejarah hanya sebagai ... *some history*. Lebih meremehkan lagi sewaktu Sting secara sarkasme berkali-kali menutup setiap bait lagu dari album *Sacred Love* tersebut seraya berteriak lantang: "So forget about the future. And let's get on with the past.... It's just too hard thinking about the future. So let's just get on with the past.... Let's just forget about the future. And get on with the past." Bagi Sting: "I know we got some history. We got some issues that we need to solve."

Namun bagi saya, Sting hanya ingin mengajak kita untuk memahami sejarah-sebagaimana-tertuliskan secara lebih bijak karena

sejarah-sebagaimana-terjadi pun hanya sampai kepada generasi kini melalui buku-buku teks sejarah atau mungkin buku-buku resmi keluaran pemerintah. Maka arsip sebagai sumber primer wajar saja mengemuka sebagai bahan pembelajaran sejarah, apabila kita ingin mendekati sumber sejarah sedekat mungkin.

Berpikir Menyejarah

Menurut Samuel Wineburg (2007) bahwa disiplin sejarah bermakna ganda, serupa namun berbeda. Pengertian pertama: "... *the disciplines of the university: those bodies of knowledge that have accrued over generations, each with its own distinctive means of investigation and form of argument.*" Pengertian kedua yang merupakan makna sejatinya bahwa disiplin sejarah merupakan ... "*the opposite of disorderly, slovenly, whimsical, and capricious. In this sense of discipline, history teaches us to resist first-draft thinking and the flimsy conclusions that are its fruits.*" Lebih lanjut tulis Sam Wineburg bila kita menelantarkan pembelajaran sejarah maka: "... *we are destined to be history's victims rather than its students.*"

Penulis teringat tulisan Benedetto Croce bahwa "*every true history is contemporary history.*" Begitu pula setiap historiografi atau penulisan sejarah pun layak diperbarui sebagaimana ungkapan pelurusan sejarah yang terus-menerus terjadi sepanjang terdapat: teori baru, sudut pandang baru, dan tentu saja sumber baru. Lebih-lebih bila sumber baru tersebut

merupakan sumber primer. Disinilah mengemuka perihal akses atas arsip yang salah satunya tersedia melalui ketersediaan sarana bantu temu balik atau *finding aids*: daftar, inventaris, dan guide.

Lebih lanjut apabila terbuka akses atas sumber primer maka: "... *the archives thus represent an opportunity to go beyond the sterile, seamless quality of most textbook presentations to engage with real people and authentic problems.*" Lalu: "... *fragmentary, idiosyncratic, and often contradictory nature of primary documents can help students understand the problematic nature of historical evidence and the need for critical thinking about sources and bias* (Bill Tally and Lauren B. Goldenberg, 2005).

Sekalipun sumber primer, arsip bukan sama sekali bebas kritik. Memang arsip dapat lulus dari kritik ekstern, namun sangat sulit lulus dari kritik intern sebagaimana menurut Sartono Kartodirdjo (Koentjaraningrat [ed.], 1997: 57): "... tidak dilakukan usaha untuk mengadakan kritik ekstern terhadapnya. Sebaliknya, kritik intern sangat diperlukan." Lebih lanjut Kartodirdjo (1984) menyatakan "... bahwa pembuatan dokumen sebagai ciri esensial dari birokrasi modern, lazimnya menjadi suatu pekerjaan rutin bagi para pejabat pemerintah. ... dilakukan dalam waktu mendesak dipengaruhi prasangka.... ditulis pejabat pemerintah kolonial dengan pandangan tertentu terhadap masyarakat bumiputera.... terlalu sepihak." Menurut Kartodirdjo pula (1993: 16): "Sejak ilmu

diplomatik diciptakan oleh Mabillon (1632-1707) pemakaian dokumen sebagai sumber sejarah memerlukan kritik intern maupun kritik ekstern."

Perspektif Baru

Bagi arsiparis, kami seperti tertantang sewaktu membaca tulisan Terry Cook (1997): "*Archivists have therefore changed over the past century from being passive keepers of an entire documentary residue left by creators to becoming active shapers of the archival heritage.*" Para arsiparis semakin mendekati sejarawan, terutama dengan menyusun guide: menyodorkan tema penelitian.

Begitu pula sewaktu membaca tulisan Sam Wineburg (2010): "*Most important of all, these questions transform the act of reading from passive reception to an engaged and passionate integration.*" Berpikir menyejarah tidak hanya merupakan milik para sejarawan, namun semestinya milik setiap kita: murid, mahasiswa, guru, dan arsiparis. *Historical mindedness* — serupa *historical thinking* — merupakan kemampuan yang dapat siapa saja miliki.

Bagaimana para pembaca memahami arsip sebagai sumber sejarah yang sezaman, mungkin saja resmi, dan primer; membayangkan bagaimana peliknya peristiwa masa lampau sampai kepada kita, membayangkan bagaimana 'sederhananya' suatu peristiwa masa lampau yang terwakili melalui arsip, dan betapa 'sedikitnya' sejarah-

sebagaimana-terjadi yang sampai kepada kita lewat sejarah-sebagaimana-tertulis. Kelak lewat pembacaan menyejarah tersebut tercapailah sebagaimana Sam Wineburg dan Daisy Martin (2004): "*Reading primary and secondary sources constitutes the heart of such an investigate curriculum, but reading is only one part of two-part equation: It must be accompanied by writing.*" Lebih lanjut menurut Wineburg dan Martin (2004): "*Literacy is the keyword here, because the teaching of history should have reading and writing as its core.*" Demikianlah, membaca dan menulis merupakan dwitunggal apabila kita hendak lebih bijak memahami sejarah, baik sebagai pembelajar, peneliti, maupun wisatawan.

Selama ini, perihal sudut pandang kental mewarnai penulisan sejarah, sembari jarang sekali memperhatikan keberadaan arsip sebagai sumber primer itu sendiri: siapa yang menyusun, kapan waktu penyusunan, ejaan tulisan, latar belakang sejarah, jenis kertas, dan hal-hal intern juga ekstern lainnya. Tibalah waktunya ketika pendulum dilema sudut pandang mengayun ke arah semestinya yaitu sejarah sebagaimana tertulis seperti Leopold von Ranke pernah sodorkan (Kartodirdjo, 1997: 30).

Historiografi Kearsipan

Thomas Scott-Railton, penerjemah *Le gout de l'archive* (1981/1989) gubahan Arlette Farge, menulis: "*The French word fonds can refer to either sources of information or natural springs of water.*" Penulis menyodorkan konsep historiografi

kearsipan bukan semata tulisan mengenai sejarah, sistem, ilmu, dan tradisi kearsipan. Dari perspektif arsip, kita dapat menyusun historiografi kearsipan. Historiografi, penelitian, kajian, dan kebijakan yang berdasarkan ketersediaan sumber-sumber yang absah, lolos kritik sumber, dan mencerminkan keragaman sudut pandang para pencipta arsip (*co-creation*). Historiografi kearsipan adalah tulisan apapun—bisa berupa hasil penelitian, kajian, naskah akademis dan naskah urgensi, kebijakan (*policy paper, policy brief*), serta norma, standar, prosedur, dan kriteria atau petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis—berdasarkan ketersediaan sumber yang autentik, utuh, andal, berguna, representatif, prosedural, dan imparial.

Sebagaimana pengelolaan pengetahuan (*knowledge management*), arsip pun tidak hanya tertulis, tercatat, terekam, atau terpahat sebagaimana bentuk *tacit knowledge*; namun arsip juga dapat berupa ingatan, kenangan, tradisi lisan, dan memori—kolektif dan individu, nasional dan korporat—sebagai bagian dari *explicit knowledge*. Arsip juga bukan hanya keluaran lembaga resmi pemerintahan dan organisasi. Setiap komunitas dapat menciptakan bentuk arsipnya sendiri. Apa yang pernah Terry Cook (2012) gagas mengenai pengarsipan komunitas bukan hanya arsip mengenai komunitas atau bagaimana komunitas menciptakan arsip dan mengarsipkan kegiatan mereka sendiri. Paradigma pengarsipan komunitas juga tidak

hanya untuk melengkapi perspektif penguasa, namun penguasa juga merupakan salah satu entitas dan berkedudukan setara dalam komunitas. Bukan hanya "arsip komunitas" (*community archives*) atau "pengarsipan komunitas" (*archiving communities*) namun juga "komunitas kearsipan" (*archival communities*).

Dari perspektif arsip, apapun dapat bernilai arsip, sebagaimana Undang-Undang 43/2009 tentang Kearsipan, adalah "rekaman informasi dalam berbagai bentuk dan media" dan, sebagaimana menurut *Records in Contexts* (RiC), "sesuatu" (*thing*) yang mencakup beberapa entitas: "arsip" (*record*), "agen" (*agent: person, institution, dan organization*), "kegiatan" (*activity*), dan "tempat" (*place*), "waktu" (*date*), *et cetera*. Arsip adalah sesuatu yang bermakna bukan hanya karena bentuknya (*regardless of form*). Arsip adalah sesuatu yang bermakna sebagai informasi, bukti, dan aset. Arsip terpilih mewakili fungsi, kegiatan, kejadian, dan peristiwa. Arsip memiliki konteks sumber (*provenance* dan *original order*) dan saling terhubung dengan banyak sumber (*semantical relation*).

Apabila arsip hendak kita bentuk menjadi sumber yang absah (*authoritative records*), sumber sezaman (*contemporary source*), dan sumber primer (*primary source*); maka perhatian serius bukan hanya kita arahkan pada kemudahan akses karena arsip telah beralih rupa (konversi, migrasi, dan emulasi); namun juga pemenuhan syarat-syarat penciptaan, seperti autentik, andak (*reliable*), terpercaya (*trustworthy*), padu (*integrity*), dan berguna

(*useful*), serta imparial, representatif, dan prosesusual. Dengan demikian arsip dapat menemukan konteks sumber dan memenuhi konteks sasaran.

Referensi

- Abdullah, Taufik. 1995. "Dokumen CIA tentang G30S," *Gatra*, 14 Oktober 1995.
- Cook, Terry. 1997. "What is Past is Prologue: A History of Archival Ideas Since 1898, and the Future Paradigm Shift," *Archivaria* 43: 17–63.
- . 2013. "Evidence, Memory, Identity, and Community: Four Shifting Archival Paradigms," *Archival Science* 13: 95 – 120.
- Farge, Arlette. 1989. *Le gout de l'archive*. Paris: Le Seuil.
- International Council on Archives. 2023 – 2025. *Records in Contexts*. <https://www.ica.org/ica-network/expert-groups/egad/records-in-contexts-ric/>, accessed June 14th 2026.
- Kartodirdjo, Sartono. 1984. *Pemberontakan Petani Banten: Kondisi, Jalan Peristiwa, dan Kelanjutannya: Sebuah Studi Kasus Mengenai Gerakan Sosial di Indonesia*. Terjemahan. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.
- . 1993. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia.

- Kuntowijoyo. 1997. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Pratama, Raistiwar. 2015. "Berguru ke Padang Datar, Berguru Kepala Ajar: Arsip sebagai Bahan Ajar," *Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya* 9/2: 223–235.
- Sting. 2003. *Sacred Love*. A&M Record. <http://www.sting.com/discography>, accessed June 14th 2026.
- Tally, Bill; Goldenberg, Lauren B. 2005. "Fostering Historical Thinking with Digitized Primary Sources," *International Society for Technology in Education* 38/1.
- Wineburg, Samuel; Martin, Daisy. 2004. "Reading and Rewriting History," *Teaching for Meaning* 62/1: 42–45.
- Wineburg, Samuel. 2006. *Berpikir Historis: Memetakan Masa Depan, Mengajarkan Masa Lalu*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- , 2007. "Unnatural and Essential: The Nature of Historical Thinking," *Teaching History* 129: 6–11.
- , 2010. "Historical Thinking and Other Unnatural Acts," *Phi Delta Kappan International* 92/4.

Archivist dan Records Manager: Dua Profesi Kearsipan di Dunia Internasional



Herman Setyawan
Universitas Gadjah Mada

Tidak sedikit dari kita yang menganggap bahwa siapa pun yang bekerja mengelola arsip adalah seorang arsiparis. Padahal, jika kita melihat praktik kearsipan di berbagai negara, terdapat beragam istilah profesi dengan peran yang berbeda. Dua di antaranya adalah *archivist* dan *records manager*.

Kedua profesi ini cukup dikenal di negara-negara seperti Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Selandia Baru. Meskipun sama-sama bergerak dalam pengelolaan informasi terekam, keduanya memiliki fokus, tujuan, serta kompetensi yang berbeda.

Memahami kedua profesi tersebut bukan berarti mengganti istilah atau sistem

yang telah berlaku di Indonesia. Sebaliknya, pengenalan ini dapat memperluas wawasan mengenai perkembangan dunia kearsipan internasional. Dengan memahami bagaimana negara lain mengelola rekod dan arsip, kita dapat melihat posisi Indonesia sekaligus belajar dari berbagai praktik yang telah berkembang.

Menjaga Hari Ini atau Merawat Masa Lalu?

Cara paling mudah untuk memahami perbedaan antara *archivist* dan *records manager* adalah dengan melihat siklus hidup informasi. Bayangkan sebuah surat keputusan diterbitkan oleh sebuah organisasi. Pada tahap awal, surat tersebut digunakan untuk mendukung aktivitas organisasi. Surat itu menjadi dasar pelaksanaan pekerjaan, alat bukti administrasi, serta rujukan dalam pengambilan keputusan. Pada fase inilah *records manager* memainkan perannya.

Namun, setelah masa gunanya berakhir, sebagian dokumen akan dimusnahkan sesuai ketentuan. Sebagian lainnya justru dipertahankan karena memiliki nilai sejarah, hukum, atau nilai pembuktian jangka panjang. Ketika dokumen memasuki tahap ini, peran *archivist* menjadi sangat penting.

Dengan kata lain, *records manager* banyak berurusan dengan kebutuhan organisasi saat ini, sedangkan *archivist* berupaya memastikan bahwa memori organisasi tetap terjaga untuk masa depan.

Siapa Itu *Archivist*?

Dalam tradisi kearsipan internasional, *archivist* adalah profesional yang bertanggung jawab atas arsip permanen. Mereka mengelola arsip yang dianggap memiliki nilai berkelanjutan bagi masyarakat, organisasi, maupun negara.

Perkembangan profesi *archivist* di Inggris sangat erat kaitannya dengan kebutuhan untuk melestarikan bukti sejarah dan memperkuat akuntabilitas publik. Seiring waktu, tugas *archivist* tidak lagi sekadar menjaga dokumen lama, tetapi juga memastikan agar arsip dapat dipahami dan digunakan oleh masyarakat (Shepherd, 2009). Tanggung jawab *archivist* meliputi:

1. melakukan akuisisi arsip;
2. melakukan penilaian untuk nilai guna arsip permanen;
3. menyusun dan menata arsip;
4. membuat deskripsi arsip;
5. melakukan preservasi;
6. menyediakan akses bagi pengguna;
7. memberikan layanan referensi dan penelitian.

Archivist banyak bekerja di lembaga kearsipan nasional, universitas, museum, pusat dokumentasi sejarah, lembaga kebudayaan, hingga organisasi yang memiliki koleksi arsip permanen. Dalam praktik modern, *archivist* juga berhadapan dengan tantangan baru berupa arsip digital. Berkas elektronik, situs web, foto digital, rekaman audiovisual, bahkan media sosial kini menjadi bagian dari warisan dokumenter yang perlu dipikirkan keberlanjutannya.

Moss (2010) mengingatkan bahwa data tanpa perangkat lunak yang tepat dapat menjadi tidak berguna. Oleh karena itu, *archivist* masa kini perlu memahami strategi preservasi digital agar arsip tetap dapat diakses meskipun teknologi terus berubah.

Selain aspek teknis, isu representasi sosial juga menjadi perhatian. Cocciolo (2016) menunjukkan bahwa profesi *archivist* semakin dituntut untuk menghadirkan praktik yang lebih inklusif, sehingga berbagai kelompok masyarakat memiliki ruang dalam memori kolektif yang dibangun melalui arsip.

***Records Manager*: Mengelola Informasi untuk Mendukung Organisasi**

Archivist identik dengan pelestarian jangka panjang, sedangkan *records manager* berfokus pada efektivitas dan akuntabilitas organisasi. *Records manager* bertanggung jawab memastikan bahwa rekod organisasi tercipta, digunakan, disimpan, dan disusutkan secara tepat. Rekod yang dimaksud dapat berupa surat, laporan, kontrak, surel, notulen rapat, formulir, hingga berbagai dokumen digital yang menjadi bukti pelaksanaan fungsi organisasi.

Tujuan utama *records management* adalah menyediakan informasi yang benar kepada orang yang tepat pada waktu yang tepat. Dalam organisasi modern, peran *records manager* sangat strategis karena berkaitan dengan efisiensi kerja, kepatuhan terhadap regulasi, pengendalian risiko, transparansi dan akuntabilitas, dan perlindungan hak organisasi maupun individu.

'Galán & Bressi (2021) menjelaskan bahwa pengelolaan rekod yang baik merupakan fondasi keberlangsungan informasi dalam organisasi. Tanpa sistem yang memadai, organisasi berisiko kehilangan bukti aktivitasnya.

Records manager biasanya bekerja di lingkungan pemerintahan, perusahaan swasta, organisasi internasional, rumah sakit, lembaga pendidikan, dan berbagai institusi lainnya. Perkembangan teknologi juga mengubah praktik profesi ini. Implementasi *Electronic Records Management Systems* (ERMS) membuat *records manager* perlu menguasai berbagai aspek baru, mulai dari tata kelola informasi digital hingga manajemen perubahan organisasi.

Borglund et al. (2009) menemukan bahwa penerapan sistem elektronik telah mengubah kebutuhan kompetensi *records*

manager. Mereka tidak hanya dituntut memahami prinsip-prinsip kearsipan, tetapi juga mampu berkolaborasi dengan unit teknologi informasi dan memahami proses bisnis organisasi.

Perbedaan yang Saling Melengkapi

Meskipun berbeda, *archivist* dan *records manager* sesungguhnya merupakan dua profesi yang saling melengkapi. *Records manager* memastikan bahwa rekod organisasi dikelola dengan baik selama masih digunakan. Ketika rekod tersebut memiliki nilai permanen, *archivist* mengambil alih tanggung jawab untuk menjamin pelestariannya. Secara sederhana, perbedaannya dapat dilihat pada Tabel 1.

Perbedaan tersebut bukanlah batas yang kaku. Dalam praktiknya, kedua profesi sering berkolaborasi. Bahkan, beberapa organisasi

Tabel 1. Perbedaan *archivist* dan *records manager*

Aspek	<i>Archivist</i>	<i>Records Manager</i>
Fokus pengelolaan	Arsip permanen yang memiliki nilai sejarah, hukum, budaya, atau pembuktian jangka panjang	Rekod aktif dan semiaktif yang masih digunakan dalam kegiatan organisasi
Orientasi kerja	Pelestarian dan akses jangka panjang	Efisiensi operasional dan efektivitas organisasi
Lingkungan kerja	Lembaga kearsipan, museum, perpustakaan, universitas, atau pusat dokumentasi	Instansi pemerintah, perusahaan, rumah sakit, organisasi internasional, dan berbagai institusi lainnya
Tujuan utama	Menjaga memori kolektif serta menyediakan akses untuk penelitian dan kepentingan publik	Mendukung pengambilan keputusan, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap regulasi
Kompetensi utama	Deskripsi arsip, akuisisi, penataan, preservasi, dan layanan akses arsip	Manajemen rekod, pengelolaan siklus hidup rekod, tata kelola informasi, dan penerapan kebijakan organisasi

menempatkan keduanya dalam satu unit kerja yang terintegrasi.

Lalu, Bagaimana dengan Indonesia?

Indonesia memiliki konteks yang berbeda. Dalam sistem nasional, profesi yang dikenal secara formal adalah arsiparis, yaitu jabatan fungsional yang melaksanakan kegiatan kearsipan. Dalam pelaksanaannya, arsiparis dapat terlibat dalam pengelolaan arsip dinamis maupun arsip statis, tergantung pada tugas dan kebutuhan organisasi. Kondisi ini berbeda dengan sejumlah negara yang membedakan secara lebih tegas antara *archivist* dan *records manager*.

Karena itu, menyamakan *archivist* dengan arsiparis Indonesia secara langsung dapat menimbulkan penyederhanaan yang kurang tepat. Demikian pula, *records manager* tidak selalu memiliki padanan yang identik dalam struktur organisasi di Indonesia. Perbedaan tersebut lahir dari sejarah perkembangan profesi, sistem pendidikan, regulasi, dan kebutuhan kelembagaan yang berbeda-beda.

Namun demikian, terdapat benang merah yang menghubungkan semuanya, yaitu komitmen untuk memastikan bahwa informasi dapat dikelola secara efektif, autentik, dan berkelanjutan.

Tantangan Masa Depan

Transformasi digital telah mengubah lanskap pengelolaan informasi secara drastis. Organisasi kini menghasilkan rekod dalam

jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Surat elektronik menggantikan surat kertas. Rapat dilakukan secara daring. Keputusan penting tersimpan dalam sistem informasi. Bahkan, komunikasi melalui aplikasi pesan instan dapat menjadi bagian dari bukti aktivitas organisasi.

Perubahan ini menghadirkan tantangan baru, baik bagi *archivist* maupun *records manager*. Keduanya perlu memahami isu keamanan informasi, autentisitas dokumen digital, preservasi jangka panjang, interoperabilitas sistem, hingga penggunaan teknologi baru seperti kecerdasan buatan. Selain itu, kompetensi nonteknis seperti komunikasi, kepemimpinan, dan kemampuan berkolaborasi lintas disiplin juga menjadi semakin penting. Wertheimer (2024) menegaskan bahwa pendidikan kearsipan abad ke-21 perlu menghasilkan lulusan yang adaptif terhadap perubahan, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar profesi.

Belajar dari Berbagai Tradisi

Mengenal *archivist* dan *records manager* bukan berarti Indonesia harus menyalin begitu saja praktik negara lain. Setiap negara memiliki kebutuhan, regulasi, dan budaya organisasi yang berbeda. Namun, pemahaman terhadap perkembangan profesi internasional dapat membuka ruang diskusi yang lebih luas. Bagaimana pengelolaan rekod dapat diperkuat? Apakah diperlukan spesialisasi kompetensi tertentu? Bagaimana

mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu menghadapi tantangan digital? Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting untuk terus dikaji.

Pada akhirnya, yang terpenting bukanlah nama profesinya, melainkan bagaimana informasi yang dihasilkan oleh organisasi dapat dikelola secara bertanggung jawab. Tanpa pengelolaan rekod yang baik, organisasi dapat kehilangan jejak aktivitasnya. Tanpa pelestarian arsip yang memadai, masyarakat berisiko kehilangan bagian dari ingatan kolektifnya.

Di tengah dunia yang berubah dengan cepat, *archivist* dan *records manager* menunjukkan bahwa mengelola informasi bukan sekadar pekerjaan administratif. Ia adalah upaya menjaga keberlanjutan organisasi sekaligus merawat warisan pengetahuan bagi generasi yang akan datang.

Referensi

- Borglund, E., Anderson, K., & Samuelsson, G. (2009). *How requirements of record managers change after implementing new electronic records management systems*. 59 – 66. Scopus. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84896292329&partnerID=40&md5=e84eda368e856a09a489d0f849dccc75>
- Cocciolo, A. (2016). When Archivists and Digital Asset Managers Collide: Tensions and Ways Forward. *American Archivist*, 79(1), 121–136. Scopus. <https://doi.org/10.17723/0360-9081.79.1.121>
- Galán, J., & Bressi, M. (2021). The World Trade Organization's Records and Archives Management Policy: An overarching framework for ensuring information continuity. *Comma*, 2019(2), 97–108. Scopus. <https://doi.org/10.3828/comma.2019.2.9>
- Moss, M. (2010). Without the data, the tools are useless; without the software, the data is unmanageable. *Journal of the Society of Archivists*, 31(1), 1–14. Scopus. <https://doi.org/10.1080/00379811003658443>
- Shepherd, E. (2009). *Archives and archivists in 20th century England* (p. 245). Scopus. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84899230099&partnerID=40&md5=4f3a5177ed4462f59c68e720b43f7ace>
- Wertheimer, A. B. (2024). Archives and Records Management Education in the 21st Century. In *Encyclopedia of Libraries, Librarianship, and Information Science, First Edition, Four Volume Set* (Vol. 3, p. V3:412–V3:416). Scopus. <https://doi.org/10.1016/B978-0-323-95689-5.00257-1>

Racikan Alami untuk Merawat Arsip yang Dicintai



Lipursari, S.Sn., MM
Arsiparis
Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta

Pendahuluan

Arsiparis dan arsip memiliki hubungan yang sangat erat dan majemuk. Hubungan mereka bisa secara fungsional, prosedural, dan ketergantungan atau independensi. Arsiparis adalah profesi yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan, sementara arsip adalah dokumen atau rangkaian kegiatan yang sudah berlalu dan merupakan informasi yang harus dikelola. Sehingga tanpa arsiparis, arsip sangat rentan terhadap risiko tidak terkelola, tidak mempunyai nilai atau bahkan hilang. Sebaliknya, arsip merupakan objek kerja utama bagi profesi arsiparis.

Ada satu bagian penting yang tidak boleh

ditinggalkan dalam pengelolaan arsip, yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan arsip merupakan salah satu pilar utama yang bertujuan menjaga keamanan dan keselamatan arsip, baik fisik maupun informasinya, selama masa retensi.

Sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari dalam perawatan buku, arsip, pakaian, atau batik tulis menggunakan material kamper atau kapur barus. Selain mudah didapat, kamper atau kapur barus sudah terbukti selama puluhan tahun mampu mengusir serangga, seperti kecoa, ngengat, kutu buku, rayap dan mencegah bau apek pada pakaian/almari pakaian dengan menaruhnya di sudut-sudut rak buku, rak arsip atau di dalam box arsip. Hal tersebut lazim ditemui di banyak tempat. Mulai kantor, museum, bahkan rumah atau tempat tinggal.

Kamper atau Kapur Barus

Dari keterangan tentang kamper atau kapur barus tersebut, kemudian muncul pertanyaan : betulkah kamper atau kapur barus aman untuk merawat arsip dan buku ? Menurut Herman Setyawan, M.Sc Arsiparis Ahli Muda UGM dalam tulisannya yang berjudul "Kamper untuk Preservasi Material Arsip, Amankah ?" (2014) dan beberapa penelitian menunjukkan bahwa penggunaan kamper atau kapur barus tidak direkomendasikan, sebagaimana beberapa studi berikut :

- Collection Management Journal (2004)

menuliskan bahwa terdapat studi tentang efek kapur barus pada kertas dan menemukan bahwa kapur barus menyebabkan perubahan warna, penggetasan, dan degradasi serat kertas yang signifikan dari waktu ke waktu.

Peneliti menyimpulkan bahwa penggunaan kapur barus sebagai pembasmi hama di tempat penyimpanan arsip sebaiknya dihindari.

- Dalam *Journal of the American Institute for Conservation* (2007) terdapat studi tentang penggunaan kapur barus di museum dan koleksi arsip yang menyatakan bahwa kapur barus dapat bereaksi dengan bahan lain di lingkungan untuk menciptakan senyawa berbahaya, seperti asam asetat, yang dapat menyebabkan kerusakan lebih lanjut terhadap koleksi.
- The American Library Association's "Preservation Week" menjelaskan dan memperingatkan agar tidak menggunakan kamper karena tidak efektif dalam mengusir hama dan dapat menyebabkan kerusakan pada koleksi.
- Nancy E. Kraft (2010), dalam artikelnya "Preserving Library Materials", dia menganjurkan untuk tidak menggunakan kapur barus, karena dapat merusak kertas dan bahan lain dalam koleksi perpustakaan.
- Donia Conn dan Sherry Byrne (2014), dalam buku mereka "Preservation

Planning: Guidelines for Writing a Long-Range Plan", menyarankan untuk tidak menggunakan kapur barus, dengan menyatakan bahwa ini bukan metode pengendalian hama yang efektif atau aman dalam penyimpanan arsip.

- David Grattan (2005), dalam bukunya "Preservation in Libraries: Principles, Strategies, and Practices for Librarians", mencatat bahwa kapur barus dapat merusak kertas dan bahan lainnya, dan merekomendasikan metode pengelolaan hama alternatif yang lebih efektif.
- *Journal of Cultural Heritage* (2014), sebuah studi menyelidiki dampak kapur barus pada sifat mekanik serat kapas, yang biasa digunakan dalam bahan arsip. Studi ini menemukan bahwa kapur barus menyebabkan kerusakan signifikan pada serat, termasuk kelenturannya.
- Mitos Umum Tentang Fumigasi Arsip yang diposting oleh Raymond Setiyawan, Agustus, 2025 juga menuliskan bahwa kapur barus tidak membunuh hama, ia hanya bertindak sebagai penolak (repellent) yang sangat lemah. Uap kimianya juga terbukti dapat merusak kertas dalam jangka panjang, membuatnya menjadi lebih asam dan rapuh.

Rempah Hasil Bumi Indonesia

Dari uraian tersebut, kemudian muncul pertanyaan: apa yang harus dilakukan dalam



Gambar 1. Atas: racikan rempah yang belum dicuci
Bawah: yang sudah dicuci bersih (foto pribadi)

upaya perawatan terhadap arsip maupun buku supaya aman dan terpelihara dengan baik? Sehingga tetap memiliki nilai guna dalam jangka waktu lama dan bisa dinikmati serta dibaca kalimat demi kalimat yang ada di dalamnya sebagai sumber informasi maupun ilmu pengetahuan dari generasi ke generasi.

Suatu ketika, penulis menghadiri acara ulang tahun Museum Radya Pustaka ke-134 dan bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda tgl 28 Oktober tahun 2024. Selesai acara penulis tidak langsung pulang, karena sudah kenal dan akrab dengan dengan salah satu pegawainya kamipun bercerita tentang banyak hal. Termasuk tentang dampak negatif penggunaan kamper atau kapur barus bagi arsip dan buku. Dari situ, pegawai Radya Pustaka bercerita

kalau ada cara alami untuk merawat arsip dan buku. Bahkan bahan-bahan alami tersebut juga bisa untuk merawat pakaian maupun batik tulis. Adapun jenisnya adalah kayu manis, kayu gaharu, merica dan cengkih. Semua bahan tersebut bisa dengan mudah didapat dan merupakan bagian kecil dari hasil bumi negeri tercinta, Indonesia.

Kayu manis adalah tumbuhan dengan genus *Cinnamomum* dan famili Lauraceae yang digunakan sebagai rempah-rempah, yang memiliki aroma yang kuat, bersifat hangat dan rasa manis. Bagian kayu manis yang dapat dimanfaatkan adalah kulit kayu bagian dalam yang dipotong dengan ketebalan tertentu atau dalam bentuk bubuk kayu manis. Kulit kayu manis ini memiliki aroma wangi yang khas.

Beberapa bahan kimia yang terkandung di dalamnya adalah minyak atsiri, eugenol, safrole, sinamaldehyd, tannin, kalsium oksalat, dan zat penyamak (fkk.umj.ac.id/2024/09/Kayu-Manis). Kayu manis, selain mengeluarkan aroma harum, juga bernuansa pedas. Nuansa pedas inilah yang ditakuti oleh serangga perusak kain, buku dan arsip.

Gaharu terjadi melalui proses patologi yang unik akibat respons terhadap infeksi jamur pada pohon pembentuk gaharu, seperti *Aquilaria* spp. Pembentukan gaharu ditandai oleh proses pencoklatan jaringan batang pada area terinfeksi akibat akumulasi resin, yaitu metabolit sekunder yang merupakan senyawa penentu kualitas gaharu. Salah satu hasil hutan yang bernilai ekonomi tinggi. Kayu gaharu mengandung zat antitoksin dan antimikroba yang sangat bagus untuk bahan pengawet dan anti rayap karena kokoh dan kuat. Selain itu aroma yang dihasilkan begitu lembut, sehingga memiliki efek menenangkan dan menghilangkan stress.

Merica atau lada adalah tanaman yang kaya akan kandungan kimia, seperti minyak lada, minyak lemak, juga pati. Merica mempunyai sifat sedikit pahit, pedas, hangat dan antipiretik. Rasa pedas merica dihasilkan oleh zat piperin, piperanin dan chavicin yang merupakan persenyawaan dari piperin dengan semacam alkaloid. Sedangkan aroma biji berasal dari minyak atsiri yang terdiri dari beberapa jenis, yaitu terpen (terpentin), merica

hitam dan putih, dengan senyawa kimia, kadar air, zat protein dan zat karbohidrat. Karena senyawa yang terkandung didalamnya itu, maka merica juga bisa dimanfaatkan sebagai pestisida alami. Zat racunnya sangat kuat sehingga bisa berfungsi sebagai insektisida pembunuh serangga, dan menghalau binatang perusak kain (jarik), pakaian, buku maupun arsip sejenis ngengat, kutu buku atau lainnya. Selain itu, ekstrak kasar merica hitam juga sangat toxic terhadap hama kapas.

Cengkeh (*syzygium aromaticum*) adalah salah satu jenis rempah-rempah yang sangat berharga dan telah digunakan berabad-abad yang berasal dari Kepulauan Maluku (Indonesia bagian timur). Produksi kuncup bunga merupakan bagian paling komersial dari pohon ini.

Dalam kuncup bunga tersebut, yang kemudian lebih dikenal dengan cengkeh, terdapat antioksidan dan antimikroba yang kuat dan lebih menonjol dibandingkan dengan rempah-rempah lainnya. Sehingga, dalam sebuah penelitian ditemukan bahwa aktivitas antimikroba cengkeh terbukti mampu melawan beberapa strain bakteri maupun jamur dan bisa menjadi salah satu cara untuk preservasi buku maupun arsip.

Meracik Rempah Untuk Preservasi Buku, Arsip, Batik Tulis dan Pakaian

Karena penulis tinggal di kota Solo, Pasar Gedhe Hardjonagoro menjadi tujuan utama. Salah satu pasar tradisional di kota Solo

yang besar, lengkap dengan kualitas dagangan yang super. Di sana, semua bahan yang dibutuhkan sudah tersedia. Untuk cengkeh, kayu manis dan merica masing-masing Rp. 10.000,-. Sedangkan kayu gaharu seharga Rp. 60.000,-.

Setelahnya, penulis ke Nonongan. Salah satu daerah di kota Solo yang banyak menjual suvenir dan pernik-perniknya. Beberapa kali keluar-masuk toko, akhirnya mendapatkan sesuatu yang dimaksud. Tas kecil untuk tempat racikan seharga Rp. 15.000,- sejumlah 10 pcs.

Sesampainya di rumah, bahan-bahan racikan tersebut dicuci. Untuk menghilangkan kotoran dan debu-debu yang menempel. Setelah kegiatan mencuci selesai, bahan-bahan

dijemur sampai benar-benar kering, termasuk kayu manis dan gaharu yang membutuhkan waktu lebih lama untuk kering. Hal tersebut dilakukan supaya tidak berjamur ketika dimasukkan ke dalam almari ataupun box arsip.

Setelah dipastikan bahwa semua bahan racikan kering, saatnya memilah-milah. Karena tas yang dibeli berjumlah sepuluh (10), maka bahan racikan tadi dibagi sepuluh (10) bagian. Untuk ukuran pembagian atau ukuran beratnya, tidak ada patokan baku. Hanya perkiraan saja. Mungkin merica yang lebih banyak, cengkeh, kayu manis atau bahkan gaharunya. Semua disesuaikan dengan selera masing-masing. Dan tidak menunggu waktu



Gambar 2. Hasil racikan rempah yang sudah dimasukkan dalam tas kantong (foto pribadi)

lama, bahan racikan alami sudah siap ditempatkan di dalam almari untuk menemani jarik-jarik atau batik tulis yang mempunyai nilai seni tinggi dan sejarah yang luar biasa. Selain itu, juga bisa dipakai untuk pemeliharaan pakaian yang kita kenakan sehari-hari maupun buku-buku dan arsip-arsip. Almari, rak buku dan box arsip menjadi harum dengan aroma rempah yang khas dan aman dari ngengat, kutu buku maupun mikroorganisme lain yang merusaknya.

Penutup

Indonesia adalah negeri yang kaya raya. Gemah ripah loh jinawi, tanah yang subur dan kaya akan hasil bumi. Setiap jengkal tanahnya bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk manusia. Baik yang bisa dikonsumsi secara langsung maupun melalui proses manual atau pabrik.

Penggunaan kamfer atau kapur barus merupakan metode tradisional dalam preservasi material buku, arsip, batik tulis maupun pakaian. Namun, tidak ada salahnya sebagai arsiparis untuk berinovasi dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dalam mengelola arsip.

Tanpa preservasi atau pemeliharaan yang tepat, pengelolaan arsip menjadi tidak efektif karena informasi yang terkandung di dalamnya akan rusak atau hilang sebelum waktunya.

Referensi

- Santoso, E., Agustini, L., Sitepu, I. R., & Turjaman, M. (2007). Efektivitas pembentukan gaharu dan komposisi senyawa resin gaharu pada *Aquilaria spp.* *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*.
- SMP Negeri 12 Surakarta. (2026). *Merica*. <https://smpn12ska.sch.id/adiwiyata-merica/>
- Alodokter. (2025). *Bahaya kapur barus, ini yang perlu diketahui*. <https://www.alodokter.com/>
- Riyadi, S. (2023). Kajian Arsip Seri 10: *Kamper untuk preservasi material arsip, amankah?* Jaringan Informasi Kearsipan Nasional. <https://jikn.go.id/>
- Salvador, M. J. (2014). *Clove (Syzygium aromaticum): A precious spice*. National Center for Biotechnology Information. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/>
- Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta. (2024, September). *Kayu manis*. <https://fkk.umj.ac.id/>
- International Council on Archives. (2023–2025). *Records in Contexts*. <https://www.ica.org/ica-network/expert-groups/egad/records-in-contexts-ric>

Komunikasi Organisasi dalam Pengelolaan Kearsipan Modern



Wahyu Adi Setyo Wibowo
Arsiparis
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam sistem administrasi organisasi, termasuk dalam pengelolaan arsip. Arsip tidak lagi dipandang sekadar kumpulan dokumen administratif, tetapi telah menjadi sumber informasi strategis, alat bukti hukum, memori organisasi, serta instrumen akuntabilitas publik. Dalam organisasi pemerintahan, pengelolaan arsip yang baik menjadi salah satu indikator tata kelola birokrasi yang profesional dan transparan. Namun, keberhasilan pengelolaan arsip tidak hanya bergantung pada teknologi atau regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi menjadi sarana utama dalam

menyampaikan kebijakan, membangun koordinasi kerja, menciptakan kepatuhan administrasi, dan membentuk budaya tertib arsip di lingkungan organisasi.

Dalam praktik birokrasi, berbagai persoalan kearsipan masih sering ditemukan, seperti kesalahan klasifikasi arsip, keterlambatan penyampaian dokumen, arsip yang tidak terdokumentasi dengan baik, hingga rendahnya kesadaran pegawai terhadap pentingnya arsip. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan arsip pada hakikatnya merupakan bagian dari sistem komunikasi organisasi. Gerald M. Goldhaber dalam bukunya *Organizational Communication* menjelaskan bahwa komunikasi organisasi merupakan proses menciptakan dan bertukar pesan dalam jaringan hubungan yang saling bergantung guna menghadapi ketidakpastian lingkungan organisasi. Definisi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi memiliki peran sentral dalam menjaga efektivitas organisasi. Dalam konteks kearsipan, komunikasi organisasi membantu memastikan bahwa seluruh pegawai memahami prosedur, regulasi, dan tanggung jawab pengelolaan arsip secara konsisten. Oleh karena itu, komunikasi organisasi menjadi faktor penting dalam mendukung pengelolaan arsip yang efektif dan modern.

Konsep Komunikasi Organisasi

Komunikasi organisasi adalah proses

pertukaran pesan yang berlangsung dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Komunikasi ini melibatkan hubungan antara pimpinan, pegawai, dan unit kerja dalam menjalankan fungsi organisasi. Menurut Arni Muhammad, komunikasi organisasi merupakan pengiriman dan penerimaan pesan dalam organisasi formal maupun informal. Sementara itu, Onong Uchjana Effendy menjelaskan bahwa komunikasi organisasi adalah proses penyampaian informasi dalam struktur organisasi guna menciptakan koordinasi dan efektivitas kerja.

Dalam organisasi modern, komunikasi tidak hanya berlangsung secara satu arah dari pimpinan kepada bawahan, tetapi juga bersifat dua arah dan partisipatif. Pegawai memiliki kesempatan memberikan umpan balik, menyampaikan kendala, dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Komunikasi organisasi memiliki beberapa fungsi utama, yaitu fungsi informatif, fungsi regulative, fungsi persuasive, dan fungsi integratif. Keempat fungsi tersebut sangat relevan dalam pengelolaan arsip organisasi.

Arsip sebagai Media Komunikasi Organisasi

Arsip pada dasarnya merupakan bentuk komunikasi organisasi yang terdokumentasi. Surat dinas, nota dinas, memorandum, laporan, email, dan dokumen elektronik adalah hasil aktivitas komunikasi administratif organisasi. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

menyebutkan bahwa arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, perusahaan, maupun organisasi lainnya. Dalam organisasi pemerintahan, arsip memiliki fungsi penting sebagai sumber informasi, alat bukti hukum, memori organisasi, bahan pengambilan keputusan, dan instrumen akuntabilitas publik.

Melalui arsip, organisasi dapat menelusuri kembali proses administrasi dan kebijakan yang pernah dilakukan. Oleh karena itu, pengelolaan arsip yang baik mencerminkan kualitas komunikasi organisasi yang baik pula. Penelitian Avilanti dkk. mengenai komunikasi organisasi dalam pengelolaan arsip di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sikka menunjukkan bahwa komunikasi antarpegawai sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan arsip statis. Kurangnya sosialisasi dan pemahaman pegawai menjadi salah satu hambatan utama dalam pengelolaan arsip.

Fungsi Komunikasi Organisasi dalam Kearsipan

1. Fungsi Informatif

Komunikasi organisasi berfungsi menyampaikan informasi mengenai regulasi, kebijakan, dan prosedur pengelolaan arsip kepada seluruh pegawai. Sosialisasi tata naskah dinas,

klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, dan penggunaan aplikasi arsip elektronik merupakan bentuk komunikasi informatif. Tanpa komunikasi yang jelas, pegawai akan mengalami kesalahan dalam pengelolaan arsip sehingga menimbulkan ketidaktertiban administrasi.

2. Fungsi Regulatif

Komunikasi organisasi juga berfungsi sebagai alat pengendalian organisasi. Instruksi pimpinan mengenai pengelolaan arsip, penerapan standar operasional prosedur, dan pengawasan administrasi merupakan bentuk komunikasi regulatif. Dalam birokrasi pemerintahan, komunikasi regulatif biasanya diwujudkan melalui surat edaran, nota dinas, pedoman kerja, dan kebijakan internal organisasi.

3. Fungsi Persuasif

Perubahan menuju sistem arsip elektronik sering menimbulkan resistensi pegawai. Oleh karena itu, komunikasi persuasif diperlukan agar pegawai memahami manfaat transformasi digital. Pimpinan perlu membangun komunikasi yang mampu meningkatkan kesadaran pegawai bahwa pengelolaan arsip merupakan bagian penting dari akuntabilitas organisasi.

4. Fungsi Integratif

Komunikasi organisasi membantu menciptakan koordinasi antarunit kerja dalam pengelolaan arsip. Setiap unit kerja memiliki keterkaitan dalam penciptaan dan penggunaan arsip sehingga

dibutuhkan komunikasi yang terintegrasi agar alur informasi dapat berjalan dengan baik.

Pola Komunikasi dalam Organisasi Kearsipan

1. Komunikasi Vertikal

Komunikasi vertikal berlangsung antara pimpinan dan bawahan. Dalam pengelolaan arsip, komunikasi vertikal terlihat dalam penyampaian kebijakan, instruksi kerja, evaluasi kinerja, dan laporan pengelolaan arsip. Pimpinan memiliki peran penting dalam membangun budaya tertib arsip melalui komunikasi yang konsisten.

2. Komunikasi Horizontal

Komunikasi horizontal terjadi antarpegawai atau antarunit kerja yang memiliki kedudukan setara. Komunikasi ini penting dalam koordinasi pemberkasan, peminjaman arsip, sinkronisasi data, dan penggunaan aplikasi arsip elektronik.

3. Komunikasi Diagonal

Komunikasi diagonal berlangsung lintas unit dan lintas jenjang organisasi. Dalam sistem digital, komunikasi diagonal semakin berkembang karena teknologi memungkinkan pertukaran informasi secara langsung antarunit kerja.

4. Transformasi Digital Kearsipan

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan sistem arsip konvensional menjadi arsip elektronik. Pemerintah Indonesia melalui kebijakan

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terus mendorong digitalisasi administrasi pemerintahan, termasuk tata naskah dinas dan arsip digital. Transformasi digital memberikan berbagai manfaat, seperti:

- a. mempercepat proses administrasi,
- b. mempermudah pencarian arsip,
- c. meningkatkan efisiensi kerja,
- d. mengurangi penggunaan kertas,
- e. memperkuat transparansi organisasi.

Namun demikian, transformasi digital juga menghadirkan berbagai tantangan, antara lain rendahnya literasi digital pegawai, resistensi terhadap perubahan, kurangnya pelatihan, serta hambatan koordinasi organisasi. Dalam situasi tersebut, komunikasi organisasi menjadi alat penting dalam manajemen perubahan. Organisasi perlu membangun komunikasi yang terbuka dan edukatif agar pegawai dapat menerima perubahan sistem kerja.

Budaya Organisasi dan Kepatuhan Arsip

Budaya organisasi merupakan sistem nilai, norma, dan kebiasaan yang berkembang dalam organisasi. Menurut Edgar H. Schein, budaya organisasi terbentuk melalui nilai dan asumsi dasar yang dipelajari anggota organisasi dalam menghadapi berbagai persoalan organisasi.

Dalam konteks kearsipan, budaya organisasi sangat memengaruhi tingkat kepatuhan pegawai terhadap pengelolaan

arsip. Organisasi yang memiliki budaya tertib administrasi cenderung memiliki sistem arsip yang lebih baik. Sebaliknya, budaya kerja yang tidak disiplin sering menyebabkan arsip hilang, dokumen tidak terdokumentasi, dan lemahnya akuntabilitas organisasi. Budaya tertib arsip harus dibangun melalui komunikasi organisasi yang berkelanjutan. Pimpinan perlu menanamkan nilai bahwa arsip merupakan aset informasi organisasi yang memiliki nilai strategis.

Kepemimpinan dalam Komunikasi Kearsipan

Kepemimpinan memiliki pengaruh besar terhadap efektivitas komunikasi organisasi. Pemimpin yang komunikatif akan lebih mudah membangun koordinasi kerja, meningkatkan motivasi pegawai, dan menciptakan kepatuhan terhadap kebijakan organisasi. Dalam pengelolaan arsip, pemimpin berperan sebagai:

1. pembuat kebijakan,
2. komunikator organisasi,
3. agen perubahan digital,
4. pengawas administrasi,
5. teladan budaya tertib arsip.

Kepemimpinan yang lemah dalam komunikasi sering menyebabkan kebijakan organisasi tidak dipahami secara optimal oleh pegawai. Sebaliknya, pemimpin yang mampu membangun komunikasi efektif akan menciptakan organisasi yang lebih adaptif terhadap perubahan teknologi dan regulasi.

Hambatan Komunikasi dalam Pengelolaan Arsip

Beberapa hambatan komunikasi yang sering muncul dalam pengelolaan arsip antara lain:

1. Hambatan Semantik
Perbedaan pemahaman istilah kearsipan menyebabkan kesalahan interpretasi. Sebagian pegawai masih belum memahami konsep arsip aktif, inaktif, maupun jadwal retensi arsip.
2. Hambatan Struktural
Birokrasi yang terlalu panjang menyebabkan informasi terkait kebijakan arsip terlambat diterima pegawai.
3. Hambatan Teknologi
Tidak semua pegawai memiliki kemampuan menggunakan aplikasi arsip elektronik.
4. Hambatan Budaya
Budaya kerja yang tidak tertib administrasi menjadi penghambat utama pengelolaan arsip.
5. Hambatan Psikologis
Sebagian pegawai menganggap pengelolaan arsip sebagai pekerjaan tambahan sehingga kurang memiliki motivasi.

Strategi Penguatan Komunikasi Organisasi dalam Kearsipan

Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan arsip, organisasi perlu menerapkan beberapa strategi berikut:

1. Sosialisasi Berkelanjutan
Organisasi harus rutin melakukan sosialisasi mengenai regulasi dan prosedur pengelolaan arsip.
2. Pelatihan Literasi Digital
Pegawai perlu diberikan pelatihan penggunaan aplikasi arsip elektronik dan tata naskah dinas digital.
3. Penguatan Peran Arsiparis
Arsiparis tidak hanya berfungsi sebagai pengelola dokumen, tetapi juga sebagai komunikator organisasi dalam bidang kearsipan.
4. Pengembangan Budaya Tertib Arsip
Budaya tertib arsip dapat dibangun melalui kampanye internal, *reward system*, dan keteladanan pimpinan.
5. Penguatan Koordinasi Antarunit Kerja
Komunikasi lintas unit harus diperkuat agar pengelolaan arsip berjalan lebih terintegrasi.

Komunikasi organisasi memiliki hubungan yang sangat erat dengan pengelolaan kearsipan modern. Arsip pada hakikatnya merupakan bentuk komunikasi administratif yang terdokumentasi dan menjadi bagian penting dari sistem informasi organisasi. Keberhasilan pengelolaan arsip dipengaruhi oleh kualitas komunikasi organisasi, kepemimpinan, budaya kerja, dan kesiapan teknologi informasi. Dalam era transformasi digital, organisasi membutuhkan komunikasi yang adaptif agar implementasi

arsip elektronik dapat berjalan efektif. Komunikasi organisasi berfungsi sebagai sarana informatif, regulatif, persuasif, dan integratif dalam tata kelola arsip. Melalui komunikasi yang efektif, organisasi dapat meningkatkan kepatuhan pengelolaan arsip, memperkuat koordinasi kerja, dan membangun budaya tertib administrasi. Oleh karena itu, penguatan komunikasi organisasi harus menjadi bagian penting dalam kebijakan kearsipan modern guna mendukung reformasi birokrasi dan transformasi digital pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsip Nasional Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip Elektronik*. Jakarta: ANRI.
- Arsip Nasional Republik Indonesia. (2022). *Pedoman pengelolaan arsip dinamis*. Jakarta: ANRI.
- Avilanti, dkk. (sesuaikan tahun terbit). Komunikasi organisasi dalam pengelolaan arsip statis pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sikka. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 4(3), 2139–2145. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v4i3.859>
- Effendy, Onong Uchjana. (2019). *Ilmu komunikasi: Teori dan praktik*. Remaja Rosdakarya.
- Goldhaber, Gerald M. (2017). *Organizational communication* (12th ed.). McGraw-Hill Education.
- Miller, Katherine. (2022). *Organizational communication: Approaches and processes* (8th ed.). Cengage Learning.
- Muhammad, Arni. (2015). *Komunikasi Organisasi*. Bumi Aksara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012. (2012). *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. (2018). *Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Robbins, Stephen P., & Judge, Timothy A. (2022). *Organizational behavior* (19th ed.). Pearson.
- Schein, Edgar H., & Schein, Peter A. (2017). *Organizational culture and leadership* (5th ed.). Wiley.
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. (2009). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- West, Richard, & Turner, Lynn H. (2021). *Introducing communication theory: Analysis and application* (7th ed.). McGraw-Hill.

Semarang, Rob, dan Arsip Tata Kota yang Belum Selesai Dibaca



Ken Fitria Indrawardani & Dhatu Kamajati
Badan Riset dan Inovasi Nasional

Semarang tumbuh di antara air, bukan di luar air. Karena itu, ketika tanah perlahan turun dan rob terus datang, pertanyaannya bukan hanya mengapa air masuk, melainkan mengapa kota ini seperti kehilangan ingatan tentang cara hidupnya sendiri. Arsip-arsip kota—peta, foto, gambar teknis, laporan pemerintahan, dan jejak revitalisasi kawasan lama—memperlihatkan bahwa Semarang pernah dibangun dengan cara yang sangat sadar terhadap posisi pesisirnya. Masalahnya, pengetahuan itu kini lebih sering disimpan daripada dibaca sebagai bahan untuk menimbang dan merencanakan pembangunan di masa depan.

Dalam berbagai diskusi dan kajian, rob biasanya dijelaskan sebagai masalah teknis: soal pompa, drainase, penurunan muka tanah, kenaikan muka laut, atau curah hujan. Penelitian tentang Semarang menunjukkan bahwa subsidensi tanah, perubahan garis pantai, dan banjir pasang adalah persoalan yang serius serta berulang (Abidin et al., 2013; Marfaei et al., 2008). Namun apabila pembicaraan berhenti hanya pada ukuran saluran dan kapasitas pompa, kita kehilangan satu lapisan lain yang tidak kalah penting: yaitu bagaimana kota membaca dirinya sendiri melalui ingatan ruang yang telah lama tersimpan di dalam arsip.

Di sinilah arsip perlu dipahami bukan sebagai tumpukan dokumen tua, tetapi sebagai perangkat pengetahuan. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menempatkan arsip sebagai memori kolektif, identitas, dan bahan pertanggungjawaban kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Republik Indonesia, 2009). Dengan pengertian ini, arsip tidak cukup diperlakukan sebagai benda simpanan. Ia perlu dibaca, disandingkan, dan diperdebatkan kembali agar dapat membantu masyarakat memahami bagaimana keputusan-keputusan ruang pernah dibuat dan bagaimana konsekuensinya masih terasa sampai hari ini.

Semarang memberi contoh yang kuat karena kota ini sejak lama berada di simpang

antara daratan, laut, sungai, perdagangan, dan kekuasaan kolonial. Jejak itu tampak dalam peta, gambar teknik, arsip perusahaan trem, foto kota, hingga laporan pemerintahan kolonial. Nationaal Archief di Den Haag, misalnya, menyimpan banyak arsip periode kolonial Hindia Belanda, termasuk koleksi peta dan gambar yang sangat besar, lembaga ini menyebut koleksi peta dan gambarnya berjumlah sekitar 300.000 objek yang meliputi berbagai periode dan wilayah (Nationaal Archief, n.d.-a, n.d.-b). Bagi Semarang, keberadaan koleksi seperti ini penting karena peta lama dapat memperlihatkan logika kota: di mana pusat permukiman diletakkan, bagaimana pelabuhan dibayangkan, ke mana jalur transportasi diarahkan, dan bagian mana dari kota yang sejak awal berhubungan erat dengan air.

Salah satu contoh awal adalah Kaart van Semarang karya Meyndert de Roy tahun 1695 yang tercatat dalam koleksi Nationaal Archief, dengan judul katalog Samarangs situatie (Atlas of Mutual Heritage, n.d.). Peta semacam ini tidak hanya berguna sebagai gambar masa lalu, tetapi juga sebagai pintu masuk untuk membaca perubahan garis pantai, letak permukiman, benteng, dan orientasi kota terhadap laut. Ketika peta tua dibaca berdampingan dengan kondisi rob masa kini, kita dapat melihat bahwa Semarang bukan sekadar kota yang kebetulan terkena air; ia adalah kota pesisir yang sejak awal terbentuk melalui negosiasi panjang dengan sedimentasi, sungai, perdagangan, dan reklamasi alami maupun buatan.

Sumber Belanda lain yang lebih mudah diverifikasi dapat ditelusuri melalui Atlas of Mutual Heritage dan Rijksmuseum. Atlas of Mutual Heritage memuat metadata peta Semarang tahun 1695, termasuk keterangan bahwa peta itu berjudul Samarangs Situatie, dibuat oleh Meyndert de Roy, bernomor VEL1257, dan dimiliki oleh Nationaal Archief (Atlas of Mutual Heritage, n.d.). Sementara itu, Rijksmuseum menyimpan Album van Spoorwegen in Nederlandsch-Indië, foto album tahun 1865-1868 yang mendokumentasikan pembangunan jalur kereta Semarang-Kedungjati sebagai bagian dari jalur tua Semarang menuju Vorstenlanden (Rijksmuseum, n.d.).

Dokumentasi visual pembangunan jalur kereta Semarang-Kedungjati dalam koleksi Rijksmuseum memperlihatkan sisi lain Semarang: kota ini tidak berdiri sendiri, melainkan bekerja sebagai pintu keluar dan masuk bagi wilayah pedalaman Jawa (Rijksmuseum, n.d.). Jalur kereta dan trem tidak hanya mengangkut orang, tetapi juga membentuk arah pertumbuhan ruang. Dalam konteks sejarah perkotaan, jaringan semacam ini penting karena membuat kawasan pelabuhan, gudang, stasiun, pasar, dan permukiman pekerja saling berkaitan. Dengan kata lain, arsip transportasi bukan sekadar arsip mobilitas, tetapi juga arsip pembentukan struktur sosial dan ekologis kota masa kolonial.

Nationaal Archief juga menyimpan inventaris arsip perusahaan transportasi seperti Semarang-Cheribon Stoomtram Maatschappij



Gambar 1. Kota Semarang Tahun 1901

dan Semarang-Joana Stoomtram Maatschappij. Inventaris tersebut menunjukkan adanya dokumen administrasi, rencana pembangunan, perluasan jalur, konsesi, stasiun, dan berbagai korespondensi perusahaan transportasi kolonial di Jawa (Nationaal Archief, 1973, 1974). Bagi sejarah Kota Semarang, arsip perusahaan trem dapat menjadi sumber penting untuk memahami bagaimana kota kolonial menghubungkan pelabuhan, kawasan niaga, dan daerah belakangnya. Rangkaian ini berguna untuk melihat mengapa kawasan

bawah Semarang menjadi ruang ekonomi yang padat sekaligus rentan, sebab intensifikasi transportasi dan perdagangan seringkali berjalan bersama perubahan tata air dan tekanan terhadap lahan rendah.

Lalu, pada akhirnya Arsip Belanda tidak harus dibaca sebagai kebenaran tunggal. Justru karena ia lahir dalam konteks kolonial, arsip tersebut perlu dibaca secara kritis. Peta kolonial sering dibuat untuk kepentingan administrasi, kontrol, perpajakan, militer, perdagangan, atau eksploitasi. Namun, di dalam bias itulah

tersimpan informasi material yang berharga: nama kampung, garis kanal, jalur jalan, lokasi gudang, arah rel, batas administratif, dan rencana pelabuhan. Pembacaan kritis atas arsip berarti tidak memuja cara pandang kolonial, tetapi memanfaatkan jejak teknisnya untuk memahami bagaimana ruang Semarang diproduksi dan bagaimana warisan keputusan masa lalu masih mempengaruhi kerentanan kota hari Semarang sampai saat ini. Dalam sejarah kebijakan tata ruang Semarang, perencanaan kota sudah mulai dirumuskan sejak masa pra-kemerdekaan melalui Semarang City Master Plan (RIK) 1931–1933 oleh Thomas Karsten. Namun, perencanaan tersebut lebih menekankan pembagian ruang kota berdasarkan kelas ekonomi dan penyesuaian dengan kondisi topografi, bukan secara khusus pada pengendalian banjir atau rob (Kurniawan & Suharini, 2021, p. 188).

Arsip tata kelola Kota Semarang penting sebagai sarana untuk memahami bahwa banjir dan rob bukan hanya persoalan lingkungan masa kini, tetapi juga bagian dari sejarah panjang pengelolaan kota. Sejak masa kolonial, pemerintah telah membangun infrastruktur pengendali air seperti Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur, serta mulai merumuskan perencanaan ruang melalui RIK Semarang 1931–1933. Catatan kebijakan tersebut menunjukkan bahwa persoalan air, ruang, dan pembangunan kota sudah lama menjadi bagian dari agenda tata kelola Semarang (Kurniawan & Suharini, 2021, pp. 187–188).

Pada masa Reformasi, kebijakan

penanganan banjir dan rob semakin terlihat melalui regulasi kebencanaan, rencana induk drainase, pembangunan kolam retensi, stasiun pompa, tanggul pantai, polder, waduk, serta normalisasi kanal. Namun, berbagai upaya itu belum sepenuhnya menghentikan ancaman banjir. Oleh karena itu, arsip kebijakan dari masa kolonial hingga Reformasi dapat digunakan untuk menilai kesinambungan masalah, perubahan strategi pemerintah, dan keterbatasan paradigma pembangunan Kota Semarang (Kurniawan & Suharini, 2021, pp. 190–192).

Dalam kajian kota Indonesia, Colombijn (2010) menunjukkan bahwa ruang kota tidak pernah netral; ia selalu dibentuk oleh adanya upaya tarik-menarik kekuasaan, kebijakan, pasar, dan praktik sosial sehari-hari. Nas (2002) juga mengingatkan bahwa kota Indonesia perlu dibaca sebagai hasil perjumpaan antara lapisan lokal, kolonial, dan modern. Semarang, dalam pengertian itu, bukan hanya Kota Lama sebagai kawasan heritage, melainkan arsip terbuka tentang perubahan hubungan antara manusia, air, dan infrastruktur. Jika Kota Lama kini mengalami persoalan genangan, maka persoalan itu tidak dapat dilepaskan dari riwayatnya sebagai kawasan rendah yang sejak lama dihubungkan dengan pelabuhan, kanal, gudang, dan perdagangan.

Penelitian kontemporer tentang rob memperkuat urgensi pembacaan historis ini. Marfai et al. (2008) memperlihatkan bahwa banjir rob di kawasan pesisir Semarang berdampak langsung pada rumah tangga,

kapasitas adaptasi komunitas, dan respons pemerintah. Harwitasari dan van Ast (2011) menunjukkan bahwa warga yang hidup di wilayah rawan banjir tidak selalu memilih pindah, bahkan ketika banjir menjadi bagian rutin kehidupan sehari-hari. Temuan ini penting karena mengingatkan bahwa persoalan rob bukan hanya soal air yang masuk, tetapi juga soal keterkaitan penduduk dengan rumah, pekerjaan, jaringan sosial, dan memori tempat. Arsip kota dapat membantu memperlihatkan sejak kapan keterikatan itu terbentuk dan bagaimana kebijakan ruang memperkuat atau melemahkannya.

Studi tentang sistem polder di Kota Lama Semarang juga menunjukkan bahwa kawasan ini membutuhkan tata kelola air yang bersifat non-gravitasi, dengan komponen seperti kolam retensi, saluran primer, rumah pompa, saluran pembuang, dan tanggul (Putriana et al., 2012). Solusi teknis seperti ini penting, tetapi ia akan lebih kuat apabila dilengkapi pembacaan sejarah ruang. Peta lama dapat menunjukkan pola saluran, rawa, garis pantai, dan kawasan rendah; laporan kolonial dapat menunjukkan bagaimana pemerintah kota pernah menata jalan, drainase, permukiman, dan pelabuhan; sedangkan foto arsip dapat memperlihatkan bentuk permukiman serta relasi bangunan dengan muka tanah. Dengan demikian, arsip dapat menjadi lapisan verifikasi bagi perencanaan teknis.

Misalnya, *Gedenkboek van de Koloniale Tentoonstelling Semarang*, 20 Agustus-22

November 1914 memperlihatkan bagaimana Semarang pada awal abad ke-20 dipresentasikan sebagai ruang pamer kemajuan kolonial, perdagangan, dan modernitas Hindia Belanda (van Heel, 1916). Tentu, sumber seperti ini perlu dibaca hati-hati karena berisi sudut pandang kolonial yang cenderung menonjolkan prestasi administrasi dan ekonomi. Namun justru dari bahasa simbolis promosi itulah kita dapat melihat bagaimana kota dipentaskan: sebagai kota pelabuhan, kota perdagangan, kota modern, dan kota yang ingin menunjukkan keteraturan infrastruktur. Pembacaan semacam ini membantu kita memahami imajinasi resmi tentang Semarang pada awal abad ke-20.

Arsip revitalisasi Kota Lama Semarang tahun 1983-2022 yang masuk dalam *Memory of the World Indonesia* memperlihatkan bahwa arsip tidak berhenti pada masa kolonial.

Ia berlanjut dalam foto, dokumen desain, serta catatan konservasi kawasan (Arsip Revitalisasi Situs Kota Lama Semarang Tahun 1983-2022, 2024). Di sini ada jembatan antara arsip lama dan arsip baru. Arsip Belanda memberi lapisan pembentukan kawasan, sedangkan arsip revitalisasi menunjukkan cara generasi kemudian menafsirkan kembali kawasan itu sebagai warisan. Pertanyaannya, apakah tafsir heritage tersebut sudah cukup terhubung dengan persoalan rob dan risiko ekologis? Atau heritage masih lebih sering dibaca sebagai wajah bangunan, bukan sebagai sejarah hubungan kawasan dengan air?

Pertanyaan itu penting karena kota



Gambar 2. Peta Semarang abad ke-17 memperlihatkan orientasi awal kota terhadap laut dan kawasan pesisir

pesisir seperti Semarang tidak bisa dibangun hanya dengan logika jangka pendek. Perencanaan yang hanya berfokus pada respons teknis sesaat akan selalu tertinggal dari persoalan yang datang berulang. Arsip memberi sesuatu yang tidak dimiliki respons teknis sesaat: kontinuitas pengetahuan. Dari arsip, kita dapat membaca pola perubahan garis pantai, fungsi ruang, sistem transportasi, lokasi permukiman, dan jejak keputusan yang pernah diambil. Arsip, dengan demikian, bukan nostalgia. Ia adalah alat untuk menilai apakah pembangunan hari ini sejalan dengan karakter ekologis kota atau justru mengabaikannya.

Pemerintah daerah telah memiliki perangkat tata ruang, antara lain Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang 2011-2031 (Pemerintah Kota Semarang, 2011). Namun perangkat kebijakan masa kini perlu terus diperkaya oleh pembacaan historis. Dokumen tata ruang seharusnya tidak hanya dibandingkan dengan data hidrologi terbaru, tetapi juga dengan peta

dan arsip lama. Perbandingan itu dapat membantu mengidentifikasi kawasan yang sejak lama berfungsi sebagai ruang air, ruang rawa, atau ruang transisi pesisir. Dengan cara ini, arsip menjadi bagian dari mitigasi risiko, bukan sekadar lampiran sejarah.

Karena itu, membaca kembali arsip tata kota Semarang seharusnya tidak dipahami sebagai gerakan romantik untuk kembali ke masa lalu. Tidak semua rancangan lama harus dipuji, dan tidak semua warisan historis otomatis cocok diterapkan hari ini. Yang penting justru kemampuan untuk belajar dari logika yang pernah bekerja: bagaimana kota pernah merespons air, mengatur ruang, dan menghubungkan fungsi kawasan dengan kondisi lingkungannya. Tanpa itu, perencanaan kota berisiko terputus dari ingatan jangka panjangnya sendiri.

Di sinilah komunitas kearsipan, perencana kota, akademisi, dan pemerintah daerah memiliki titik temu. Arsip Belanda dapat ditelusuri melalui sumber seperti Nationaal Archief, Atlas of Mutual Heritage,

Rijksmuseum, dan katalog perpustakaan nasional; arsip nasional dan arsip daerah dapat menutup celah masa pascakolonial; sedangkan penelitian ilmiah dapat menguji temuan arsip dengan data kontemporer tentang subsidensi, rob, dan adaptasi masyarakat. Peta historis dapat dibaca bersama citra satelit. Foto lama dapat dibandingkan dengan tinggi muka tanah hari ini. Inventaris trem dan pelabuhan dapat dipertemukan dengan sejarah kawasan ekonomi dan jalur logistik. Dengan cara itu, arsip tidak lagi berhenti sebagai memori yang disimpan, tetapi berubah menjadi kompas yang menuntun pembangunan.

Pada akhirnya, persoalan Semarang bukan hanya bahwa air terus datang. Persoalannya adalah apakah kota ini cukup jujur untuk membaca kembali pengetahuan yang sudah lama dimilikinya. Arsip mengingatkan bahwa kota selalu punya sejarah cara hidupnya sendiri. Bagi Semarang, sejarah itu tersimpan dalam peta Belanda, laporan kota, foto pelabuhan, catatan trem, dokumen revitalisasi, dan pengalaman warga yang terus beradaptasi dengan rob. Seperti semua sejarah yang penting, ia tidak seharusnya hanya disimpan. Ia perlu dibaca, diperdebatkan, dan dipakai untuk merancang masa depan yang lebih waspada, lebih adil, dan lebih bertanggung jawab terhadap kondisi ekologis kota.

Daftar Bacaan dan Referensi

Abidin, H. Z., Andreas, H., Gumilar, I., Sidiq, T. P., & Fukuda, Y. (2013). Land

subsidence in coastal city of Semarang (Indonesia): Characteristics, impacts and causes. *Geomatics, Natural Hazards and Risk*, 4(3), 226-240.
<https://doi.org/10.1080/19475705.2012.692336>

Arsip Nasional Republik Indonesia. (2024). *Arsip revitalisasi situs Kota Lama Semarang tahun 1983–2022* [Koleksi arsip, Kode referensi (24) MKB 2024]. Memory of the World Indonesia. <https://mowid.anri.go.id/index.php/arsip-revitalisasi-situs-kota-lama-semarang-tahun-1983-2022>

Atlas of Mutual Heritage. (n.d.). *Map of Semarang* [Map, VEL1257]. <https://www.atlasofmutualheritage.nl/en/page/4930/map-of-semarang>

Colombijn, F. (2010). *Under construction: The politics of urban space and housing during the decolonization of Indonesia, 1930-1960*. KITLV Press.

Harwitasari, D., & van Ast, J. A. (2011). Climate change adaptation in practice: People's responses to tidal flooding in Semarang, Indonesia. *Journal of Flood Risk Management*, 4(3), 216-233. <https://doi.org/10.1111/j.1753-318X.2011.01104.x>

Kurniawan, E., & Suharini, E. (2021). Flood disaster in Semarang City from colonial to reformasi: A review of its management. *Paramita: Historical Studies Journal*, 31(2), 184–193. <https://doi.org/10.15294/paramita.v31i2.22879>

- Marfai, M. A., King, L., Sartohadi, J., Sudrajat, S., Budiani, S. R., & Yulianto, F. (2008). The impact of tidal flooding on a coastal community in Semarang, Indonesia. *The Environmentalist*, 28(3), 237-248. <https://doi.org/10.1007/s10669-007-9134-4>
- Nas, P. J. M. (Ed.). (2002). *The Indonesian town revisited*. LIT Verlag; Institute of Southeast Asian Studies.
- Nationaal Archief. (n.d.-a). Indonesie, 1602-1962. <https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/zoekhulpen/indonesie-1602-1962>
- Nationaal Archief. (n.d.-b). Kaarten en tekeningen. <https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/kaarten-en-tekeningen>
- Nationaal Archief. (1973). *Inventaris van het archief van de Semarang-Cheribon Stoomtrammaatschappij, (1890) 1895-1946 (1952) (2.20.17)*. <https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.20.17>
- Nationaal Archief. (1974). *Inventaris van het archief van de Semarang-Joana Stoomtrammaatschappij, 1881-1947 (1952) (2.20.18)*. <https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.20.18>
- Pemerintah Kota Semarang. (2011). *Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/274799/perda-kota-semarang-no-14-tahun-2011>
- Putriana, D. A., Ismail, L., Suripin, S., & Parmantoro, P. N. (2012). Perencanaan sistem polder Kota Lama Semarang. *Jurnal Karya Teknik Sipil*, 1(1), 1-10. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkts/article/view/743>
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38788/uu-no-43-tahun-2009>
- Rijksmuseum. (n.d.). Album van Spoorwegen in Nederlandsch-Indie [Photograph album, object no. NG-1991-20]. <https://www.rijksmuseum.nl/en/collection/object/Album-van-Spoorwegen-in-Nederlandsch-Indie--d3f5a439e0dc1e8d8555fa9af5f53b7f>
- van Heel, M. G. (1916). *Gedenkboek van de Koloniale Tentoonstelling Semarang, 20 Augustus - 22 November 1914*. Mercurius. <https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/diakses> pada tanggal 13 April 2026

Apakah Literasi Kearsipan itu Kompetensi atau Kesadaran? *Catatan Konseptual di Perguruan Tinggi*



Primus Sanbein
IPB University

Pendahuluan

Dalam pengelolaan arsip di perguruan tinggi, istilah literasi kearsipan semakin sering digunakan untuk menegaskan pentingnya peran sumber daya manusia dalam menjaga tertib arsip dan akuntabilitas institusi. Literasi kearsipan kerap diposisikan sebagai prasyarat teknis bagi keberhasilan sistem kearsipan, terutama di tengah meningkatnya penggunaan arsip digital dan sistem informasi terintegrasi. Dalam berbagai kebijakan dan program pelatihan, literasi kearsipan umumnya dimaknai sebagai kemampuan mengikuti prosedur, memahami sistem, serta mematuhi standar operasional yang berlaku.

Pemahaman tersebut tidak sepenuhnya keliru, tetapi cenderung menyederhanakan literasi kearsipan sebagai persoalan keterampilan teknis semata. Brien Brothman mengingatkan bahwa arsip tidak pernah netral karena selalu berkaitan dengan cara organisasi membangun bukti dan memelihara ingatan kolektif. Arsip bukan hanya hasil dari prosedur administratif, melainkan juga refleksi dari nilai, prioritas, dan relasi kuasa yang berkembang dalam organisasi. Apa yang diputuskan untuk disimpan, dipelihara, dipindahkan, bahkan dimusnahkan pada dasarnya mencerminkan bagaimana institusi memandang dirinya sendiri.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa arsip tidak dapat dipahami sekadar sebagai kumpulan dokumen administratif. Anne Gilliland dan Sue McKemmish juga menempatkan arsip sebagai praktik sosial yang berkaitan dengan aktivitas manusia, struktur organisasi, dan proses produksi pengetahuan. Di perguruan tinggi, arsip merekam dinamika akademik, perubahan kebijakan kelembagaan, perjalanan penelitian, hingga proses pengambilan keputusan yang membentuk identitas institusi dari waktu ke waktu.

Dalam praktik sehari-hari, tidak jarang ditemukan individu yang secara teknis mampu mengelola arsip, tetapi belum sepenuhnya memahami nilai arsip sebagai memori institusional dan bukti akuntabilitas. Arsip

disimpan karena menjadi kewajiban administratif, bukan karena dipahami maknanya bagi keberlanjutan pengetahuan organisasi. Situasi seperti ini terlihat ketika dokumen penting tersimpan secara digital tetapi sulit ditemukan kembali, ketika pergantian pegawai menyebabkan hilangnya pengetahuan administratif, atau ketika arsip dipandang sekadar sebagai beban penyimpanan yang harus segera dipindahkan atau dimusnahkan.

Perkembangan sistem digital juga memunculkan tantangan baru. David O. Stephens mengingatkan bahwa digitalisasi sering melahirkan asumsi keliru bahwa arsip telah aman hanya karena tersimpan secara elektronik. Padahal, keberadaan sistem digital tidak otomatis menjamin keberlanjutan memori organisasi. Tanpa kesadaran mengenai preservasi jangka panjang, autentisitas arsip, dan pentingnya konteks penciptaan dokumen, digitalisasi justru dapat memperbesar risiko hilangnya jejak institusional.

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa literasi kearsipan tidak cukup dipahami hanya sebagai kemampuan teknis mengelola arsip. Literasi kearsipan juga berkaitan dengan kesadaran mengenai mengapa arsip penting bagi keberlanjutan organisasi. Christine Borgman, Andrea Scharnhorst, dan Milad Golshan menunjukkan bahwa keberlanjutan pengetahuan organisasi sangat bergantung pada kemampuan institusi memelihara data, rekaman, dan infrastruktur pengetahuan dalam

jangka panjang. Tanpa pengelolaan arsip yang baik, organisasi berisiko mengalami fragmentasi memori, terutama di tengah tingginya mobilitas sumber daya manusia dan percepatan transformasi digital.

Atas dasar itu, pertanyaan mengenai apakah literasi kearsipan merupakan kompetensi atau kesadaran menjadi menarik untuk didiskusikan. Pertanyaan ini tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis individu dalam mengelola arsip, tetapi juga menyentuh cara organisasi membangun budaya pengetahuan, menjaga memori institusional, dan memahami arsip sebagai bagian dari tanggung jawab akademik dan administratif.

Literasi Kearsipan sebagai Kompetensi

Pendekatan yang paling umum memandang literasi kearsipan sebagai kompetensi. Dalam kerangka ini, literasi dipahami sebagai seperangkat pengetahuan dan keterampilan yang memungkinkan individu mengelola arsip secara benar dan konsisten. Kompetensi tersebut mencakup pemahaman mengenai klasifikasi arsip, prosedur penciptaan dan penyimpanan, mekanisme temu balik, jadwal retensi arsip, hingga penggunaan sistem arsip digital.

Bagi perguruan tinggi yang memiliki aktivitas administratif dan akademik yang kompleks, kompetensi ini menjadi sangat penting. Arsip berkaitan langsung dengan administrasi akademik, kepegawaian, keuangan, penelitian, akreditasi, hingga tata

kelola kelembagaan. Kesalahan kecil dalam pengelolaan arsip dapat berdampak pada terganggunya layanan administrasi, hilangnya dokumen penting, atau lemahnya akuntabilitas institusi.

Pendekatan berbasis kompetensi relatif mudah diterapkan karena dapat diterjemahkan ke dalam pelatihan, panduan kerja, dan indikator kinerja yang jelas. Banyak perguruan tinggi kemudian memfokuskan peningkatan literasi kearsipan pada kemampuan operasional, seperti penggunaan aplikasi arsip digital, tata cara pemberkasan, atau prosedur penyimpanan dokumen elektronik. Dalam situasi tertentu, pendekatan ini memang diperlukan karena pengelolaan arsip yang buruk sering kali berawal dari lemahnya kemampuan teknis pengelola dokumen.

Namun, pendekatan tersebut sering berhenti pada persoalan teknis. Individu mungkin mampu menjalankan prosedur arsip dengan benar, tetapi belum tentu memahami alasan mengapa arsip tersebut penting bagi keberlanjutan organisasi. Anne Gilliland dan Sue McKemmish menegaskan bahwa arsip tidak hanya dibentuk oleh standar teknis, tetapi juga oleh lingkungan sosial dan kelembagaan tempat arsip digunakan. Ketika kemampuan teknis berdiri sendiri tanpa pemahaman mengenai nilai arsip, arsip cenderung diperlakukan hanya sebagai objek administrasi, bukan sebagai sumber pengetahuan institusional yang memiliki nilai jangka panjang.

Akibatnya, literasi kearsipan sering kali berhenti pada kepatuhan prosedural. Arsip memang tersimpan, tetapi belum tentu dipahami maknanya. Sistem digital digunakan, tetapi belum tentu diiringi kesadaran mengenai pentingnya menjaga autentisitas dan keberlanjutan informasi. Dalam situasi seperti ini, kompetensi memang hadir, tetapi literasi kearsipan belum sepenuhnya berkembang.

Literasi Kearsipan sebagai Kesadaran

Berbeda dengan pendekatan kompetensi, literasi kearsipan sebagai kesadaran menempatkan arsip dalam kerangka reflektif dan etis. Kesadaran kearsipan merujuk pada pemahaman mengenai mengapa arsip penting, bukan sekadar bagaimana arsip dikelola. Arsip bukan hanya dokumen yang disimpan, tetapi bagian dari tanggung jawab institusi dalam menjaga memori, legitimasi, dan akuntabilitas.

Brien Brothman menegaskan bahwa arsip selalu berkaitan dengan persoalan bukti dan klaim kebenaran. Karena itu, setiap keputusan kearsipan pada dasarnya memiliki dimensi etis. Menyimpan, memindahkan, mendigitalisasi, atau bahkan menghapus arsip bukan hanya tindakan administratif, melainkan keputusan yang menentukan apa yang akan tetap diingat dan apa yang berpotensi dilupakan oleh institusi.

Kesadaran seperti ini menjadi semakin penting di perguruan tinggi karena arsip tidak hanya merekam aktivitas administratif, tetapi juga perjalanan intelektual sivitas akademika.

Dokumen penelitian, kebijakan akademik, laporan kegiatan, hingga rekaman keputusan kelembagaan merupakan bagian dari memori organisasi yang menentukan keberlanjutan pengetahuan institusi.

Tanpa kesadaran kearsipan, pengelolaan arsip berisiko terjebak dalam rutinitas administratif yang mekanis. Arsip diperlakukan sekadar sebagai kewajiban kerja atau beban penyimpanan, bukan sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan intelektual institusi terhadap masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dalam jangka panjang, kondisi seperti ini dapat menyebabkan organisasi kehilangan jejak sejarah, melemahnya kontinuitas pengetahuan, serta berulangnya kesalahan administratif yang sebenarnya pernah terjadi sebelumnya.

Ketegangan Kompetensi dan Kesadaran dalam Praktik Perguruan Tinggi

Ketegangan antara kompetensi dan kesadaran kearsipan paling nyata terlihat dalam praktik pengelolaan arsip oleh tenaga nonarsiparis. Di banyak perguruan tinggi, arsip dikelola oleh tenaga administrasi yang memiliki tugas utama di bidang lain. Mereka sering kali telah dibekali pelatihan teknis dan akses terhadap sistem arsip digital, tetapi tidak selalu memiliki pemahaman konseptual mengenai nilai arsip.

Situasi ini semakin kompleks dengan hadirnya sistem arsip digital. David O. Stephens mengingatkan bahwa digitalisasi

sering menciptakan asumsi bahwa arsip telah aman hanya karena tersimpan secara elektronik. Padahal, tanpa kesadaran mengenai preservasi jangka panjang, autentisitas, dan konteks penciptaan arsip, sistem digital justru dapat memperbesar risiko kehilangan memori institusional.

Dalam praktiknya, banyak organisasi mengalami kesulitan bukan karena tidak memiliki sistem arsip, melainkan karena budaya kearsipan belum terbentuk secara kuat. Arsip tersimpan di berbagai perangkat pribadi, penamaan dokumen tidak konsisten, dan proses migrasi data sering dilakukan tanpa standar yang jelas. Ketika pegawai berpindah unit atau pensiun, pengetahuan administratif yang melekat pada individu ikut menghilang karena tidak terdokumentasikan dengan baik.

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa literasi kearsipan sebagai kompetensi dan kesadaran tidak dapat dipisahkan secara tegas. Kompetensi tanpa kesadaran berisiko melahirkan praktik administratif yang mekanis, sedangkan kesadaran tanpa kompetensi akan sulit diwujudkan dalam pengelolaan arsip yang tertib dan berkelanjutan.

Literasi Kearsipan dalam Spektrum Literasi Informasi dan Organisasi

Dalam perkembangan kajian literasi, literasi kearsipan sering dilebur ke dalam literasi informasi atau literasi digital. Padahal, literasi kearsipan memiliki karakter khas

karena menekankan tanggung jawab terhadap penciptaan, pemeliharaan, dan pemaknaan memori organisasi.

Christine Borgman, Andrea Scharnhorst, dan Milad Golshan menunjukkan bahwa keberlanjutan pengetahuan organisasi sangat bergantung pada kemampuan institusi mengelola data dan rekaman dalam jangka panjang. Tanpa pengelolaan arsip yang memadai, organisasi berisiko kehilangan kesinambungan pengetahuan dan mengalami fragmentasi memori. Persoalan ini menunjukkan bahwa arsip tidak hanya berkaitan dengan penyimpanan dokumen, tetapi juga dengan keberlanjutan pengetahuan dan identitas organisasi.

Pemahaman tersebut berkembang lebih jauh melalui pandangan yang menempatkan literasi kearsipan sebagai *organisational capability*. Primus Sanbein memandang bahwa literasi kearsipan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan individu dalam mengelola arsip, tetapi juga mencerminkan kapasitas organisasi dalam membangun budaya, sistem, dan praktik pengelolaan arsip yang berkelanjutan. Perspektif ini menunjukkan bahwa keberhasilan penguatan literasi kearsipan tidak cukup bergantung pada pelatihan teknis semata, tetapi juga pada dukungan kelembagaan, pembelajaran organisasi, dan kesadaran kolektif terhadap pentingnya memori institusional.

Di perguruan tinggi, persoalan ini menjadi semakin penting karena mobilitas

sumber daya manusia berlangsung sangat cepat. Pergantian pimpinan, rotasi pegawai, hingga perubahan sistem digital dapat menyebabkan hilangnya jejak pengetahuan institusional apabila arsip tidak dikelola secara baik. Karena itu, literasi kearsipan juga dapat dipahami sebagai bagian dari literasi institusional, yaitu kesadaran bahwa keputusan kecil dalam pekerjaan sehari-hari memiliki dampak terhadap keberlanjutan memori organisasi.

Menuju Pemahaman Integratif Literasi Kearsipan

Alih-alih mempertentangkan kompetensi dan kesadaran secara biner, literasi kearsipan sebaiknya dipahami sebagai cara pandang yang utuh. Kompetensi teknis menyediakan prasyarat operasional agar arsip dapat dikelola secara benar, sementara kesadaran memberikan kerangka nilai yang menuntun praktik tersebut.

Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Anne Gilliland dan Sue McKemmish yang menempatkan arsip sebagai praktik sosial, sekaligus dengan refleksi Brien Brothman mengenai dimensi etis arsip. Literasi kearsipan tidak cukup dibangun hanya melalui pelatihan teknis, tetapi juga melalui ruang refleksi, dialog lintas peran, dan pembelajaran berbasis pengalaman.

Di perguruan tinggi, penguatan literasi kearsipan memerlukan keterlibatan seluruh aktor institusional, bukan hanya unit kearsipan.

Kesadaran bahwa arsip merupakan bagian dari memori organisasi perlu tumbuh sebagai budaya bersama. Dengan demikian, arsip tidak lagi dipandang sekadar sebagai dokumen administratif, melainkan sebagai sumber pengetahuan yang menjaga keberlanjutan institusi.

Penutup

Menjawab pertanyaan apakah literasi kearsipan merupakan kompetensi atau kesadaran, tulisan ini menegaskan bahwa keduanya merupakan dimensi yang saling melengkapi. Literasi kearsipan yang hanya dipahami sebagai kompetensi teknis berisiko mereduksi arsip menjadi objek administrasi, sementara literasi yang hanya menekankan kesadaran tanpa dukungan kompetensi akan sulit diwujudkan dalam praktik.

Di tengah percepatan transformasi digital dan kompleksitas tata kelola perguruan tinggi, pemahaman integratif mengenai literasi kearsipan menjadi semakin relevan. Literasi kearsipan bukan semata tanggung jawab unit kearsipan, melainkan praktik kolektif yang menuntut keterlibatan, pemahaman, dan kesadaran seluruh aktor institusional. Pada akhirnya, kualitas arsip sebuah perguruan tinggi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan sistem digitalnya, tetapi juga oleh kesadaran manusianya dalam menjaga memori institusi.

Daftar Pustaka

- Borgman, C.L., Scharnhorst, A. and Golshan, M.S. (2019), Digital data archives as knowledge infrastructures: Mediating data sharing and reuse. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 70: 888-904. <https://doi.org/10.1002/asi.24172>
- Brothman, Brien. (2002). Afterglow: Conceptions of record and evidence in archival discourse. *Archival Science* 2, 311 – 342 (2002). <https://doi.org/10.1007/BF02435627>
- Gilliland, A., Mckemmish, S. Building an Infrastructure for Archival Research. *Arch Sci* 4, 149–197 (2004). <https://doi.org/10.1007/s10502-006-6742-6>
- Sanbein, P. Conceptualising archival literacy as an organisational capability. *Arch Sci* 26, 10 (2026). <https://doi.org/10.1007/s10502-026-09531-2>
- Stephens, David. O. (2000). Digital preservation: A global information management problem. *Information Management Journal*, 34(3), 68.

Arsip Seni yang Hidup: Belajar dari Praktik Pengarsipan dan Aktivasi Arsip di IVAA



Dr. Purwanto Putra, M.Hum.
Universitas Lampung

Pengantar

Banyak orang mengira, di tengah derasnya arus digital ini, bahwa arsip hanyalah tumpukan dokumen lama yang disimpan di rak-rak penyimpanan. Padahal, arsip bukan sekadar benda mati yang menunggu dilihat kembali pada masa depan. Arsip adalah memori sosial yang menyimpan jejak pengetahuan, relasi kuasa, dinamika budaya, hingga perubahan cara masyarakat memandang dirinya sendiri. Bahkan jika mengacu Michelle Caswell; Ricardo L. Punzalan (2016) arsip secara diskursif penting untuk menjelaskan (1) keutamaan nilai informasional (sebagai lawan dari nilai bukti dalam arsip); (2) akses universal sebagai

kewajiban profesional dan etis; dan (3) asumsi bahwa lembaga informasi pada umumnya bersifat baik (Caswell & Punzalan, 2016).

Dalam konteks seni rupa Indonesia, persoalan arsip menjadi semakin penting. Banyak peristiwa seni, pameran, diskusi, hingga praktik artistik lahir dan berkembang tanpa dokumentasi yang memadai. Tidak sedikit karya, catatan kuratorial, surat menyurat, hingga foto kegiatan seni hilang begitu saja karena tidak dianggap penting pada zamannya. Akibatnya, sejarah seni Indonesia sering kali berlubang. Banyak nama, peristiwa, dan gagasan tidak tercatat secara utuh. Persoalan tersebut sesungguhnya bukan hanya masalah teknis pengarsipan, melainkan persoalan kesadaran budaya. Jacques Derrida (1995) dalam *Archive Fever* menyebut bahwa arsip selalu berkaitan dengan kekuasaan untuk menentukan apa yang layak diingat dan apa yang dibiarkan hilang (Derrida, 1996). Dalam konteks seni, ketiadaan arsip berarti hilangnya kemungkinan membaca kembali perjalanan kebudayaan secara kritis.

Di Indonesia, salah satu lembaga yang secara konsisten bergerak di bidang pengarsipan seni rupa adalah Indonesian Visual Art Archive (IVAA). Lembaga yang berbasis di Yogyakarta ini menjadi contoh penting bagaimana arsip tidak hanya disimpan, tetapi juga dihidupkan kembali melalui berbagai bentuk aktivasi budaya. IVAA bukan sekadar tempat penyimpanan dokumen seni. Ia

bekerja sebagai ruang ingatan, ruang pembelajaran, sekaligus ruang produksi pengetahuan. Di sinilah arsip dipahami bukan sebagai akhir dari suatu peristiwa, melainkan awal dari percakapan baru. IVAA yang awalnya bernama Yayasan Seni Cemeti telah berdiri pada tahun 1995. Pada tahun 2007, lembaga ini berubah nama menjadi Indonesian Visual Art Archive (IVAA). Kehadirannya tidak dapat dipisahkan dari dinamika seni kontemporer Yogyakarta pada era 1990-an. Beberapa tokoh yang terlibat dalam pendiriannya antara lain Agung Kurniawan, Nindityo Adipurnomo, Mella Jaarsma, Justina Neni, Raihul Pajri, dan Anggi Minarni. Mereka menyadari bahwa pertumbuhan seni rupa Indonesia membutuhkan infrastruktur dokumentasi yang serius.

Berbeda dengan museum yang fokus pada koleksi karya, IVAA lebih menaruh perhatian pada dokumen-dokumen yang mengelilingi praktik seni. Arsip yang dikumpulkan meliputi katalog pameran, kliping media, foto kegiatan, rekaman audiovisual, surat-menyurat, buku referensi, hingga dokumen personal seniman. Dalam wawancara yang dipublikasikan IVAA, Kepala Arsip IVAA, Adwi Rahmanto, menjelaskan bahwa pengarsipan seni bukan semata menyimpan karya, tetapi mendokumentasikan ekosistem seni secara menyeluruh. Menurutnya, bagaimana mungkin pertumbuhan seni dapat dilacak jika tidak ada catatan yang menyertainya (Netivmedia, 2024).

Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Terry Cook (2013) yang menekankan bahwa arsip modern tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan administratif, tetapi menjadi bagian dari konstruksi memori kolektif Masyarakat (Cook et al., 2020). Dalam praktiknya, IVAA mengembangkan pendekatan pengarsipan yang cukup progresif. Mereka tidak hanya mengumpulkan arsip secara pasif, tetapi juga aktif melakukan dokumentasi, penelitian, serta membangun kerja kolaboratif dengan seniman, keluarga seniman, komunitas, dan publik.

Kerja pengarsipan di IVAA juga memperlihatkan perubahan besar dalam pengelolaan media arsip. Koleksi audio visual yang dahulu berbentuk VHS, Video8, MiniDV, dan cakram optik kini mulai dialihmediakan ke format digital. Langkah ini menjadi penting karena banyak media analog memiliki keterbatasan usia simpan. Kita mesti paham, bahwa digitalisasi itu bukan sekadar soal efisiensi akses, tetapi juga strategi preservasi jangka panjang. Sebagaimana Conway (2010) menyebut bahwa preservasi digital merupakan upaya menjaga keberlanjutan akses terhadap informasi di tengah perubahan teknologi yang cepat (Conway, 2010). Dengan berbagai kemajuan teknologi saat ini dapat dimanfaatkan untuk pelestarian budaya yang efektif dan jangka panjang, walaupun dengan tantangan dan dibutuhkan inisiatif lebih untuk pelestarian digital warisan budaya, yang juga termasuk aspek keuangan, teknis, pedoman

kebijakan, aspek hukum, dan masalah metadata (Khan et al., 2018). Saat ini, IVAA menyimpan ratusan ribu arsip dalam berbagai bentuk. Sebagian besar telah dialihmediakan, dengan tetap mempertahankan arsip fisik sebagai bentuk autentisitas dan sumber rujukan primer.

Berangkat dari uraian tersebut, tulisan ini akan membahas bagaimana IVAA membangun praktik pengarsipan seni yang tidak hanya berorientasi pada penyimpanan, tetapi juga pada pemanfaatan dan aktivasi arsip sebagai sumber pengetahuan publik. Pertanyaan yang diajukan adalah: bagaimana IVAA mengelola, melestarikan, dan mengaktifkan arsip seni sehingga tetap relevan bagi masyarakat kontemporer? Selain itu, bagaimana praktik tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi pengelolaan arsip budaya di Indonesia pada era digital? Melalui pembahasan ini, artikel bertujuan mengkaji konsep, strategi, dan praktik pengarsipan yang dikembangkan IVAA, serta menunjukkan peran arsip sebagai memori kolektif yang hidup, dinamis, dan terus menghasilkan makna baru bagi perkembangan seni dan kebudayaan.

Arsip yang Tidak Diam: Aktivasi dan Kesadaran Arsip di Era Digital

Salah satu hal yang kiranya paling menarik dari praktik IVAA adalah cara mereka mengelola dan memasyarakatkan arsip seni. Di banyak tempat, arsip sering dipandang sebagai sesuatu yang serius, kaku, dan hanya relevan

bagi peneliti. IVAA mencoba membalik cara pandang tersebut. Mereka menyadari bahwa tantangan terbesar pengarsipan hari ini bukan hanya menyimpan dokumen, tetapi membuat masyarakat merasa dekat dengan arsip. Karena itu, IVAA mengembangkan berbagai program aktivasi arsip. Arsip tidak hanya dipajang sebagai benda historis, tetapi diolah menjadi pengalaman publik yang kreatif (Conway, 2010).

Pada tahun 2017, misalnya, IVAA menyelenggarakan Festival Arsip. Festival ini menjadi upaya menarik untuk mempertemukan arsip dengan generasi muda melalui pendekatan seni dan budaya populer. Dokumen-dokumen kritik seni lama dibaca ulang, diterjemahkan secara artistik, lalu ditampilkan dalam bentuk instalasi, pertunjukan suara, hingga ruang interaktif. Salah satu contoh menarik adalah penggunaan suara kritik seni yang muncul ketika pengunjung mengaduk cat dalam sebuah instalasi. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa arsip sebenarnya dapat menjadi medium kreatif. Arsip tidak hanya berbicara tentang masa lalu, tetapi juga dapat menghasilkan pengalaman baru pada masa kini.

Dalam perspektif ilmu kearsipan kontemporer, pendekatan seperti ini sering disebut sebagai *archival activation* atau aktivasi arsip. Caswell, Migoni, Geraci, dan Cifor (2017) menjelaskan bahwa arsip perlu dihadirkan kembali ke ruang publik agar masyarakat dapat

membangun hubungan emosional dan kritis terhadap memori kolektif. IVAA juga secara rutin mengadakan diskusi, screening film, residensi, pameran berbasis arsip, hingga pertemuan lintas disiplin seni. Melalui cara ini, arsip tidak lagi berada di ruang tertutup, tetapi menjadi bagian dari kehidupan sosial budaya sehari-hari. Di sinilah letak pentingnya pengarsipan seni. Arsip bukan sekadar benda dokumenter, tetapi sumber produksi pengetahuan.

Perkembangan media sosial membawa perubahan besar terhadap cara masyarakat mendokumentasikan kehidupannya. Hari ini hampir semua orang menyimpan foto, video, dan rekaman aktivitas di Instagram, WhatsApp, TikTok, atau penyimpanan digital pribadi. Namun, banyak dokumentasi digital sebenarnya tidak memiliki sistem pengelolaan yang baik. File mudah hilang, tercecer, atau tidak memiliki informasi kontekstual yang memadai. IVAA melihat persoalan ini sebagai tantangan serius. Dalam salah satu wawancara, mereka menekankan pentingnya kesadaran untuk melengkapi metadata sejak awal penciptaan dokumen. Metadata akan sangat memengaruhi temu kembali item atau dokumen dalam repositori digital (Yang, 2016). Arsip tanpa informasi (metadata) sangat akan menyulitkan proses identifikasi dan penggunaan ulang pada masa depan.

Sebuah foto ketika disimpan tanpa tanggal, lokasi, nama kegiatan, dan identitas subjek akan kehilangan nilai informasionalnya.

Ada tulisan Menarik dari C. J. Setiadi (2017) yang meminta kita untuk mengambil sikap mengenai pentingnya fotografi sebagai arsip dan memori budaya, bahkan terkait kemampuannya dalam merepresentasikan realitas (kebenaran). Menurutnya foto dapat diamati dalam tiga bentuk; yaitu tunggal, jamak, dan arsip. Menarik untuk menjelaskan bagian terakhir, bahwa foto sebagai arsip menawarkan kenangan sebagai referensi dan merupakan sumber daya yang besar untuk memperoleh informasi dan menelusuri sejarah (Setiadi, 2017).

Pemikiran ini sebenarnya juga relevan dengan konsep *records continuum* yang dikembangkan Frank Upward (1996). Dalam konsep tersebut, arsip dipahami sebagai sesuatu yang harus dipikirkan sejak proses penciptaannya, bukan setelah dokumen dianggap selesai digunakan (Bates & Maack, 2009). Lalu Kemish (McKemmish, 2005). Sebelum itu McKemmish (2001), dalam tulisannya "*Placing Records Continuum Theory and Practice*," yang dimuat dalam *Archival Science* (Vol 1), juga telah memberikan tinjauan komprehensif tentang teori kontinum arsip Australia dan model dasarnya (McKemmish, 2001). Intinya bahwa kesadaran arsip menjadi semakin penting di tengah banjir data digital. Banyak masyarakat rajin mendokumentasikan kehidupan, tetapi belum memiliki kesadaran mengelola memori digital secara sistematis. Padahal, dokumentasi personal hari ini bisa menjadi sumber sejarah penting di masa depan.

IVAA melalui berbagai program dan kegiatan dokumentasi, riset, atau edukasi pengarsipan, telah berupaya membangun kesadaran bahwa arsip bukan sekadar penyimpanan data, melainkan bagian penting dari pembelajaran, penelitian, ingatan kolektif, refleksi sosial, dan sejarah budaya.

Arsip sebagai Infrastruktur Kebudayaan dan Upaya Membaca yang Terpinggirkan

Hal lain yang juga sangat menarik dari praktik IVAA adalah perhatian mereka terhadap pencatatan seniman perempuan. Dalam beberapa tahun terakhir, IVAA secara khusus melakukan dokumentasi ulang terhadap pelaku seni perempuan yang dinilai kurang tercatat dalam sejarah seni Indonesia. Langkah ini memperlihatkan bahwa pengarsipan tidak pernah netral. Arsip selalu terkait dengan siapa yang dicatat dan siapa yang diabaikan.

Michelle Caswell (2014) menjelaskan bahwa arsip memiliki dimensi politik karena menentukan representasi kelompok sosial dalam sejarah. Lebih lanjut karya ini membahas transformasi foto tahanan di penjara Tuol Sleng yang awalnya sebagai bagian dari alat administrasi kekerasan Khmer Merah menjadi simbol global tentang kesaksian, keadilan, dan hak asasi manusia. Melalui pendekatan arsip, budaya visual, dan etika, karya Caswell ini menunjukkan bagaimana arsip tidak hanya menyimpan memori sejarah, tetapi juga membentuk cara masyarakat memahami tragedi kemanusiaan (French, 2015).

Demikian juga ada banyak perempuan, komunitas lokal, dan kelompok marjinal yang sering kali tidak memperoleh ruang dokumentasi yang setara. Karena itu, kerja pengarsipan juga dapat menjadi bentuk koreksi terhadap ketimpangan sejarah. Apa yang dilakukan IVAA menunjukkan bahwa lembaga arsip dapat berfungsi sebagai ruang keberpihakan sosial. Arsip tidak hanya menyimpan masa lalu dominan, tetapi juga membuka ruang bagi narasi yang selama ini terpinggirkan.

Dari berbagai praktik yang dilakukan IVAA, tampak bahwa arsip memiliki posisi yang sangat penting dalam ekosistem budaya. Pertama, arsip berfungsi sebagai memori kolektif. Tanpa arsip, sejarah seni akan mudah terputus dan kehilangan konteks. Kedua, arsip menjadi sumber pengetahuan. Peneliti, kurator, seniman, mahasiswa, hingga masyarakat umum membutuhkan arsip untuk memahami perkembangan seni dan budaya. Ketiga, arsip dapat menjadi ruang produksi kreatif. Aktivasi arsip yang dilakukan IVAA memperlihatkan bahwa dokumen lama dapat melahirkan pengalaman artistik baru. Keempat, arsip memiliki fungsi sosial-politik. Pengarsipan dapat menjadi alat untuk menghadirkan kembali kelompok yang selama ini kurang tercatat. Kelima, arsip adalah bagian penting dari infrastruktur budaya. Sebagaimana galeri, museum, atau perpustakaan, lembaga arsip berperan menjaga kesinambungan pengetahuan lintas generasi. Dalam konteks ini,

IVAA menunjukkan bahwa pengarsipan seni bukan pekerjaan administratif semata, melainkan kerja kebudayaan.

Berbagai praktik kearsipan yang telah dan saat ini dilaksanakan IVAA memberikan sejumlah pelajaran penting bagi dunia kearsipan di Indonesia. Pertama, lembaga arsip perlu bergerak lebih terbuka dan partisipatif. Arsip tidak cukup hanya disimpan, tetapi harus dihadirkan kembali kepada publik melalui berbagai bentuk aktivasi. Kedua, pengarsipan perlu memanfaatkan pendekatan lintas disiplin. Kolaborasi dengan seniman, komunitas, media, dan teknologi digital dapat memperluas makna arsip. Ketiga, kesadaran arsip harus dibangun sejak awal penciptaan dokumen. Pendidikan literasi arsip menjadi penting, terutama di era media sosial. Keempat, digitalisasi harus dipahami sebagai strategi preservasi jangka panjang, bukan sekadar tren teknologi. Kelima, lembaga arsip perlu lebih sensitif terhadap kelompok yang selama ini kurang tercatat dalam sejarah.

Di tengah perubahan zaman yang begitu cepat, arsip sesungguhnya menjadi penanda bahwa masyarakat masih memiliki ingatan. Ketika arsip diabaikan, yang hilang bukan hanya dokumen, tetapi juga jejak kebudayaan. Terakhir, yang dilakukan IVAA memperlihatkan bahwa arsip dapat hidup, bergerak, bahkan berbicara kembali kepada publik. Arsip bukan sekadar masa lalu yang disimpan rapi di lemari, melainkan ruang dialog antara ingatan, pengetahuan, dan masa depan.

Daftar Pustaka

- Bates, M. J., & Maack, M. N. (Eds). (2009). *Records Continuum Model*. In *Encyclopedia of Library and Information Sciences*, Third Edition (0 edn, pp. 4447 – 4459). CRC Press. <https://doi.org/10.1081/E-ELIS3-120043719>
- Caswell, M., & Punzalan, R. L. (2016). Archives and Human Rights: Questioning Notions of Information and Access. In *Perspectives on Libraries as Institutions of Human Rights and Social Justice* (pp. 287–301). Emerald Group Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/S0065-283020160000041012>
- Conway, P. (2010). Preservation in the Age of Google: Digitization, Digital Preservation, and Dilemmas. *The Library Quarterly*, 80(1), 61 – 79. <https://doi.org/10.1086/648463>
- Cook, T., Nesmith, T., Bak, G., Schwartz, J. M., Society of American Archivists, & Association of Canadian Archivists (Eds). (2020). 'All shook up': *The archival legacy of Terry Cook*. Society of American Archivists ; Association of Canadian Archivists.
- Derrida, J. (1996). *Archive fever: A Freudian impression*. University of Chicago Press.
- Dokumentasi audiovisual Indonesian Visual Art Archive (IVAA): 1. "Retas Budaya - Koleksi Arsip IVAA." YouTube. 2. "Cara IVAA Memasyarakatkan Arsip." YouTube. 3. Dokumentasi Wawancara Adwi Rahmanto, Kepala Arsip IVAA.
- French, L. C. (2015). Archiving the Unspeakable: Silence, Memory, and the

- Photographic Record in Cambodia. By Caswell Michelle. Madison: University of Wisconsin Press, 2014. xii, 231 pp. \$29.95 (paper); \$24.95 (ebook). *The Journal of Asian Studies*, 74(1), 236–239. <https://doi.org/10.1017/S0021911814002101>
- Khan, N. A., Shafi, S. M., & Ahangar, H. (2018). Digitization of Cultural Heritage: Global Initiatives, Opportunities and Challenges. *Journal of Cases on Information Technology*, 20(4), 1–16. <https://doi.org/10.4018/JCIT.2018100101>
- McKemmish, S. (2001). Placing records continuum theory and practice. *Archival Science*, 1(4), 333–359. <https://doi.org/10.1007/BF02438901>
- McKemmish, S. (Ed.). (2005). *Archives: Recordkeeping in society*. Centre for Information Studies, Charles Sturt University.
- Netivmedia. (2024). *Netiv Visit—Indonesian Visual Art Archive (Ivaa): Pahlawan Arsip Seni — Youtube*. <https://www.youtube.com/watch?v=if6xo-hfWAK>
- Setiadi, C. J. (2017). The Significance of Photography as Archives and Cultural Memory. *Humaniora*, 8(2), 175. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v8i2.3894>
- Yang, L. (2016). Metadata Effectiveness in Internet Discovery: An Analysis of Digital Collection Metadata Elements and Internet Search Engine Keywords. *College & Research Libraries*, 77(1), 7–19. <https://doi.org/10.5860/crl.77.1.7>

Memasyarakatkan Arsip Melalui *Storytelling*



Wisudowati Ayu Sugito
*Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah*

Dalam hal kebudayaan, Provinsi Jawa Tengah merupakan pusat kebudayaan Jawa dan memiliki banyak warisan budaya, baik benda maupun tak benda, seperti candi, situs Sangiran, rumah Joglo, batik, pertunjukan wayang kulit, gamelan, upacara adat, kesenian tari dan bahasa Jawa dengan berbagai dialeknya. Berbagai jejak sejarah, tradisi, adat istiadat, dan nilai-nilai budaya yang menjadi identitas suatu masyarakat sebagian dilestarikan dan direpresentasikan dalam arsip. Bahkan di antaranya telah diakui sebagai memori kolektif bangsa, antara lain arsip Rehabilitasi Centrum Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta, arsip Transmigrasi di Jawa Tengah, arsip Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Jawa Tengah sebagai pionir

PKK nasional serta arsip infrastruktur pendidikan pada masa kolonial.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, khususnya Pasal 6, penyelenggaraan kearsipan daerah menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah dan dilaksanakan oleh lembaga kearsipan daerah. Salah satu bentuk kewajiban lembaga kearsipan daerah dalam penyelenggaraan kearsipan adalah memberikan layanan kearsipan kepada masyarakat sebagai bentuk pemanfaatan arsip yang telah dikelola.

Namun, mengacu pada hasil pengawasan kearsipan tahun 2025, diketahui layanan kearsipan kepada masyarakat masih relatif terbatas. Sepanjang tahun 2024, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah telah menerima 541 frekuensi kunjungan layanan arsip. Jika dalam satu tahun terdapat 261 hari, maka rata-rata terdapat dua pengunjung dalam satu hari. Pada Lembaga Kearsipan Kabupaten Kudus, hanya terdapat 13 kali layanan dalam satu tahun. Tidak jauh berbeda, pada Lembaga Kearsipan Kabupaten Semarang, Temanggung, Tegal, dan Sukoharjo, layanan kearsipan dalam sebulan rata-rata hanya satu frekuensi.

Hal ini menjadi kegelisahan tersendiri bagi arsiparis sebagai pengelola arsip karena kekayaan khazanah lembaga kearsipan daerah kurang dapat menjangkau masyarakat luas, terutama generasi penerus. Jejak gerak masyarakat pada peradaban sebelumnya dan peninggalan budaya dengan kekayaan filosofi

Jawa Tengah yang belum secara utuh "dikenal" oleh masyarakatnya, serta tokoh-tokoh yang berasal dari Jawa Tengah yang sangat berperan namun kurang "diakrabi" sepak terjang dan gagasan-gagasannya.

Lembaga Kearsipan Daerah seharusnya dapat menjadi lembaga informasi yang tidak hanya berperan dalam melestarikan memori kolektif daerah dan bangsa, tetapi juga dapat menjadi bagian dalam memberdayakan nilai keberlanjutan informasi yang dikelola, menjaga rekam kultur dan tamadun pendahulu untuk tetap hidup di tengah generasi penerus.

"Penyediaan" Arsip

Penyediaan layanan arsip merupakan suatu proses pemberian informasi yang menjembatani antara pengguna sebagai pihak yang membutuhkan informasi dengan arsiparis selaku pihak yang menyampaikan informasi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa layanan arsip adalah implementasi dari konsep ketersediaan arsip yang menjadi tujuan pengelolaan arsip, sehingga arsip yang dikelola dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Tengah rata-rata memfasilitasi beberapa layanan arsip, antara lain layanan restorasi arsip tekstual, layanan penerimaan kunjungan, layanan konsultasi, layanan alih media, layanan peminjaman arsip statis dan pameran arsip.

Keterjangkauan suatu arsip untuk dilayankan kepada pengguna, dapat menjadi salah satu indikator keberhasilan pengelolaan arsip. Penjangkauan kearsipan dilakukan

sebagai upaya untuk meningkatkan akses dan pemanfaatan arsip bagi pengguna. Dengan kebutuhan masyarakat atas informasi yang semakin kompleks, mendorong lembaga kearsipan untuk merombak prioritas dan mengembangkan kegiatan yang dapat mendekatkan arsip dan lembaga kearsipan lebih dekat dengan publik.

Arsip perlu dipromosikan sebagai sumber informasi, pengetahuan, sejarah, memori kolektif dan warisan budaya yang autentik dan terpercaya. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan inovasi dalam penyediaan informasi yang berkualitas. Penjangkauan arsip juga dapat dianggap sebagai komponen pemasaran arsip agar dapat meningkatkan visibilitas arsip, peran arsiparis dan lembaga kearsipan.

Penyajian Arsip Melalui *Storytelling*

Salah satu strategi dalam meningkatkan penjangkauan kearsipan kepada masyarakat adalah dengan melakukan publikasi arsip dengan metode *storytelling*. *Storytelling* merupakan salah satu cara manusia menyampaikan informasi. Penjangkauan arsip dengan metode *storytelling* dilakukan dengan mentransformasi arsip menjadi cerita yang bermakna dan mudah dipahami.

Metode *storytelling* dalam penyajian arsip menjadi informasi, menggunakan pendekatan narasi manusiawi yang fokus pada tokoh, emosi atau situasi serta membangun struktur cerita dengan menambahkan karakter, alur, konflik atau tantangan serta resolusi

bagaimana cerita berakhir. Metode ini dapat diimplementasikan dalam menarasikan deskripsi arsip pada pameran maupun publikasi arsip pada media sosial, naskah sumber, film dan video pendek, serta bentuk publikasi lainnya seperti digital *storytelling*. Adapun digital *storytelling* merupakan suatu cara dalam menyampaikan narasi dengan disertai gambar, teks, audio maupun video.

Dengan metode ini diharapkan arsip dapat "dihidupkan" melalui narasi, dan tidak lagi dianggap "kaku", "hanya data" dan "milik pemerintah" sehingga sulit menjangkau masyarakat. Dengan mengolah arsip menjadi konten naratif yang menarik dan mudah dipahami, nilai keberlanjutan arsip statis yang dikelola lembaga kearsipan daerah Jawa Tengah dapat diberdayakan dan dimanfaatkan secara lebih luas oleh masyarakat.

Metode *storytelling* sendiri telah terbukti efektif dalam mengembangkan aspek pengetahuan, perasaan dan penghayatan. Telah banyak penelitian yang mengkaji manfaat *storytelling* terutama dalam dunia pendidikan. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Krisnawati dan Julianingsih (2019) yang menghasilkan bahwa pembelajaran dengan digital *storytelling* terbukti meningkatkan nilai motivasi belajar siswa sebesar 47,48%. Selanjutnya, Tanjung (2013) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa penerapan *storytelling* melalui game yang mana pemain tidak akan langsung memainkan permainannya, akan tetapi diceritakan dulu

alur/kisah ceritanya, terbukti dapat meningkatkan pembelajaran sejarah dan budaya.

Beberapa penelitian yang dimaksud mendukung bahwa metode *storytelling* dapat menjadi strategi baru dalam meningkatkan minat dan efektivitas penyampaian informasi. Ketika mendengar narasi cerita, seseorang akan memfungsikan indera penglihat dan pendengarnya. Sinyal dari indera akan ditangkap oleh otak sehingga dapat menarik perhatian dan emosi pendengarnya.

Kajian Lebih Lanjut

Namun, perlu penelitian lebih lanjut apakah metode *storytelling* dalam publikasi arsip merupakan strategi yang efektif dalam menjangkau masyarakat? Selanjutnya, dengan menggunakan pendekatan *human interest* berupa fokus pada tokoh, emosi atau situasi dengan struktur cerita serta membingkai dengan konteks pada arsip, apakah dapat memengaruhi autentikasi arsip itu sendiri? Penyampaian arsip dengan narasi tokoh, alur cerita, dan konflik pada penyajian arsip apakah akan berdampak pada arsip yang tidak memenuhi persyaratan autentik, utuh, dan terpercaya?

Referensi

Agung Hariadi, R. D. (Januari-Juni 2023). Strategi layanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai dalam

- kegiatan storytelling di masa normal baru. *FIHRIS: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, Volume 18, Nomor 1, 58-71.
- Dewi Yulianti, T. A. (2023). Sejarah Lisan Sebagai Teknik Preservasi Pengetahuan: Systematic. *Palimpsest : Jurnal Ilmu Informasi dan Perpustakaan*, Volume 14, Issue 2, 146-156.
- Fitria Irmalasari, N. M. (Juli - Desember 2017). Strategi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dalam Meningkatkan Mutu Layanan: Studi Kasus Subdirektorat Layanan Arsip. *RECORD AND LIBRARY*, Volume 3, Nomor 2, 158-171.
- Idham Farid Fahrodji, Y. Y. (Oktober 2017). Kajian pengolahan arsip gambar statik sebagai upaya penyelamatan nilai informasi arsip di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, Volume 6, Nomor 4, 371-380.
- Lee, J. A. (Desember 2016). Mediated Storytelling Practices and Productions: Archival Bodies of Affective Evidences. *Networking Knowledge*, 74-87.
- Musliichah. (Maret 2018). Strategic communication dalam mempertahankan eksistensi Arsip UGM sebagai pilot project Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi di Indonesia. *Diplomatika*, Volume 1, Nomor 2, 93-107.
- Nordin, Hanna (2023). Designing to Restory the Past: Storytelling for Empowerment through a Digital Archive. *International Journal of Design*, Volume 17, Nomor 1.
- Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Autentikasi Arsip Statis.
- Santosa, H. (2019). Inovasi Pendayagunaan Arsip Melalui Film Dokumenter. *Khazanah: Jurnal Pengembangan Kearsipan*, Volume 12, Nomor 2, 100-119.
- Sari, A. T. (2012). *Layanan Storytelling Sebagai Strategi Penanaman Nilai-Nilai Minat Baca di Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonogiri*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Tri Mega Asri, E. R. (Desember 2019). Penerapan Storytelling dan Instagram : Optimalisasi Layanan Perpustakaan Keliling di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kediri. *BACA : Jurnal Dokumentasi dan Informasi*, Volume 40, Nomor 2, 237-250.
- Tri Yekti Mufidati, T. A. (2023). Pameran Arsip Virtual pada Lembaga Kearsipan sebagai Upaya Peningkatan Penjangkauan Kearsipan: Studi Kasus di Arsip Nasional Republik Indonesia. *Khazanah : Jurnal Pengembangan Kearsipan*, Volume 16, Nomor 1, 77-99.
- Yudhanti, S. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akses dan Pemanfaatan Arsip Statis bagi Masyarakat: Studi Kasus Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta. *DIPLOMATIKA: JURNAL KEARSIPAN TERAPAN*, Volume 3, Nomor 2, 98-109.

Alih Media Arsip: Menjaga Akses Informasi untuk Membangun Generasi Literat



Elvetta Vivia Adriyanti
&
Ilmi Fathya Banna

Pendahuluan

Sebagai mahasiswa Ilmu Informasi dan Perpustakaan, kami mendapat kesempatan berharga untuk dapat melaksanakan kegiatan magang di Perpustakaan dan Arsip Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Kegiatan ini memberikan pengalaman nyata terkait pengelolaan arsip di lingkungan profesional, terutama di bidang digitisasi atau alih media arsip. Melalui kegiatan ini pula, kami dapat melihat secara langsung bagaimana arsip dikelola, dirawat, hingga dialihmediakan ke bentuk digital sebagai upaya pelestarian pengetahuan dan informasi. Pengalaman tersebut membuka pemahaman kami bahwa arsip bukan sekadar tumpukan dokumen atau

kertas semata, melainkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan informasi yang menyimpan banyak nilai-nilai sejarah, identitas, dan warisan intelektual yang penting untuk dijaga. Kesadaran ini semakin relevan di tengah perkembangan teknologi informasi yang mendorong berbagai lembaga, termasuk lembaga kearsipan, untuk melakukan transformasi digital dalam pengelolaan arsip.

Di tengah upaya pelestarian arsip tersebut, perkembangan dan penerapan teknologi canggih seperti teknologi komputer, robot, hingga *Artificial Intelligence* (AI) telah mengalami lonjakan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir (Muller, 2024). Fenomena ini tidak terlepas dari pergeseran masyarakat industri menjadi masyarakat informasi, di mana informasi dan teknologi menjadi sumber daya utama dan dominan. Pada era ini, masyarakat sudah tidak dapat dipisahkan dari teknologi karena penggunaannya telah menjadi bagian dari budaya baru dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut lantas mendorong masyarakat untuk menuntut akan adanya kecepatan, kemudahan, dan efisiensi dalam berbagai aktivitas. Akibatnya, masyarakat semakin bergantung pada teknologi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk dalam mengakses, mengelola, dan memanfaatkan informasi.

Perubahan budaya tersebut lantas memengaruhi bidang kearsipan. Arsip yang sebelumnya identik dengan dokumen fisik dan penyimpanan tradisional, kini mengalami transformasi menuju pengelolaan berbasis digital. Perkembangan teknologi informasi menghadirkan tantangan sekaligus peluang baru bagi lembaga kearsipan dalam menjaga keberlangsungan pengetahuan dan informasi yang terkandung dalam setiap arsip. Di satu sisi, arsip fisik memiliki risiko kerusakan akibat usia, kelembapan, bencana alam, maupun keterbatasan ruang penyimpanan. Namun di sisi lain, perkembangan teknologi digital membuka peluang untuk menciptakan sistem pengelolaan arsip yang lebih efektif, aman, dan mudah diakses oleh masyarakat (Suharti, 2024; Janah et al., 2024). Oleh karena itu, alih media arsip tidak hanya menjadi upaya pelestarian informasi, tetapi juga berperan dalam menjaga akses terhadap pengetahuan yang terkandung di dalam arsip sehingga dapat dimanfaatkan untuk mendukung terwujudnya generasi yang literat.

Pembahasan

Kegiatan alih media arsip menjadi salah satu program unggulan yang sangat penting, khususnya di lingkungan Arsip Universitas Gadjah Mada. Alih media berperan sebagai jembatan antara pelestarian fisik dan pemanfaatan informasi secara lebih luas. Arsip-arsip yang sebelumnya berbentuk konvensional seperti manuskrip, dokumen

cetak, maupun rekaman analog dialihkan ke dalam format digital agar lebih tahan terhadap kerusakan, mudah diakses, serta dapat disebarluaskan tanpa batasan ruang dan waktu.

Lewat alih media, informasi yang terkandung dalam sebuah arsip tetap bisa digunakan atau dimanfaatkan meskipun kondisi fisik dari si arsip telah rusak. Penelitian yang telah dilakukan oleh Putri dan Helmi (2025), menunjukkan bahwa alih media arsip berkontribusi dalam pelestarian arsip sekaligus meningkatkan akses informasi sehingga arsip dapat dimanfaatkan secara lebih efektif oleh masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, Andhika dan Irawati (2023) dan Zakaria et al. (2025) menyebutkan bahwa alih media merupakan kegiatan pengalihan media arsip yang bertujuan untuk memudahkan akses arsip serta menjaga dan melestarikan informasi yang terkandung di dalamnya agar tetap dapat digunakan secara utuh dan berperan dalam memelihara nilai informasi dan nilai evidensial arsip sehingga keautentikan, keabsahan, dan keterpercayaannya tetap terjaga sebagai sumber informasi maupun alat bukti.

Berangkat dari kemudahan akses informasi tersebut, lantas menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung pengembangan literasi masyarakat. Literasi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membaca dan menulis individu, tetapi juga mencakup kemampuan mengakses, memahami, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi secara tepat (Trixa & Kaspar, 2024;

Saunders, 2024). Melalui kemudahan akses terhadap arsip digital, masyarakat tidak hanya memperoleh informasi, tetapi juga dapat belajar menelusuri sumber yang autentik, membandingkan berbagai informasi, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Kemampuan tersebut merupakan bagian penting dari literasi informasi yang dibutuhkan oleh generasi saat ini. Dengan demikian, alih media arsip tidak hanya berfungsi sebagai upaya pelestarian arsip, tetapi juga menjadi sarana dalam mendukung terbentuknya generasi literat yang mampu memanfaatkan informasi dengan bijak. Dalam konteks ini, arsip digital dapat berfungsi sebagai sumber informasi yang autentik karena memuat rekaman berbagai peristiwa, kebijakan, dan pengetahuan yang terdokumentasikan dengan baik. Herdiani (2022) dan Whitworth (2024) dalam penelitiannya menegaskan bahwa arsip memiliki keterkaitan yang erat dengan literasi informasi karena menyediakan sumber-sumber yang memungkinkan masyarakat memahami bagaimana pengetahuan dibangun, didokumentasikan, dan diwariskan dari waktu ke waktu. Akses terhadap informasi yang berkualitas menjadi faktor penting dalam mendukung terbentuknya kemampuan literasi karena memungkinkan individu untuk mengembangkan pemahaman, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, serta mengambil keputusan berbasis bukti (Dawson et al., 2024). Sehingga dapat dikatakan, semakin mudah suatu informasi diakses, semakin besar pula

peluang bagi masyarakat untuk memanfaatkan informasi tersebut sebagai sarana belajar dan pengembangan pengetahuan serta literasi.

Penutup

Alih media arsip merupakan langkah strategis dalam menjaga keberlanjutan informasi dan pengetahuan di era digital. Melalui proses ini, arsip tidak hanya terlindungi dari risiko kerusakan fisik, tetapi juga dapat diakses, dimanfaatkan, dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Kemudahan akses terhadap arsip digital membuka peluang yang lebih luas bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkualitas dan dapat mengembangkan kemampuan literasi. Pengalaman magang di Perpustakaan dan Arsip Universitas Gadjah Mada memberikan pemahaman bahwa alih media arsip bukan sekadar proses teknis mengubah bentuk media, melainkan juga upaya pelestarian pengetahuan dan warisan intelektual yang bernilai.

Daftar Pustaka

- AD, S. (2024). Digitasi Koleksi untuk Mempermudah Akses Informasi di Direktorat Perpustakaan UII. *Buletin Perpustakaan*, 7(1), 123–137. <https://doi.org/10.20885/bpuui.v7i1.34495>.
- Andhika, D. B., & Irawati, Y. E. (2023). Information Science and Library Strategi Pemeliharaan Arsip Dinamis Inaktif Melalui Alih Media Info Artikel.

JURNAL ILMIAH, 4(1), 1–9.
<https://doi.org/10.26623/jisl>.

Dawson, C., Julku, H., Pihlajamäki, M., Kaakinen, J. K., Schooler, J. W., & Simola, J. (2024). Evidence-based scientific thinking and decision-making in everyday life. *Cognitive Research: Principles and Implications*, 9(1). <https://doi.org/10.1186/s41235-024-00578-2>.

Herdiani, E. (2022, June). Archives and Arts Digitization as Literacy Potential on Arts History Research. In *4th International Conference on Arts and Design Education (ICADE 2021)* (pp. 182-185). Atlantis Press.

Janah, E. U., Hidayah, P. F., Adysti, R. N., & Arjuna, R. H. (2024). Peran Digitalisasi Arsip untuk Meningkatkan Efektivitas Manajemen Dokumen Arsip di Dinas Arsip Kota Semarang. *TSAQOFAH*, 5(1), 4–7. <https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v5i1.4517>.

Müller, C. (2024). *World robotics 2024: Industrial robots*. IFR Statistical Department, VDMA Services GmbH.

Putri, Z., & Helmi, R. (2025). Alih Media Arsip: Implementasi Dan Hambatan Dalam Meningkatkan Manajemen Kearsipan

Di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 6(2), 10. <https://doi.org/10.47134/villages.v6i2.301>.

Saunders, L. (2024). Information literacy now: Examining where we are to understand where we are going. *Journal of Information Literacy*, 18(1), 69–77. <https://doi.org/10.11645/18.1.560>.

Trixa, J., & Kaspar, K. (2024). Information literacy in the digital age: information sources, evaluation strategies, and perceived teaching competences of pre-service teachers. *Frontiers in Psychology*, 15. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1336436>.

Whitworth, A. (2024). Archives as the prologues of information literacy. *Journal of Information Literacy*, 18(1), 94–100. <https://doi.org/10.11645/18.1.564>.

Zakaria, M. A., Sagita, N. I., & Ismail, F. (2025). Alih Media Arsip sebagai Pemeliharaan Nilai Evidence: Studi Kasus Arsip Pengadaan Barang dan Jasa di Puslatbang PKASN LAN Tahun 2024. *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika Dan Komunikasi*, 6(2), 894–913. <https://doi.org/10.63447/jimik.v6i2.1316>.

Topografische Dienst van Nederlands-Indië: dari Arsip Kolonial ke Basis Data Geospasial



Syahraztania Himatuddini

Pendahuluan

Peta digital kini sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Cukup dengan menggenggam ponsel, siapa pun bisa melihat batas wilayah, jaringan jalan, hingga kondisi geografis suatu daerah dalam hitungan detik. Tak hanya masyarakat umum, pemerintah pun mengandalkan sistem informasi geospasial untuk merancang pembangunan, mengelola lahan, dan memanfaatkan sumber daya alam secara lebih terencana. Namun, di balik kemudahan teknologi itu, tersimpan sejarah panjang tentang bagaimana wilayah Indonesia pertama kali diukur dan dipetakan secara terstruktur.

Upaya pemetaan yang sistematis dimulai jauh sebelum era digital. Pada masa kolonial Hindia Belanda, kegiatan ini dijalankan secara serius oleh *Topografische Dienst van Nederlands-Indië*, lembaga pemetaan yang resmi berdiri pada tahun 1864 (Ormeling, 2003). Lembaga tersebut menghasilkan beragam arsip kartografis mulai dari peta topografi, survei geodesi, hingga pemetaan jaringan infrastruktur kolonial. Arsip-arsip ini tidak sekadar mendokumentasikan wilayah, melainkan juga berfungsi sebagai instrumen administrasi dan kendali kolonial atas tanah jajahan.

Di sinilah perspektif kearsipan menjadi penting untuk dipahami. Arsip bukanlah catatan yang polos dan bebas nilai. Arsip selalu dibentuk oleh mereka yang berkuasa, dengan tujuan mempertahankan dan memperkuat posisi kekuasaan itu sendiri (Schwartz & Cook, 2002). Maka, peta-peta kolonial pun perlu dibaca dalam kerangka yang lebih kritis sebagai cerminan dari cara negara kolonial mengatur ruang, mengelola penduduk, dan menguasai sumber daya di Hindia Belanda.

Ketika Kolonialisme Membutuhkan Peta

Kolonialisme dan peta adalah dua hal yang sulit dipisahkan. Untuk bisa menguasai suatu wilayah, pemerintah Hindia Belanda terlebih dahulu harus mengenali wilayah yang

akan dikuasainya. Peta kuncinya. Melalui peta, kondisi geografis kepulauan yang luas bisa dipahami, jalur perdagangan bisa ditentukan, dan kekayaan alam bisa diinventarisasi. Tak mengherankan jika perkembangan kolonialisme di Hindia Belanda selalu berjalan beriringan dengan kemajuan survei topografi dan geodesi.

Pada awal abad ke-19, kegiatan pemetaan masih terbatas pada kebutuhan pelayaran dan hidrografi. Namun, seiring meluasnya kontrol administratif kolonial ke wilayah pedalaman, kebutuhan akan peta darat pun kian mendesak. Situasi inilah yang mendorong lahirnya *Topografische Dienst van Nederlands-Indië* pada tahun 1864. Lembaga resmi yang dibentuk khusus untuk menangani pemetaan kolonial.

Lembaga ini kemudian menjalankan survei-survei sistematis menggunakan metode triangulasi, pengukuran astronomis, dan pemetaan topografi. Pulau Jawa menjadi prioritas awal, dengan kegiatan pemetaan yang berlangsung intensif antara 1850 hingga 1880, sebelum akhirnya diperluas ke luar Jawa. Seiring berjalannya waktu, hasil pemetaan ini turut menopang pembangunan jalan, jalur kereta api, pelabuhan, perkebunan, hingga sistem administrasi pertanahan kolonial (Ekkelenkamp, 2019).

Fakta ini menegaskan bahwa peta kolonial bukan semata produk kegiatan ilmiah. Di baliknya, terdapat kepentingan administratif dan ekonomi yang menggerakkan seluruh

proses pemetaan. Pengetahuan lokal tentang suatu wilayah perlahan-lahan digantikan oleh sistem koordinat, batas administratif, dan klasifikasi spasial versi pemerintah kolonial.

Dari seluruh proses itu, *Topografische Dienst* mewariskan koleksi arsip kartografis yang sangat kaya. Mencakup peta topografi, peta tematik, data triangulasi, hingga dokumentasi survei lapangan. Dalam perspektif kearsipan, koleksi ini adalah rekaman berharga tentang bagaimana negara kolonial membangun pengetahuan spasialnya atas Hindia Belanda. Dengan begitu, selain merekam ruang, pemetaan juga turut membentuk cara ruang itu dipahami dan dikendalikan.

Peta Sebagai Arsip dan Instrumen Kekuasaan

Peta sering dianggap hanya sebagai gambaran objektif mengenai suatu wilayah. Padahal peta merupakan hasil dari proses seleksi, klasifikasi, dan penyusunan informasi yang dilakukan oleh lembaga tertentu. Karena itu, peta tidak pernah benar-benar netral. Apa yang dicatat, wilayah mana yang diprioritaskan, dan bagaimana batas ditentukan sangat dipengaruhi oleh kepentingan kekuasaan pada zamannya.

Schwartz dan Cook menjelaskan bahwa arsip dibentuk oleh pihak yang memiliki kuasa untuk mempertahankan maupun memperkuat posisinya dalam masyarakat (Schwartz & Cook, 2002). Dalam konteks Hindia Belanda, arsip kartografis yang diproduksi *Topografische*



Kaart van Java en Madoera

Sumber: Leiden University Digital Libraries

Dienst menjadi bagian dari sistem administrasi kolonial. Melalui peta, pemerintah kolonial dapat mengelola wilayah, menentukan batas administratif, mengawasi jalur transportasi, hingga mengidentifikasi kawasan ekonomi yang dianggap penting.

Pandangan serupa juga dikemukakan oleh J.B. Harley yang melihat peta sebagai bentuk pengetahuan yang berkaitan erat dengan kekuasaan. Peta kolonial tidak hanya merekam kondisi geografis, tetapi juga membentuk cara negara melihat ruang dan penduduk di wilayahnya (J.B. Harley, 1989). Jadi proses pemetaan sebenarnya merupakan proses politik sekaligus administratif. Terlihat dari perkembangan pemetaan tematik di Hindia Belanda.

Selain peta topografi, pemerintah kolonial juga menghasilkan peta perkebunan, jalur kereta api, pertambangan, kehutanan, hingga kadaster tanah (Ekkelenkamp, 2019). Arsip-arsip tersebut membantu pemerintah kolonial mengatur distribusi sumber daya dan memperkuat kontrol administratif terhadap wilayah yang luas.

Arsip kartografis kolonial akhirnya berfungsi sebagai dokumentasi geografis, sekaligus sebagai memori administratif negara

kolonial. Peta menjadi media yang menghubungkan pengetahuan, birokrasi, dan kekuasaan. Melalui arsip kartografis, negara kolonial membangun cara pandang tertentu mengenai ruang Hindia Belanda yang sebagian warisannya masih dapat ditemukan dalam sistem pemetaan Indonesia modern.

Dari Lemari Arsip ke Basis Data Geospasial

Berakhirnya masa kolonial tidak serta-merta membuat arsip kartografis peninggalan *Topografische Dienst van Nederlands-Indië* kehilangan nilainya. Ribuan lembar peta topografi, data triangulasi, catatan survei, dan peta tematik tetap tersimpan rapi di berbagai lembaga arsip, perpustakaan, dan institusi geospasial. Alih-alih terlupakan, arsip-arsip ini justru menjelma menjadi sumber penting bagi penelitian sejarah, administrasi wilayah, hingga pengembangan sistem pemetaan modern.

Babak baru dimulai ketika arsip kartografis memasuki era digitalisasi. Peta-peta yang selama bertahun-tahun hanya hadir dalam wujud fisik kini dipindai dan dikonversi menjadi data digital. Perubahan ini bukan sekadar pergantian media penyimpanan, ini mengubah cara arsip digunakan secara mendasar. Peta-peta yang dulu hanya bisa

diakses secara terbatas kini dapat diintegrasikan ke dalam sistem informasi geospasial dan diolah menggunakan berbagai teknologi digital.

Perkembangan ini tergambar nyata dalam sejumlah proyek atlas digital dan pemetaan historis. Robert Cribb, melalui karyanya *Digital Atlas of Indonesian History*, memperlihatkan bagaimana data sejarah dan peta-peta lama dapat dipadukan dalam visualisasi digital untuk membaca perubahan wilayah Indonesia dari masa ke masa (Cribb, 2010). Ini menjadi bukti bahwa arsip kartografis kolonial tetap memiliki nilai informasi yang tinggi, bahkan di tengah pesatnya perkembangan teknologi geospasial.

Lebih dari itu, banyak praktik pemetaan modern yang juga masih bertumpu pada fondasi pengukuran dari era kolonial. Jaringan

triangulasi, penamaan tempat, hingga sejumlah klasifikasi wilayah menjadi pijakan bagi pengembangan peta nasional Indonesia pasca-kemerdekaan. Sistem geospasial yang kita kenal hari ini tidak tumbuh dari ruang kosong, ini berkembang di atas warisan arsip yang telah dibangun jauh sebelumnya.

Inilah yang menunjukkan adanya benang merah antara arsip kolonial dan infrastruktur data spasial modern. Peta yang dulu difungsikan untuk kepentingan administrasi Hindia Belanda kini bertransformasi menjadi sumber data historis, referensi penelitian, dan bagian integral dari pengembangan basis data geospasial Indonesia. Dalam konteks ini, selain menyimpan memori masa lalu, arsip kartografis juga menjadi fondasi pengetahuan spasial untuk masa kini dan masa depan.



Dari Peta Historis ke GIS Modern
Sumber: Badan Informasi Geospasial (BIG)

Bagaimana Kolonialisme Membentuk Cara Kita Melihat Peta Indonesia Hari Ini?

Kemerdekaan Indonesia tidak secara otomatis berarti memutus hubungan dengan sistem kartografi yang dibangun pada masa Hindia Belanda. Warisan itu mungkin tidak selalu tampak di permukaan, namun jejaknya tetap hadir dalam metode pengukuran, pembagian wilayah, hingga cara negara memahami dan mengelola ruang geografisnya sendiri.

Salah satu warisan paling konkret adalah sistem geodesi dan triangulasi yang dikembangkan *Topografische Dienst van Nederlands-Indië*. Jaringan titik ukur dan survei topografi yang dibangun pemerintah kolonial itu menjadi kerangka pemetaan yang sistematis untuk berbagai wilayah Hindia Belanda. Banyak di antaranya kemudian dijadikan rujukan dalam pengembangan pemetaan nasional setelah kemerdekaan.

Tak hanya metode pengukurannya, cara kolonialisme mengklasifikasikan ruang pun ikut diwariskan. Wilayah-wilayah perkebunan, jalur transportasi, kawasan pertambangan, hingga batas-batas administratif pernah diterjemahkan ke dalam kategori spasial tertentu yang sesuai dengan kepentingan administrasi dan ekonomi kolonial. Dalam banyak kasus, pola klasifikasi ini masih mewarnai tata ruang dan struktur administrasi wilayah Indonesia hingga kini.

Pengaruh jangka panjang inilah yang membuat arsip kartografis kolonial tidak hanya

menjadi dokumen kuno. Ketika peta-peta lama itu didigitalisasi dan dimasukkan ke dalam sistem GIS (*Geographic Information System*), warisan kolonial pun ikut bermigrasi ke dalam infrastruktur data digital masa kini melampaui batas waktu dan perubahan rezim.

Peta tidak pernah bisa dilepaskan dari relasi pengetahuan dan kekuasaan. Cara suatu wilayah dipetakan akan menentukan bagaimana wilayah itu dipahami dan dikelola. Di Indonesia, warisan pemetaan kolonial membantu menjelaskan mengapa pendekatan dalam banyak sistem geospasial modern masih berakar pada tradisi kartografi era Hindia Belanda.

Ini bukan berarti praktik geospasial Indonesia saat ini sepenuhnya bersifat kolonial. Namun sejarah mencatat bahwa perkembangan teknologi pemetaan nasional melewati proses Panjang. Proses yang tak bisa dilepaskan dari arsip, lembaga, dan transfer pengetahuan kartografi dari masa kolonial ke masa modern. Kolonialisme tidak semata-merta meninggalkan tumpukan peta di lemari arsip. Kolonialisme mewariskan cara dalam melihat, memahami, dan mengelola ruang Indonesia. Sebuah warisan yang masih bekerja hingga hari ini.

Penutup

Di balik layar ponsel yang digunakan setiap hari untuk mencari jalan atau menjelajahi wilayah, tersimpan sejarah yang panjang. Peta

digital Indonesia hari ini bukan lahir dari ruang hampa, ini adalah warisan jejak panjang praktik pemetaan kolonial yang dibangun *Topografische Dienst van Nederlands-Indië* berabad-abad lalu. Survei topografi, jaringan geodesi, dan ribuan lembar arsip kartografis yang dihasilkan lembaga itu tidak hanya merekam wajah geografis Hindia Belanda, tetapi juga membentuk cara negara melihat, memilah, dan mengelola ruangnya sendiri.

Dalam kacamata kearsipan, arsip kartografis kolonial selain menjadi tumpukan dokumen teknis. Ini juga menjadi produk kekuasaan yang mencerminkan cara negara kolonial mengadministrasi wilayah dan mengontrol kehidupan di dalamnya. Warisan itu pun tidak berhenti pada lembaran peta yang menguning di lemari arsip. Ia terus mengalir melalui sistem klasifikasi wilayah, metode pengukuran, dan infrastruktur data spasial yang kita gunakan hingga kini.

Gelombang digitalisasi mempertegas kesinambungan ini. Peta-peta lama yang dulu tersimpan terbatas kini menjelma menjadi data digital, dimanfaatkan dalam penelitian sejarah, dan diintegrasikan ke dalam sistem informasi geospasial modern. Masa lalu dan masa kini, ternyata, tidak semudah itu untuk dipisahkan.

Pada akhirnya, memahami arsip kartografis kolonial bukan sekadar urusan arsiparis, sejarawan, atau pustakawan. Ini adalah upaya memahami dari mana memori spasial sebuah bangsa berasal. Bagaimana peta dibentuk, oleh siapa, dan untuk kepentingan apa.

Daftar Pustaka

- Cribb, R. (2000). *Historical Atlas of Indonesia* (1st ed.). Taylor and Francis. Retrieved from <https://www.perlego.com/book/1712691/historical-atlas-of-indonesia-pdf> (Original work published 2000)
- Ekkelenkamp, H. (2019). *Indonesië op de kaart: De rol van de Nederlandse aanwezigheid in Indonesië bij de ontwikkeling van de geodesie in Nederland*. [Dissertation (TU Delft), Delft University of Technology]. <https://doi.org/10.4233/uuid:1d7a10a3-e6af-439e-880b-720b35458f75>
- Harley, J. B. (1989). "Maps, Knowledge, and Power." Dalam D. Cosgrove & S. Daniels (Ed.), *The Iconography of Landscape*. Cambridge: Cambridge University Press. <https://philpapers.org/rec/HARMKA>
- Ormeling, F. J. (2005). *Colonial cartography of the Netherlands East Indies 1800-1942*. Paper presented at 22nd International Cartographic Conference, A Coruña, Spain. <https://research-portal.uu.nl/en/publications/colonial-cartography-of-the-netherlands-east-indies-1800-1942/>
- Schwartz, Joan & Cook, Terry. (2002). Archives, records, and power: The making of modern memory. *Archival Science*. 2. 1-19. 10.1023/a:1020826710510

Melestarikan Jejak: Pengelolaan Arsip Inaktif sebagai Investasi Akuntabilitas Institusi



Julia Fatmawati
SMK NEGERI 1 PURBALINGGA

Pengantar

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan sarana bagi siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh di sekolah sekaligus memahami kondisi nyata di dunia kerja. Kesempatan berharga ini kami peroleh melalui kegiatan PKL yang dilaksanakan di Perpustakaan dan Arsip Universitas Gadjah Mada (UGM). Selama menjalani kegiatan tersebut, kami mendapatkan wawasan baru mengenai pengelolaan arsip inaktif, suatu pengalaman baru yang sebelumnya belum banyak kami ketahui.

Sebelum melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL), kami beranggapan bahwa

arsip inaktif hanyalah tumpukan dokumen lama yang sudah tidak digunakan dan sekadar disimpan di tempat penyimpanan. Namun, pengalaman yang kami peroleh selama berada di lingkungan kerja menunjukkan bahwa arsip inaktif memiliki peran yang jauh lebih luas dan sangat penting. Arsip tersebut tidak hanya berfungsi sebagai dokumen pendukung administrasi, tetapi juga memiliki nilai sebagai bukti hukum, sumber informasi sejarah, dan aset penting yang harus dijaga keberadaannya oleh institusi.

Melalui kegiatan magang ini, kami terlibat dalam berbagai proses pengelolaan arsip inaktif, seperti pemilahan arsip, penyusunan deskripsi arsip, hingga penyimpanan di *record center*. Dari proses tersebut, kami memahami bahwa pengelolaan arsip inaktif memerlukan ketelitian dan sistem penataan yang baik agar informasi yang terkandung di dalamnya tetap terpelihara, mudah ditelusuri, serta dapat dimanfaatkan kembali ketika dibutuhkan.

Pembahasan

Arsip inaktif merupakan arsip dinamis yang frekuensi penggunaannya telah menurun dan tidak lagi digunakan secara langsung dalam kegiatan sehari-hari organisasi. Meski demikian, arsip ini tetap memerlukan penyimpanan karena masih memiliki nilai guna untuk keperluan administrasi, hukum,

atau sejarah. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, arsip inaktif didefinisikan sebagai arsip dinamis yang tidak lagi digunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, atau penyelenggaraan kegiatan organisasi namun masih perlu disimpan untuk keperluan bukti dan informasi. Berbeda dengan arsip aktif yang terus mengalir dalam proses administrasi harian, arsip inaktif memerlukan penanganan khusus karena volumenya yang terus menumpuk di tengah keterbatasan ruang penyimpanan.

Manajemen arsip inaktif merupakan suatu aktivitas sekelompok orang yang dilandasi pengetahuan, keahlian, dan tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan arsip inaktif dengan sumber daya yang dimiliki sehingga mencapai tujuan yang telah ditentukan secara efektif dan efisien (Barlian, 2022; Sattar, 2020). Yang dimaksud dengan efektif adalah tersedianya arsip secara cepat, tepat, dan kepada pihak yang berhak mengaksesnya saat dibutuhkan. Sementara itu, efisien mengacu pada pengelolaan arsip yang mempertimbangkan penggunaan biaya operasional secara optimal. Pengelolaan arsip yang tepat dapat membantu organisasi menghindari penumpukan arsip yang tidak terkendali serta memastikan informasi tetap mudah diakses dan terjaga ketersediaannya.

Proses pengelolaan arsip inaktif mencakup beberapa tahap utama yang harus

dilaksanakan secara berurutan dan sistematis. Berikut adalah tahapan yang kami laksanakan selama kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL):

1. Tahap Pemilahan (*Sorting*)

Pemilahan arsip inaktif dilakukan berdasarkan klasifikasi jenis arsip, periode pembuatan, dan unit penyelenggara arsip. Pegawai arsip memeriksa kondisi fisik dokumen dan mengelompokkan berdasarkan kemiripan karakteristik. Arsip yang sudah tidak memiliki nilai kegunaan lagi ditandai untuk proses penyusutan. Pemilahan yang tepat menjadi fondasi penting dalam pengelolaan arsip inaktif karena menentukan efisiensi tahap selanjutnya (ANRI, 2015; Barlian, 2022).

2. Pembuatan Deskripsi Arsip

Deskripsi arsip dibuat untuk setiap kelompok arsip inaktif yang meliputi informasi tentang judul arsip, periode, jumlah berkas, unit penyelenggara, dan kode klasifikasi. Deskripsi ini berfungsi sebagai alat pencari (*finding aid*) yang memungkinkan pengguna menemukan arsip secara cepat tanpa harus membuka setiap boks penyimpanan. Pembuatan deskripsi yang akurat meningkatkan efisiensi akses informasi dan mendukung tertib administrasi organisasi (Ramanda & Indrahti, 2015).

3. Penataan dan Penyimpanan di *Record Center*

Arsip inaktif yang telah dikelompokkan dan dideskripsikan kemudian ditata dalam



Gambar 1. Pembuatan Deskripsi Arsip



Gambar 2 Penataan dan Penyimpanan di *Record Center*

boks arsip standar dan disimpan di *record center* (pusat arsip). Penyimpanan dilakukan dengan prinsip mudah ditemukan, aman, dan terjaga kondisi fisiknya. Penataan menggunakan sistem penomoran yang terstruktur memungkinkan pelacakan lokasi arsip secara presisi. *Record Center* harus memiliki kondisi lingkungan yang terkendali untuk mencegah kerusakan akibat kelembaban, suhu ekstrem, maupun serangan biota/hama (ANRI, 2015; Sattar, 2020).

4. Pelayanan dan Akses Arsip

Tahap pelayanan meliputi permintaan

arsip oleh pengguna, pencatatan dalam daftar keluar-masuk arsip, pengambilan dari *record center*, dan pengembalian setelah digunakan. Sistem pencatatan yang baik memastikan arsip inaktif dapat dipertanggungjawabkan dan tidak hilang. Pelayanan yang efisien mendukung fungsi arsip sebagai sumber informasi bagi pengambilan keputusan organisasi (Ramanda & Indrahti, 2015).

Pengelolaan arsip inaktif yang sistematis memiliki peran strategis dalam mendukung akuntabilitas institusi. Arsip berfungsi sebagai *memory center* dan *monitoring*

tool yang mencatat seluruh aktivitas organisasi serta keputusan yang telah diambil (Mulyono dkk., 2011). Dengan pengelolaan yang baik, arsip inaktif dapat menjadi bukti otentik dalam pemeriksaan hukum, audit administrasi, atau penelitian sejarah institusi.

Dalam konteks pemerintahan dan organisasi publik, pengelolaan arsip inaktif juga mendukung prinsip keterbukaan informasi publik. Masyarakat dapat mengakses informasi tentang keputusan dan aktivitas pemerintah melalui arsip yang terkelola secara baik. Hal ini selanjutnya memperkuat prinsip akuntabilitas dalam tata kelola administrasi dan membangun kepercayaan publik terhadap institusi. (Arbain, 2025).

Pengelolaan arsip inaktif menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan penanganan strategis. Volume arsip yang terus bertambah setiap tahunnya menyebabkan kebutuhan ruang penyimpanan dan pengelolaan arsip menjadi semakin kompleks. Selain itu, kondisi fisik arsip yang rapuh memerlukan strategi preservasi yang tepat agar informasi tetap dapat dipertahankan dalam jangka Panjang.

Penutup

Pengalaman magang di Bidang Arsip, Perpustakaan dan Arsip UGM memberikan pemahaman mendalam kepada kami tentang pentingnya pengelolaan arsip inaktif untuk menjaga akuntabilitas institusi dan

melestarikan memori organisasi. Melihat bagaimana arsip inaktif dipilih, dideskripsikan, dan disimpan, kami belajar bahwa arsip inaktif bukanlah sekadar limbah administrasi yang pasif, melainkan aset berharga yang mendokumentasikan perjalanan sebuah lembaga dan dapat menjadi bukti hukum yang kuat.

Tantangan seperti volume arsip yang menumpuk dan kondisi fisik yang rapuh menuntut adanya pengelolaan yang sistematis, terstandar, dan berkelanjutan. Namun, tantangan tersebut sekaligus membuka peluang untuk mengoptimalkan efisiensi ruang penyimpanan dan mempertahankan bukti sejarah dalam jangka waktu yang jauh lebih lama. Melalui kegiatan ini, kami sadar bahwa peran pengelolaan arsip inaktif sangat besar dalam mendukung akuntabilitas, menjaga memori kolektif, serta melestarikan warisan administratif institusi.

Magang ini tidak hanya menambah keterampilan teknis kami dalam pemilahan, deskripsi, dan penyimpanan arsip inaktif, tetapi juga membangun rasa tanggung jawab dan kebanggaan untuk turut menjaga jejak sejarah UGM bagi masa depan. Pengelolaan arsip inaktif yang baik merupakan investasi bagi organisasi karena memastikan informasi tetap tersedia, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan kapan saja saat diperlukan.

Referensi

- Arbain, F. N. K. (2024). The Role of Archives in Managing Public Information in the East Java Province Library and Archives Service. *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi*, 6 (1) . <https://doi.org/10.58258/jihad.v7i1.8402>
- Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). (2015). *Manajemen arsip inaktif*. <https://jdih.anri.go.id>
- Barlian, B. (2022). ASIP4319 – *Manajemen Arsip Inaktif (Edisi 3)*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka. ISBN 9786234808872
- Mulyono, S., Partono, P., & Kuswantoro, A. (2011). *Manajemen Kearsipan (1st ed.)*. Semarang: Unnes Press. ISBN 978-602-8467-57-5
- Perpustakaan Universitas Gadjah Mada. (2014). *Manajemen Arsip Inaktif sebagai Solusi Permasalahan Arsip*. Yogyakarta: Arsip UGM. <https://arsip.ugm.ac.id>
- Ramanda, R. S., & Indrahti, S. (2015). Analisis Pengelolaan Arsip Inaktif Terhadap Temu Kembali Arsip Di Pusat Arsip (Record Center) Politeknik Negeri Semarang. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 4(3), 2 1 1 – 2 2 0 . <https://doi.org/10.14710/jip.v4i3.211-220>
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan*.
- Sattar. (2020). *Manajemen Arsip Inaktif – Panduan Pengelolaan dan Penyusutan Arsip Organisasi*. Yogyakarta: Deepublish. ISBN 978-623-02-1201-7

Sains di Balik Sejarah: Seni Memperpanjang Umur Arsip Kertas dan Foto Melalui Preservasi



Roro Saskia Hertianti
&
Roro Taskia Hertianti

Pengantar

Praktik Kerja Lapangan (PKL) menjadi salah satu kesempatan berharga bagi kami sebagai siswa SMKN 1 Purbalingga untuk mengenal dunia kerja secara langsung. Selama menjalani kegiatan PKL di Perpustakaan dan Arsip Universitas Gadjah Mada (UGM), kami memperoleh banyak pengalaman baru, khususnya mengenai bidang kearsipan yang sebelumnya belum kami pahami secara mendalam. Pada awalnya, arsip mungkin terlihat hanya sebagai kumpulan dokumen lama yang disimpan di rak atau boks penyimpanan. Namun, setelah terlibat secara langsung di lingkungan kerja, kami memahami bahwa arsip memiliki fungsi yang jauh lebih

penting sebagai sumber informasi, bukti perjalanan institusi, sekaligus warisan yang perlu dijaga keberadaannya.

Selama kegiatan magang, kami berkesempatan mengenal berbagai proses pengelolaan arsip, mulai dari pemeliharaan lingkungan penyimpanan hingga tindakan preservasi fisik arsip tekstual dan foto. Pengalaman tersebut memberikan pemahaman bahwa menjaga arsip bukan sekadar menyimpan dokumen, melainkan juga memastikan informasi yang terkandung di dalamnya tetap terpelihara dan dapat dimanfaatkan pada masa mendatang. Melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan tersebut, kami semakin menyadari pentingnya upaya pelestarian arsip sebagai bagian dari menjaga memori institusi dan nilai sejarah yang dimiliki UGM.

Pembahasan

Arsip merupakan kumpulan rekaman atau catatan yang terorganisir dan diciptakan oleh individu, organisasi, atau institusi sebagai bukti atas aktivitas serta keputusan yang mereka lakukan. Arsip dapat berwujud banyak format, mulai dari dokumen tekstual, foto, rekaman audio, rekaman video, hingga konten digital yang masing-masing mencerminkan asal-usul dan konteks penciptaannya. Keunikan arsip terletak pada nilai autentiknyanya; setiap berkas memiliki nilai hukum dan sejarah yang tidak dapat digantikan, berbeda dari

koleksi perpustakaan yang biasanya berisi terbitan ganda (Pitti & Duff, 2024). Bentuk arsip yang beragam, seperti surat, dokumen administratif, foto, video, atau arsip digital, mencerminkan luasnya informasi yang dihasilkan oleh pencipta arsip (Damoro & Muarie, 2024).

Dalam konteks yang lebih luas, arsip memegang peran penting sebagai penjaga warisan sejarah dan budaya. Arsip berfungsi melestarikan memori kolektif masyarakat dan mendukung keterbukaan informasi publik, yang selanjutnya memperkuat prinsip akuntabilitas dalam tata kelola administrasi (Arbain, 2025). Namun, perkembangan lingkungan dan faktor usia membawa tantangan baru dalam pengelolaan fisik arsip, seperti risiko kerusakan akibat kelembaban, serangan biota, hingga kerapuhan material kertas. Oleh karena itu, pengelolaan arsip yang efektif melalui tindakan penyelamatan fisik menjadi langkah strategis untuk menjaga keberlanjutannya dan memastikan nilai informasinya tetap terjaga bagi generasi mendatang (Lesmana & Sukma, 2025).

Salah satu upaya paling krusial dalam menjaga keberlangsungan fisik tersebut adalah preservasi arsip. Preservasi arsip merupakan proses merawat, melindungi, dan merestorasi bahan arsip agar terhindar dari kerusakan fisik akibat usia atau faktor lingkungan agar tetap dapat diakses dalam jangka panjang. Praktik ini menjadi semakin penting mengingat arsip fisik menghadapi berbagai ancaman nyata, mulai dari bencana alam hingga degradasi zat kimia

internal kertas. Preservasi membantu melindungi arsip dari risiko tersebut, sebagaimana ditunjukkan dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang menekankan pentingnya melestarikan dokumen dari ancaman kerusakan lingkungan (Nikmah et al., 2024).

Pelaksanaan preservasi juga membutuhkan standar kerja yang jelas. Penerapan *Standard Operating Procedures* (SOP) memastikan setiap tahap perbaikan fisik dilakukan sesuai prinsip kelestarian yang tepat sehingga karakteristik asli arsip tidak hilang (Arwana et al., 2024). Selain menjaga kekuatan fisik, proses restorasi seperti laminasi tradisional berperan besar dalam memperpanjang usia pakai dokumen agar tidak hancur saat dipelajari. Di samping itu, penanganan khusus pada arsip foto, seperti pembersihan emulsi dan penggunaan pembatas yang tepat, dikembangkan untuk mencegah kerusakan visual yang permanen (Romanik & Muntz, 2001). Adapun tahapan proses preservasi dan restorasi arsip statis tekstual (laminasi Tisu Jepang) serta perawatan foto yang kami lakukan adalah sebagai berikut:

1. Tahap Sterilisasi dan Pengecekan Lingkungan Depo

Meliputi kegiatan penggantian *silica gel* dan kamper secara berkala untuk menjaga kelembaban udara ruang depo. Selanjutnya, dilakukan pembukaan boks arsip untuk sterilisasi mikroba serta pengisian *check list* kondisi fisik ruang depo arsip, ruang preservasi, transit layanan, dan transit arsip.

2. Pengambilan dan Dokumentasi Awal

Arsiparis mengambil fisik arsip tekstual dari ruang depo secara hati-hati sesuai daftar tugas. Sebelum tindakan perbaikan dilakukan, dokumen wajib didokumentasikan terlebih dahulu sebagai bukti autentik kondisi awal (*before*).

3. Pembersihan Khusus Dokumen

Arsip dibersihkan secara manual dari debu yang menempel menggunakan kuas halus. Seluruh benda logam yang berpotensi merusak kertas, seperti staples atau klip kertas, dilepas secara perlahan agar tidak merobek serat dokumen.

4. Pelabelan dan Proteksi Tinta Basah

Petugas memberikan nomor identifikasi pada bagian belakang arsip menggunakan pensil. Jika ditemukan cap instansi atau tanda tangan bermaterial tinta basah, bagian tersebut digosok menggunakan lilin khusus satu arah untuk memproteksi tinta agar tidak luntur saat terkena cairan lem.

5. Penataan pada Papan Akrilik

Dokumen yang telah siap kemudian diletakkan dengan posisi rata di atas papan akrilik bersih yang berfungsi sebagai alas utama proses pelapisan.

6. Aplikasi Tisu Jepang

Lembaran Tisu Jepang dipotong rapi sesuai dengan ukuran dimensi arsip tekstual, lalu diletakkan dengan presisi di atas permukaan dokumen kearsipan yang mulai rapuh.

7. Penyemprotan Cairan dan Pengolesan Perekat

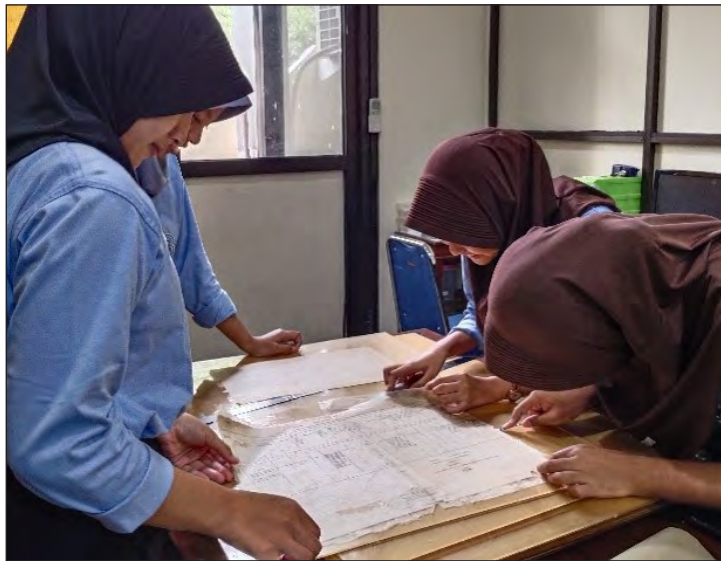
Permukaan Tisu Jepang disemprot menggunakan cairan khusus secara merata. Setelah itu, lem khusus preservasi diaplikasikan di atasnya dan diratakan secara perlahan menggunakan alat *wiper* untuk membuang gelembung udara di dalam kertas.

8. Pengeringan dan Perapian Tepi

Dokumen yang telah dilapisi Tisu Jepang dipindahkan ke rak pengering khusus. Setelah dipastikan kering total, arsip dilepaskan dari



Gambar 1. Pembersihan Dokumen



Gambar 2. Perapian Tepi



Gambar 3. Perawatan Arsip Foto

papan akrilik secara perlahan, kemudian bagian tepi atau sisa-sisa Tisu Jepang digunting rapi.

9. Proses Pengompresan (*Pressing*) dan Pendataan

Arsip tekstual yang selesai dilaminasi dimasukkan ke dalam mesin pres minimal selama 3 hari agar permukaan kertas kembali lurus sempurna. Langkah ini diakhiri dengan pembuatan daftar hasil laminasi sebelum arsip fisik dikembalikan ke ruang depo.

10. Perawatan Eksklusif Arsip Foto

Proses diawali dengan mengambil arsip foto dari depo, lalu membersihkan permukaannya dari jamur menggunakan alkohol kadar 70-90% dan kain halus. Foto dikeringkan di meja pengering, diberi sekat kertas roti di setiap lembar agar tidak saling menempel, dimasukkan kembali ke amplop berkode khusus. Selanjutnya dicatat pada daftar hasil preservasi foto dan disimpan kembali di ruang depo sesuai prosedur.

Penutup

Pelaksanaan PKL di Perpustakaan dan Arsip UGM memberikan pengalaman sekaligus wawasan baru bagi kami mengenai pentingnya menjaga keberlangsungan arsip sebagai sumber informasi dan bukti sejarah sebuah institusi. Kegiatan yang kami ikuti, mulai dari perawatan lingkungan depo hingga preservasi arsip tekstual dan foto, menunjukkan bahwa upaya pelestarian arsip membutuhkan ketelitian, kesabaran, serta prosedur yang terstandar agar kondisi fisik arsip tetap terjaga. Dari pengalaman tersebut, kami memahami bahwa arsip tidak hanya berfungsi sebagai dokumen penyimpanan, tetapi juga memiliki nilai penting dalam menjaga memori institusi, mendukung akuntabilitas, dan melestarikan perjalanan sejarah agar tetap dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang. Selain menambah keterampilan teknis di bidang kearsipan, pengalaman ini juga menumbuhkan rasa tanggung jawab serta apresiasi kami terhadap pentingnya menjaga warisan dokumentasi sejarah.

Referensi

- Arbain, F. N. K. (2025). The Role of Archives in Managing Public Information in the East Java Province Library and Archives Service. *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi*, 7 (1) . <https://doi.org/10.58258/jihad.v7i1.8402>
- Arwana, N. Y., Batubara, A. K., & Fathurrahman, M. (2024). Alih Media Arsip Sebagai Upaya Preservasi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Labuhanbatu Utara. *Jurnal Pendidikan, Bahasa dan Budaya*, 3(2), 01–17. <https://doi.org/10.55606/jpbb.v3i2.302>
- Damoro, A. I., & Muarie, M. S. (2024). Perancangan Sistem Informasi Klasifikasi Arsip BMKG Stasiun Meteorologi SMB II Kota Palembang. *Jurnal Sistem Informasi dan Ilmu Komputer*, 2 (2) , 45 – 58 . <https://doi.org/10.59581/jusiik-widyakarya.v2i2.3017>
- Lesmana, Y. I., & Sukma, E. A. (2025). Penilaian Kualitas dan Fungsi Foto sebagai Arsip dalam Konteks Dokumentasi dan Pelestarian Informasi Visual. *Jurnal Mahasiswa Kreatif*, 3(4), 137–150. <https://doi.org/10.59581/jmk-widyakarya.v3i4.5389>
- Nikmah, F., Ulya, I., Armayrishtya, Z., & Iqbal, M. (2024). Pemeliharaan dan Pengamanan Arsip Keluarga Melalui Tindakan Alih Media . <https://doi.org/10.46306/seumpama.v2i1.58>
- Pitti, D. V., & Duff, W. (2024). *Introduction* (pp. 1 – 6) . <https://doi.org/10.1201/9781003573166-1>
- Rit, R. (2025). From Manuscripts to Metadata: Evolving Roles of Libraries and Archives in Knowledge Preservation. *Journal of Research in Humanities and Social Science*, 13(8), 109–116. <https://doi.org/10.35629/9467-1308109116>
- Romanik, P. B., & Muntz, A. H. (2001). *Image transfer and archival system*. <https://patents.google.com/patent/US7565441B2/en>

“Arsip Keluarga: Memori yang Terjaga dan Tak Terlupakan”



Badriyah
Politeknik LP3I Jakarta

Banyak keluarga menyimpan album foto lama di lemari, surat-surat berwarna kusam di dalam kotak, atau dokumen penting yang terselip di antara tumpukan berkas, kertas, dan dokumen. Benda-benda tersebut sering dianggap hanyalah tumpukan barang lama, padahal di balikinya tersimpan jejak perjalanan keluarga yang tak ternilai. Arsip keluarga bukan hanya kumpulan kertas, foto, rekaman video, audio, melainkan rekaman identitas, memori, dan sejarah yang dapat menjadi jembatan penghubung masa lalu dengan masa kini.

Mengenal Arsip Keluarga

Ketika mendengar kata arsip, banyak

orang mungkin membayangkan tumpukan dokumen di kantor, lemari berisi berkas-berkas administrasi, atau ruang penyimpanan yang penuh dengan map dan kotak. Padahal, arsip tidak hanya dimiliki oleh lembaga pemerintahan, perusahaan, atau organisasi. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap keluarga juga memiliki arsip yang merekam berbagai peristiwa penting dalam perjalanan hidup anggotanya. Woodham dkk. (2017) mendefinisikan arsip keluarga sebagai sekumpulan dokumen yang dimiliki suatu keluarga, umumnya berbentuk kertas, yang mencakup foto, sertifikat, buku, surat, dan berbagai catatan lainnya. Adapun Nurtanzila dan Sholikhah (2020) menjelaskan bahwa arsip keluarga adalah rekaman kegiatan atau informasi yang diciptakan maupun disimpan oleh keluarga dalam berbagai bentuk media sesuai perkembangan zaman dan memiliki kegunaan bagi kehidupan keluarga. Secara sederhana, arsip keluarga dapat diartikan sebagai kumpulan dokumen, foto, rekaman, surat, maupun berbagai bentuk informasi lain yang dihasilkan, diterima, dan disimpan oleh anggota keluarga sebagai bukti atau kenangan atas suatu peristiwa. Muhyadi dkk. (2021), arsip keluarga merupakan bukti otentik yang menerangkan keberadaan seseorang sebagai individu maupun anggota masyarakat, termasuk hak-haknya dalam bidang pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal, dan

kehidupan sosial. Arsip keluarga menjadi jejak yang merekam perjalanan hidup seseorang maupun keluarganya dari waktu ke waktu. Melalui arsip tersebut, sebuah keluarga dapat mengetahui asal-usul, pengalaman, pencapaian, hingga berbagai peristiwa penting yang pernah dialami.

Bentuk arsip keluarga sangat beragam. Dari arsip vital, biasa, penting, dan tidak penting. Seperti Akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah, rapor sekolah, surat nikah, sertifikat tanah, dan dokumen kepemilikan kendaraan merupakan contoh arsip yang memiliki nilai administratif dan hukum. Di sisi lain, foto keluarga, surat pribadi, buku harian, kartu ucapan, rekaman video pernikahan, hingga pesan elektronik yang disimpan dengan baik juga dapat menjadi bagian dari arsip keluarga karena mengandung informasi dan kenangan yang berharga. Bahkan, sebuah foto hitam putih yang tersimpan puluhan tahun di dalam album lama dapat menjadi sumber cerita yang memperlihatkan kehidupan suatu keluarga pada berpuluh tahun yang lalu. Menurut Dewi, Habibi, dan Sari (2020), arsip keluarga mencakup dokumen yang berkaitan dengan keluarga seperti identitas pribadi, identitas keluarga, ijazah, foto, buku harian, hingga surat pribadi yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber sejarah.

Sementara itu, Fatmawati dan Rafa (2024) menjelaskan bahwa arsip keluarga tidak hanya berbentuk dokumen fisik, tetapi juga dapat berupa arsip digital yang tercipta dari

aktivitas keluarga sehari-hari dan memiliki nilai informasi bagi generasi berikutnya. Dengan demikian, setiap arsip keluarga, sekecil apapun bentuknya, menyimpan jejak perjalanan hidup yang berpotensi menjadi sumber pengetahuan dan memori kolektif keluarga. Selaras dengan yang termuat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pada pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa "arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan individu dalam pelaksanaan kehidupan nasional, dan internasional"

Meski demikian, tidak semua benda lama yang disimpan di rumah dapat disebut sebagai arsip keluarga. Arsip keluarga memiliki perbedaan dengan benda koleksi biasa. Benda koleksi umumnya disimpan karena memiliki nilai estetika, keunikan, atau koleksi dari hobi anggota keluarga. Misalnya, koleksi perangko, miniatur kendaraan, koin kuno, atau barang antik tertentu. Sementara itu, arsip keluarga disimpan karena mengandung informasi, bukti, dan nilai dokumentasi yang berkaitan langsung dengan perjalanan hidup keluarga. Sebagai contoh, sebuah jam tangan tua peninggalan kakek mungkin hanya menjadi benda koleksi jika disimpan karena bentuknya

yang unik. Namun, apabila jam tangan tersebut disertai dokumen pembelian, foto pemiliknya, atau cerita yang menjelaskan kaitannya dengan perjalanan hidup sang kakek, maka informasi yang menyertainya dapat menjadi bagian dari arsip keluarga. Dengan kata lain, nilai utama arsip terletak pada informasi dan konteks yang terkandung di dalamnya, bukan semata-mata pada bentuk fisiknya.

Menariknya, banyak keluarga tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya telah memiliki arsip. Hampir setiap keluarga menyimpan dokumen identitas, foto-foto peristiwa penting, surat-surat berharga, atau rekaman kegiatan keluarga. Arsip tersebut tercipta secara alami seiring berlangsungnya kehidupan sehari-hari. Setiap kelahiran, kelulusan sekolah, pernikahan, perpindahan tempat tinggal, hingga pencapaian tertentu akan menghasilkan dokumen atau rekaman yang kemudian disimpan oleh keluarga. Selaras dengan disampaikan oleh Suliyati (2019) bahwa Arsip keluarga menjadi bukti dan penanda aktivitas yang dilakukan oleh seluruh anggota keluarga.

Pada masa lalu, arsip keluarga umumnya berbentuk fisik, seperti album foto dari setiap anggota keluarga dan dari berbagai perayaan pernikahan, khitanan, ulang tahun yang tercetak, surat tulisan tangan, atau dokumen yang disimpan di lemari, perjalanan pekerjaan ayah ibu, ada SK, surat tugas, surat keterangan, surat kuasa dan lain sebagainya. Kini, perkembangan teknologi membuat arsip

keluarga hadir dalam bentuk yang lebih beragam. Foto digital, video di telepon genggam, surat elektronik, hingga unggahan media sosial yang mendokumentasikan momen penting keluarga juga dapat menjadi bagian dari arsip keluarga modern. Meskipun medianya berubah, fungsinya tetap sama, yaitu merekam perjalanan hidup dan menyimpan memori keluarga untuk masa depan.

Dimulai dari penciptaan arsip yang akan atau disimpan oleh keluarga dalam berbagai bentuk media sesuai perkembangan zaman dan berguna bagi kegiatan keluarga (Nurtanzila & Sholikhah, 2021). Arsip tersebut dapat berupa media foto, surat, video, dokumen keluarga, hingga catatan peristiwa penting. Begitu juga yang disampaikan Dewi dkk. (2020) jenis-jenis arsip keluarga seperti ijazah, foto, buku harian, dan surat pribadi sebagai bagian dari arsip keluarga dan sumber sejarah. Agar dapat ditemukan kembali ketika dicari, untuk suatu kebutuhan entah hanya untuk mengenang, bukti sebuah persyaratan administratif, atau bahkan untuk dibaca kembali, dilihat kembali, diperlukan pengelolaan yang baik. Badriyah (2024), dalam mengurus arsip yang meliputi penciptaan arsip sampai dengan pemusnahan, harus dilakukan dengan tepat.

Karena itulah, arsip keluarga dapat dipandang sebagai warisan yang tidak hanya bernilai administratif, tetapi juga bernilai sejarah dan emosional. Dalam arsip tersimpan cerita tentang siapa kita, dari mana kita berasal,

dan bagaimana perjalanan keluarga terbentuk dari generasi ke generasi. Mengenali dan memahami arsip keluarga merupakan langkah awal untuk menjaga memori kolektif keluarga agar tidak hilang ditelan waktu. Dengan kesadaran tersebut, setiap keluarga dapat mulai melihat kembali dokumen, foto, dan berbagai rekaman yang selama ini tersimpan di rumah sebagai bagian dari harta berharga yang layak dijaga dan diwariskan.

Arsip keluarga tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan dokumen, tetapi juga menjadi penjaga memori yang merekam perjalanan hidup sebuah keluarga. Dalam album foto yang mulai menguning, surat-surat lama, buku harian, hingga dokumen identitas, tersimpan jejak kehidupan yang dapat menghubungkan generasi masa kini dengan generasi sebelumnya. Oleh karena itu, arsip keluarga memiliki nilai historis yang penting karena mampu menjadi sumber informasi mengenai asal-usul keluarga, peristiwa penting yang pernah terjadi, serta kondisi sosial pada zamannya. Bagi para peneliti sejarah, arsip keluarga bahkan dapat menjadi sumber primer yang membantu merekonstruksi sejarah masyarakat dari sudut pandang yang lebih dekat dan personal. Arsip keluarga tidak hanya menceritakan sejarah sebuah rumah tangga, tetapi juga menjadi bagian dari memori kolektif masyarakat yang lebih luas.

Era digital dan yang merupakan bentuk nyata dari perkembangan teknologi telah

mengubah perilaku dunia dan isinya. Tidak luput juga cara keluarga menciptakan, mengelola, menyimpan dan menghapus arsip, dari album foto, surat, dan dokumen yang tersimpan di lemari menjadi file digital yang dapat diakses, dan ditemukan melalui berbagai perangkat. Namun, perubahan wadah atau media tersebut tidak mengurangi makna dan fungsi arsip sebagai penjaga memori dan histori keluarga. Baik dalam bentuk fisik maupun digital, arsip keluarga tetap menjadi saksi perjalanan hidup yang merekam berbagai momen penting, pencapaian, serta dinamika yang dialami oleh setiap anggota keluarga. Di balik setiap foto, video, audio, surat, atau dokumen yang tersimpan, terdapat kisah yang membentuk identitas keluarga dan menghubungkan pengalaman generasi terdahulu dengan generasi masa kini. Karena itu, arsip keluarga bukan sekadar kumpulan dokumen masa lalu, melainkan jembatan yang menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan memori, nilai, dan sejarah keluarga, agar tetap hidup dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang.

Referensi

- Badriyah, N. G. K., & Makmuroh, U. H. (2024). Manajemen pengarsipan dokumen pada bagian Pengolahan dan Pengembangan Data dan Informasi (PPDI) Bank Indonesia. *Jurnal*

Manajemen Diversitas, 4(1), 1–12.
<https://doi.org/10.65378/manajemendiversitas.v4i1.159>

Br. Sihaloho. (2026). Instagram social media as a support for family archive management. *Khazanah: Jurnal Pengembangan Kearsipan*, 19(1).

Dewi, P. R., Habibi, A., & Sari, R. B. (2020). Archival positioning and family history in Indonesian historiography. *Jurnal Kearsipan*, 15(1), 15–31.

Fatmawati, E. (2024). Membudayakan pengelolaan arsip keluarga: Upaya membangun ketahanan keluarga. *IQRA: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 18(2).

Nurtanzila, L., & Sholikhah, F. (2020). Digitalisasi arsip sebagai upaya perlindungan arsip vital milik keluarga di Dusun Punukan, Wates, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. *Diplomatika: Jurnal Kearsipan Terapan*, 4(2).

Resensi Buku Romansa Arsiparis dan Pustakawan: Humor, Satire, dan Bahasa Cinta tentang Melestarikan Memori

Zuli Erma Santi
Universitas Gadjah Mada



Judul	:	Romansa Arsiparis dan Pustakawan: Humor, Satire, dan Bahasa Cinta tentang Melestarikan Memori
Penulis	:	Herman Setyawan, Delta Ira Anggreanie, Wasilatul Baroroh
Penerbit	:	Madani Kreatif Publisher, 2026
Tebal	:	151 halaman

Buku ini beda

Ada buku yang mengajari pembacanya dengan definisi, teori, dan daftar istilah. Ada pula buku yang memilih jalan lain: ia bercakap, menyindir, menggoda, lalu diam-diam

mengajak berpikir lebih dalam. *Romansa Arsiparis dan Pustakawan: Humor, Satire, dan Bahasa Cinta tentang Melestarikan Memori* termasuk ke dalam kelompok kedua.

Membaca buku ini terasa seperti duduk bersama seorang arsiparis atau pustakawan yang telah terlalu lama hidup di antara rak, boks, metadata, dan dokumen-dokumen tua, lalu suatu hari memutuskan untuk bercerita tentang pekerjaannya bukan dengan bahasa prosedur, melainkan dengan bahasa cinta.

Dan di situlah letak keunikan buku ini

Selama ini, perpustakaan dan arsip sering dipahami secara teknis: standar, sistem klasifikasi, preservasi, akses informasi, tata kelola dokumen, atau kebijakan institusional. Buku ini sengaja bergerak ke arah yang berbeda. Sejak bagian pengantar, para penulis menegaskan bahwa institusi memori tidak hanya berisi prosedur, tetapi juga menyimpan sisi manusiawi berupa kesabaran, penantian, kesetiaan, bahkan cinta yang tidak selalu berbalas.

Pernyataan itu mungkin terdengar berlebihan bagi sebagian orang. Namun justru dari keberanian menggunakan metafora cinta inilah buku ini menemukan kekuatannya. Alih-alih membuat arsip dan perpustakaan terasa

kaku, penulis berhasil menjadikannya dekat, hangat, bahkan lucu.

Buku ini terdiri atas dua puluh bab dengan judul-judul yang sejak awal sudah menunjukkan karakternya: *Perpustakaan yang Sunyi dan Arsip yang Setia, Arsip Tidak Pernah Bercanda, Tapi Kita Bisa, Digitisasi: Ketika Cinta Berubah Format, hingga Jika Arsip dan Buku Bisa Menulis Surat Cinta*.

Judul-judul itu bukan sekadar permainan kata. Ia menjadi pintu masuk menuju refleksi panjang mengenai profesi pustakawan, arsiparis, pelestarian memori, teknologi digital, identitas, layanan publik, hingga kemanusiaan.

Yang menarik, buku ini tidak berusaha menjadi bacaan akademik yang berat

Meskipun fondasi ilmiahnya jelas terlihat, buku ini tetap ringan. Hampir di setiap bagian, penulis menyisipkan rujukan penelitian, teori, dan literatur internasional. Namun, semuanya dibungkus dalam narasi yang cair. Pembaca tidak merasa sedang diuji oleh teori, pembaca justru diajak berjalan pelan-pelan melalui pengalaman emosional tentang apa artinya menjaga ingatan.

Salah satu bab yang paling kuat adalah pembahasan mengenai “cinta pertama” terhadap pustaka dan arsip. Penulis menggambarkan bagaimana kecintaan terhadap pengetahuan kadang tidak lahir dari sesuatu yang megah, melainkan dari kartu anggota perpustakaan yang mulai lusuh, aroma

buku lama, atau kegembiraan menemukan buku yang dicari di rak yang salah.

Buku ini tidak mengajak berpikir, namun mengajak untuk mencintai

Gambaran semacam ini terasa sangat akrab bagi siapa pun yang pernah memiliki hubungan emosional dengan buku. Buku ini memahami satu hal penting: membaca, mencari arsip, atau bekerja di institusi memori tidak selalu dimulai dari rasionalitas. Ada getaran yang sulit dijelaskan. Ada rasa pulang yang tidak sepenuhnya logis. Di tengah budaya digital yang serba cepat, perspektif seperti ini terasa menyegarkan. Profesional di bidang memori akan semakin cinta terhadap profesi mereka.

Kekuatan lain buku ini terletak pada keberaniannya membela kesunyian

Hari ini, dunia memuja kebisingan. Media sosial memberi penghargaan pada yang paling ramai, paling cepat, dan paling viral. Dalam konteks semacam itu, perpustakaan dan arsip kerap dianggap kuno karena terlalu tenang. Buku ini menolak cara pandang tersebut.

Kesunyian perpustakaan tidak dibaca sebagai kekurangan, melainkan sebagai ruang jeda, ruang bernapas, ruang tempat manusia bisa berpikir lebih lambat dan mungkin justru lebih jernih.

Refleksi ini terasa sangat relevan untuk masyarakat kontemporer yang mulai

mengalami kelelahan informasi. Kita hidup di zaman ketika semua orang berbicara, tetapi semakin sedikit yang benar-benar mendengar. Dalam situasi demikian, perpustakaan dan arsip yang sunyi mendadak tampak bukan sebagai institusi usang, melainkan sebagai bentuk perlawanan kecil terhadap budaya tergesa-gesa.

Namun buku ini tidak jatuh menjadi romantisasi berlebihan

Ia tetap sadar bahwa perpustakaan modern berubah, digitalisasi berkembang, pengguna bergeser, dan teknologi tidak bisa dihindari. Bahkan ada bab khusus yang membahas digitisasi sebagai “cinta yang berubah format.”

Pilihan metafora ini menarik. Digitalisasi tidak diposisikan sebagai musuh kertas, melainkan sebagai transformasi relasi manusia dengan memori. Aroma buku mungkin berganti cahaya layar; rak fisik mungkin berdampingan dengan server; tetapi pertanyaan dasarnya tetap sama: bagaimana pengetahuan dirawat agar tidak hilang?

Di sinilah buku ini menunjukkan kedewasaannya.

Ia tidak anti-teknologi, tetapi juga tidak memuja teknologi secara naif. Barangkali bagian paling menyenangkan dalam buku ini adalah penggunaan humor dan satire. Dalam dunia profesional, terutama bidang arsip dan perpustakaan, humor kadang dianggap tidak serius. Buku ini justru membalik asumsi tersebut.

“Arsiparis yang tidak pernah tertawa mungkin hanya kurang minum kopi,” demikian kira-kira suasana yang dibangun dalam salah satu bab.

Humor hadir bukan sebagai tempelan, melainkan sebagai mekanisme bertahan.

Di balik tumpukan pekerjaan administratif, stereotip profesi, tuntutan profesionalisme, dan tekanan layanan, humor diposisikan sebagai bentuk kesehatan emosional. Ada pesan penting di sini: institusi memori dijalankan oleh manusia, bukan mesin. Dan manusia membutuhkan ruang untuk bernapas.

Hal yang sama tampak pada pembahasan tentang citra pustakawan dan arsiparis. Buku ini secara tajam mengkritik stereotip lama yang membayangkan pustakawan sebagai penjaga kesunyian yang galak atau arsiparis sebagai figur berdebu yang hidup di antara kotak-kotak dokumen.

Satire yang digunakan terasa halus tetapi efektif

Tanpa menggurui, pembaca diajak menyadari bahwa profesi perpustakaan dan arsip sebenarnya menjalankan pekerjaan intelektual, etis, kuratorial, dan sosial yang jauh lebih kompleks daripada persepsi populer selama ini. Salah satu kualitas terbaik buku ini adalah kemampuannya membuat hal-hal teknis menjadi terasa personal.

Metadata tidak lagi sekadar standar deskripsi. Rak dan lemari bukan lagi furnitur

membosankan. Preservasi tidak hanya soal suhu dan kelembapan. Semua dibaca sebagai bagian dari relasi manusia dengan waktu, identitas, kehilangan, dan harapan.

Ketika buku membahas rak, boks, dan lemari sebagai tempat kenangan disembunyikan, pembaca mulai melihat ruang penyimpanan bukan sebagai gudang, melainkan sebagai benteng sunyi yang menjaga memori lintas generasi. Mungkin memang demikian adanya. Setiap arsip adalah negosiasi antara apa yang ingin kita lupakan dan apa yang perlu kita simpan. Setiap perpustakaan adalah upaya manusia melawan kefanaan.

Meski demikian, buku ini tidak tanpa kelemahan. Karena menggunakan gaya reflektif dan metaforis secara konsisten, beberapa bagian terasa repetitif. Tema tentang cinta, kesetiaan, kesunyian, dan penantian kadang muncul berulang dengan variasi ungkapan yang mirip. Bagi pembaca yang menyukai struktur argumentasi yang lebih langsung atau analisis yang lebih ketat, pola ini mungkin sedikit melelahkan.

Ada pula momen ketika metafora menjadi sangat dominan sehingga batas antara refleksi puitis dan analisis substantif terasa menipis.

Namun, kelemahan tersebut sekaligus merupakan konsekuensi dari pilihan estetika buku ini. Ia memang tidak bercita-cita menjadi manual teknis, buku ajar metodologis, atau kajian teoritik murni. Ia ingin menjadi ruang renungan.

Dan sebagai ruang renungan, buku ini bekerja dengan baik

Yang patut diapresiasi adalah keberhasilan para penulis menghadirkan perpustakaan dan arsip sebagai persoalan kemanusiaan, bukan semata urusan profesi tertentu. Buku ini sebenarnya berbicara tentang sesuatu yang lebih luas: bagaimana manusia memperlakukan ingatan. Apa yang kita simpan? Apa yang kita lupakan? Siapa yang berhak mengakses cerita? Bagaimana teknologi mengubah hubungan kita dengan masa lalu? Apakah pelestarian masih relevan di era instan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut melampaui batas disiplin ilmu perpustakaan dan kearsipan. Ia menyentuh pengalaman manusia modern secara umum. *Romansa Arsiparis dan Pustakawan* bukan hanya buku tentang pustakawan atau arsiparis. Ia adalah buku tentang kesetiaan pada pengetahuan, tentang kerja sunyi yang jarang dirayakan, tentang orang-orang yang menjaga ingatan agar masyarakat tidak kehilangan dirinya sendiri.

Dalam dunia yang semakin cepat lupa, buku ini hadir seperti pengingat lembut bahwa merawat memori adalah bentuk merawat kemanusiaan

Dan mungkin itu sebabnya buku ini layak dibaca—bukan hanya oleh pustakawan, arsiparis, mahasiswa informasi, atau pengelola dokumen, tetapi juga oleh siapa saja yang pernah merasa bahwa sebuah buku lama, surat

usang, foto keluarga, atau catatan kecil dari masa lalu dapat menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar informasi. Mereka menyimpan cara manusia bertahan sebagai manusia.

Referensi

Setyawan, H., Anggreanie, D. I., & Baroroh, W. (2026). *Romansa Arsiparis dan Pustakawan: Humor, Satire, dan Bahasa Cinta tentang Melestarikan Memori*. Madani Kreatif Publisher.

